

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**HUBUNGAN INDONESIA DAN INDIA TAHUN 1950-1965  
SUATU TINJAUAN TERHADAP  
PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

*Delfinus*

NIM : 85214059

NIRM : 855027260050

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
IKIP SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
1991**

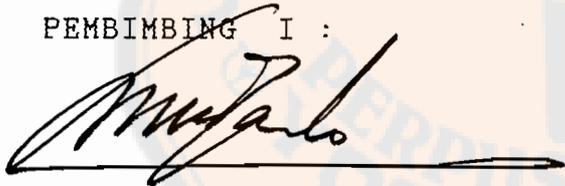
SKRIPSI

HUBUNGAN INDONESIA DAN INDIA TAHUN 1950-1965  
SUATU TINJAUAN TERHADAP  
PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

OLEH  
DELFINUS  
NIM : 85214059  
NIRM : 855027260050

TELAH DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I :



DRS. G. MOEDJANTO, M.A.

5/12 - 91

PEMBIMBING II :



DRS. B. MUSIDI, M. Pd.

6/12 - 91

SKRIPSI

HUBUNGAN INDONESIA DAN INDIA TAHUN 1950-1965  
SUATU TINJAUAN TERHADAP  
PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

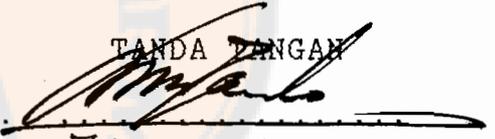
YANG DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH  
DELFINUS

NIM : 85214059

NIRM : 855027260050

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN PANITIA PENGUJI  
PADA TANGGAL 29 OKTOBER 1991  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI SYARAT

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

|                 | NAMA LENGKAP            | TANDA TANGAN                                                                          |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KETUA/ANGGOTA : | DRS. G. MOEDJANTO, M.A. |  |
| SEKRETARIS :    | DRS. J. MARKISWO        |  |
| ANGGOTA :       | DRS. B. MUSIDI, M.Pd.   |  |
| ANGGOTA :       | DRS. J. ADISUSILO       |  |

YOGYAKARTA, 9-12-91

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL



DEKAN



DRS. G. MOEDJANTO, M.A.

MOTTO

- *Kebebasan yang paling manis adalah sebuah hati yang jujur.*
- *Selama anda hidup, tetaplah belajar bagaimana cara hidup. (Peribahasa Latin)*





*Skripsi ini kupersembahkan*

*kepada yang terkasih:*

*Bapak, Ibu, Kakak,*

*Adik dan Narti*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat bimbingan dan rahmat-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis mengakui bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin akan selesai jika tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. G. Moedjanto, M.A. selaku Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Drs. B. Musidi, M.Pd. selaku Pembimbing II yang dengan senang hati memberi bimbingan dan mengoreksi skripsi ini.
3. Panitia Beasiswa Keuskupan Agung Pontianak, yang telah bersedia menyediakan dana untuk penyusunan skripsi ini.
4. Staf Perpustakaan IKIP Sanata Dharma, yang dengan senang hati memberikan pelayanan peminjaman buku-buku yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Staf Perpustakaan Nasional Jakarta, yang telah bersedia membantu mencarikan buku dan data-data yang penulis

perluan.

6. Staf Perpustakaan Wilayah DIY, yang telah bersedia membantu penulis melengkapi data-data yang masih kurang.
7. Staf CSIS Jakarta, yang telah bersedia memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Drs. Eko Sulistyono, yang telah banyak membantu penulis sewaktu mencari data di Jakarta.
9. Teman-teman yang telah memberi bantuan dan dorongan yang sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini.

Segala hal yang tertuang dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis. Oleh karena itu segala kritik dan saran demi perbaikannya diterima dengan hati terbuka. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para peminat studi sejarah.

Yogyakarta, Nopember 1991

Penulis

DAFTAR ISI

|                                                                     | halaman |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                 | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                            | iii     |
| HALAMAN MOTTO .....                                                 | iv      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                           | v       |
| KATA PENGANTAR .....                                                | vi      |
| DAFTAR ISI .....                                                    | viii    |
| DAFTAR TABEL .....                                                  | x       |
| ABSTRAK .....                                                       | xi      |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                             | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                     | 1       |
| B. Perumusan Masalah .....                                          | 10      |
| C. Sistematika Penulisan .....                                      | 10      |
| D. Tujuan Penelitian .....                                          | 11      |
| E. Manfaat Penelitian .....                                         | 12      |
| F. Metode Penelitian .....                                          | 12      |
| BAB II POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN INDIA<br>(1950-1965) ..... | 15      |
| A. Politik Luar Negeri Indonesia .....                              | 15      |
| B. Politik Luar Negeri India .....                                  | 24      |

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ix

|         |                                                                   |     |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB III | INDONESIA DAN INDIA MEMBINA HUBUNGAN BAIK<br>(1950-1958) .....    | 30  |
|         | A. Perjanjian Persahabatan Tahun 1951 .....                       | 30  |
|         | B. Kerja Sama Bilateral .....                                     | 33  |
|         | C. Konperensi Asia-Afrika .....                                   | 38  |
|         | D. Sikap India Dalam Masalah Irian Barat ...                      | 59  |
| BAB IV  | HUBUNGAN INDONESIA DAN INDIA RETAK .....                          | 64  |
|         | (1959-1961) .....                                                 | 64  |
|         | A. Masalah RRC Dalam Hubungan Indonesia Dan<br>India .....        | 65  |
|         | B. Indonesia Dan India Dalam KTT Nonblok I                        | 74  |
| BAB V   | HUBUNGAN INDONESIA DAN INDIA MEMBURUK<br>(1962-1965) .....        | 88  |
|         | A. Kasus Asian Games IV di Jakarta .....                          | 88  |
|         | B. Sikap Indonesia Terhadap Perang<br>RRC-India .....             | 93  |
|         | C. Sikap India Terhadap Konfrontasi<br>Indonesia-Malaysia .....   | 98  |
|         | D. Pertentangan Indonesia dan India Dalam<br>KTT Nonblok II ..... | 107 |
|         | E. Kegagalan Konperensi Asia-Afrika II .....                      | 115 |
| BAB VI  | KESIMPULAN .....                                                  | 122 |
|         | DAFTAR PUSTAKA .....                                              | 128 |
|         | LAMPIRAN-LAMPIRAN .....                                           | 133 |

DAFTAR TABEL

halaman

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABEL 1 : NILAI EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA KE/DARI<br>INDIA TAHUN 1950-1961 ..... | 34 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|



ABSTRAK

Skripsi berjudul "Hubungan Indonesia Dan India Tahun 1950-1965 Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia" ini, memuat beberapa permasalahan : (1) apa yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia dan India pada tahun 1950-1965 dan bagaimana perkembangan perumusannya ? (2) bagaimana cara Indonesia dan India meningkatkan hubungan persahabatan ? (3) mengapa kemudian hubungan Indonesia dan India menjadi retak ? (4) apa yang menyebabkan hubungan Indonesia dan India memburuk ?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk lebih mengetahui dan memahami hubungan Indonesia dan India pada tahun 1950-1965 ditinjau dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia beserta segala aspek yang mempengaruhinya. Untuk keperluan itu dipergunakan metode deskriptif analitik.

Hubungan yang dijalin sejak awal kemerdekaan dan adanya kesamaan pada prinsip-prinsip dasar politik luar negeri menjadi landasan yang kuat bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan persahabatan pada tahun 1950-1958. Perjanjian persahabatan, kerja sama bilateral, Konferensi Asia-Afrika dan dukungan konsisten India dalam masalah Irian Barat merupakan bukti terjalinnya hubungan baik tersebut. Namun pada tahun 1959-1961, hubungan kedua negara mengalami keretakan. Faktor penyebabnya adalah perbedaan sikap terhadap RRC dan perbedaan pendapat yang mendasar antara Nehru dan Soekarno dalam melihat masalah-masalah dunia. Hubungan itu akhirnya memburuk pada tahun 1962-1965. Masalah-masalah yang menyebabkannya adalah kasus Sondhi dalam Asian Games IV, sikap netral Indonesia dalam perang India-RRC, sikap India yang menyokong Malaysia dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia, pertentangan dalam KTT Nonblok II dan kegagalan KAA II. Tahun 1965 merupakan titik terendah dari hubungan kedua negara.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penulis tertarik pada hubungan Indonesia dan India karena kedua negara ini mempunyai latar belakang budaya dan sejarah yang hampir sama. Pada abad ke-5 Masehi, antara Indonesia dan India sudah terjadi hubungan terutama dalam bidang perdagangan. Akibat dari hubungan itu, pengaruh budaya India masuk ke dalam kebudayaan Indonesia. Hubungan itu kemudian terputus ketika India dijajah Inggris dan Indonesia dijajah Belanda. Hubungan Indonesia dan India kembali tersambung pada awal abad ke-20 ketika kedua bangsa ini berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Tokoh-tokoh pergerakan kedua bangsa saling mengadakan kontak seperti yang dilakukan Nehru dan Hatta. Setelah kemerdekaan dicapai, kedua negara berusaha meningkatkan hubungan persahabatan. Namun jika ditelusuri pelaksanaannya, hubungan Indonesia dan India tidak terlepas dari berbagai kendala. Hubungan baik, retak dan buruk pernah dialami oleh kedua negara ini.

Dalam skripsi ini penulis memilih judul "Hubungan Indonesia Dan India Tahun 1950-1965 Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia". Penulis tertarik pada masalah ini karena penulis ingin mengetahui

dan memahami berbagai aspek yang mewarnai hubungan Indonesia dan India pada tahun 1950-1965 ditinjau dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Untuk itu beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini perlu dikemukakan di sini.

Judul skripsi menunjukkan suatu hubungan antar dua negara pada kurun waktu tertentu yaitu hubungan Indonesia dan India pada tahun 1950-1965. Hubungan yang dijalin oleh kedua negara ini berupa hubungan diplomatik, perjanjian persahabatan, kerjasama perdagangan, kebudayaan, pendidikan, pengembangan Angkatan Udara, kerjasama dalam berbagai konperensi dan kegiatan-kegiatan internasional lainnya. Aspek politik akan mewarnai sebagian besar pembahasan mengenai hubungan tersebut.

Dalam membahas mengenai hubungan antar dua negara, kita tidak akan terlepas dari politik luar negeri kedua negara tersebut. Banyak pengarang yang telah membahas mengenai politik luar negeri. Karena itu politik luar negeri mempunyai definisi yang beraneka ragam sesuai dengan latar belakang pengarang yang membatasinya. Definisi-definisi itu antara lain ;

Budiono Kusumohamidjojo mendefinisikan :

Politik luar negeri adalah keseluruhan penjalanan keputusan suatu pemerintah untuk mengatur semua hubungannya dengan kalangan luar negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Budiono Kusumohamidjojo, Hubungan Internasional Kerangka Studi Analitis (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 10

Suffri Yusuf mendefinisikan :

Politik luar negeri adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada.<sup>2</sup>

M. Sabir mendefinisikan :

Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain.<sup>3</sup>

Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila dinyatakan :

Politik luar negeri adalah semua tindakan suatu negara yang mempengaruhi sikapnya terhadap negara-negara lain, kelompok maupun perhimpunan dan pakta negara-negara lain.<sup>4</sup>

Clymer Carlton Rodee mendefinisikan :

Politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara ketika memperjuangkan kepentingannya dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Dia berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk mengikuti pilihan jalan tertentu.<sup>5</sup>

Webster mendefinisikan :

---

<sup>2</sup>Suffri Yusuf, Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 110

<sup>3</sup>M. Sabir, Politik Bebas Aktif (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), hlm. 10

<sup>4</sup>A. Heuken SJ, dkk., Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1984), hlm. 156

<sup>5</sup>M. Sabir, loc. cit.

Politik luar negeri adalah arah dasar dari kegiatan hubungan antar negara yang berdaulat di dalam interaksinya dengan negara berdaulat lainnya yang dimanifestasikan dalam bentuk perang, damai dan sikap netral, aliansi serta berbagai bentuk pendekatan yang terkait.<sup>6</sup>

Dari berbagai definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa politik luar negeri adalah suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional untuk mencapai tujuan nasional. Jadi pada hakekatnya politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri. Karena itu sukarlah disangkal bahwa hubungan antar negara pada akhirnya merupakan forum interaksi dari berbagai kepentingan nasional.

Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri dipengaruhi bermacam-macam faktor yang sebagian bersifat konstan (obyektif) dan sebagian lagi bersifat variabel (subyektif). Yang termasuk faktor-faktor konstan adalah posisi geografis, kekayaan alam, potensi penduduk, kebudayaan dan sejarah nasional. Sedangkan yang termasuk faktor-faktor variabel adalah kondisi sosial, politik, ekonomi suatu negara dan kondisi dunia internasional pada waktu

---

<sup>6</sup>Frans S. Fernandes, Hubungan Internasional Dan Peranan Bangsa Indonesia Suatu pendekatan Sejarah (Jakarta: Depdikbud, 1988), hlm. 34-35

itu.<sup>7</sup>

Untuk mencapai tujuan politik luar negeri, diperlukan sejumlah instrumen. Pada dasarnya dikenal empat instrumen, yaitu diplomasi, tindakan ekonomi, propaganda, dan penggunaan kekuatan senjata. Penggunaan instrumen-instrumen tersebut hampir tidak pernah terjadi secara individual melainkan hampir selalu simultan.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan topik skripsi ini, maka perlu ditelusuri terlebih dahulu hubungan Indonesia dan India pada tahun 1945-1949.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia mutlak mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.<sup>9</sup> Dalam tahun-tahun pertama setelah proklamasi kemerdekaan (1945-1947), ada tiga tujuan utama politik luar negeri Indonesia. Ketiga tujuan itu adalah : (1) mencari pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia; (2) mempertahankan kemerdekaan dari usaha Belanda yang ingin kembali ke Indonesia dan memaksakan pemerintahan kolonialnya; (3) mencari penyelesaian sengketa dengan Belanda melalui negara ketiga sebagai mediator atau melalui forum

---

<sup>7</sup>Mochtar Kusumaatmadja, Politik Luar Negeri Indonesia Dan pelaksanaannya Dewasa Ini Editor Budiono Kusumohamidjojo dan Eddy Damian (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 153-154

<sup>8</sup>Budiono Kusumohamidjojo, op. cit., hlm. 57

<sup>9</sup>Konvensi Montevideo 1933 menetapkan bahwa suatu negara itu baru merupakan badan hukum di dalam hubungan internasional bila organisasinya memenuhi syarat umum yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan dan kebebasan serta kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain (Suffri Yusuf, op. cit., hlm. 114)

PBB.<sup>10</sup>

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh politik luar negeri, maka diplomasi Indonesia dipusatkan untuk mencari simpati dan dukungan internasional terhadap perjuangannya. Pada tanggal 12 April 1946, Indonesia menawarkan bantuan 500 ribu ton beras ke India untuk menanggulangi bahaya kelaparan di negara ini. Bantuan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai hasil dari serangkaian perundingan yang dimulai pada tanggal 18 Mei 1946 dan ditandatangani oleh PM Syahrir dan K.L. Punjabi, wakil pemerintah India. Dalam perjanjian yang lebih menyerupai barter itu disebutkan bahwa harga beras tersebut akan dibayar dengan barang-barang seperti tekstil, alat-alat pertanian dan obat-obatan. Penyerahan beras yang pertama dilakukan pada tanggal 20 Agustus 1946 di Probolinggo dan selanjutnya diangkut ke India dengan kapal laut yang disediakan oleh pemerintah India.<sup>11</sup>

Pada tanggal 1 April 1947, PM Syahrir mengadakan lawatan ke India untuk menghadiri Konperensi Hubungan-hubungan Asia yang bersifat non pemerintah. Pada kesempatan itu PM Syahrir membuka perwakilan Indonesia di New Delhi. Dukungan moril dan materiil Indonesia diperoleh dari India terutama dalam bidang diplomasi. India mengirim bahan pakaian, obat-obatan dan tiga orang dokter untuk

<sup>10</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965 (The Hague: Mouton & Co., 1973), hlm. 29

<sup>11</sup>Sekretariat Negara RI, Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949 (Jakarta: PT Tira Pustaka, 1981), hlm. 108

membantu revolusi kemerdekaan Indonesia. Selain itu seluruh radio India mengadakan program siaran khusus mengenai perjuangan Indonesia agar kasusnya dikenal dunia luar. Ketika Belanda melakukan agresi militer I (21 Juli 1947), India bersama Australia mengajukan persoalan Indonesia ke Dewan Keamanan (DK) PBB. Berkat usaha kedua negara ini, suatu resolusi gencatan senjata diterima. Sejak itu konflik Indonesia dan Belanda tidak lagi semata-mata konflik antar kedua negara, tetapi sudah merupakan suatu masalah internasional yang dibahas di forum PBB.<sup>12</sup>

Gencatan senjata yang telah disepakati ternyata dilanggar oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer II. Kota Yogyakarta yang menjadi ibu kota RI diduduki. Para pemimpin RI ditawan. Indonesia terpaksa mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi. Melihat situasi itu, pada tanggal 20 Januari 1949, atas usul Birma (baca: Myanmar), India mengadakan Konferensi Bangsa-Bangsa Asia mengenai Indonesia. Delapan belas negara Asia hadir dalam konferensi itu. Resolusi yang dihasilkan antara lain menuntut Belanda agar : (1) segera membebaskan para pemimpin RI yang ditawan; (2) menarik tentaranya dari Yogyakarta; (3) menyerahkan kedaulatan kepada RI pada tanggal 1 Januari 1950. Resolusi itu diajukan kepada DK PBB untuk mendesak Belanda melaksanakannya. Reaksi lain dari India

---

<sup>12</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm, 29-33

adalah memblokade kapal dan pesawat Belanda yang akan berlabuh dan mendarat di India.<sup>13</sup>

Hubungan yang telah dibina sejak awal kemerdekaan Indonesia menjadi landasan yang kuat bagi Indonesia dan India untuk meningkatkan hubungan persahabatan. Tahun 1950-1958 merupakan periode di mana hubungan Indonesia dan India berjalan sangat baik. Perjanjian persahabatan ditandatangani. Kerjasama dalam bidang perdagangan, kebudayaan, pendidikan dan Angkatan Udara dijalin. Terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 merupakan titik puncak kerjasama kedua negara. Dan mengenai masalah Irian Barat (baca: Irian Jaya), India menyokong sepenuhnya tuntutan Indonesia.<sup>14</sup>

Pada tahun 1959-1961, hubungan Indonesia dan India menjadi retak. Timbulnya perbedaan pandangan terhadap RRC merupakan salah satu faktor yang menyebabkan retaknya hubungan kedua negara. Akibat dari pemberontakan rakyat Tibet dan pelanggaran wilayah India oleh tentara RRC menyebabkan hubungan India dan RRC memburuk. Sebaliknya Indonesia semakin akrab dengan RRC. Apalagi pada masa itu (1959-1965) Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin dalam pemerintahannya. Politik luar negeri Indonesia

---

<sup>13</sup> Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, Indonesian Affairs Vol. 1, No. 3, Th. 1951, hlm. 7; P.R. S. Mani, Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah (Jakarta: Grafiti Pers, 1989), hlm. 163-169.

<sup>14</sup> lihat Ide Anak Agung Gde Agung, op. cit., hlm. 507-510; L.P. Singh, "Dynamics of Indian-Indonesian Relations", Asian Survey, Vol. 7, September 1967, hlm. 656

menjadi sejalan dengan politik luar negeri RRC. Keretakan itu semakin nyata terlihat ketika KTT Nonblok I berlangsung di Beograd pada bulan September 1961. Dalam KTT tersebut Soekarno dan Nehru tidak lagi mempunyai wawasan yang sama dalam melihat masalah-masalah dunia.<sup>15</sup>

Pada tahun 1962-1965, hubungan Indonesia dan India menjadi buruk. Kebijakan luar negeri Indonesia di mata India banyak merugikan kepentingan nasionalnya. Dan sebaliknya kebijakan luar negeri India pun dinilai banyak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Pertentangan dan perbenturan kepentingan itu akhirnya membawa hubungan kedua negara pada titik terendah pada tahun 1965.

Liku-liku hubungan Indonesia dan India pada tahun 1950-1965 ditinjau dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan mewarnai pembahasan skripsi ini. Periodisasi yang dipergunakan penulis adalah : Indonesia dan India membina hubungan baik (1950-1958), hubungan Indonesia dan India retak (1959-1961), dan hubungan Indonesia dan India memburuk (1962-1965). Karena skripsi ini merupakan tulisan sejarah nasional Indonesia, maka penulis akan lebih menyoroti peranan Indonesia tetapi tanpa mengurangi arti penting peranan India dalam hubungan tersebut.

---

<sup>15</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 512

B. Perumusan Masalah

Setelah melihat gambaran di atas, dapatlah penulis merumuskan masalah-masalah pokok yang menjadi obyek dari skripsi ini. Masalah-masalah itu adalah :

1. Apa yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia dan India pada tahun 1950-1965 dan bagaimana perkembangan perumusannya?
2. Bagaimana cara Indonesia dan India meningkatkan hubungan persahabatan?
3. Mengapa hubungan Indonesia dan India kemudian menjadi retak ?
4. Apa yang menyebabkan hubungan Indonesia dan India menjadi buruk ?

C. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, sistematika penulisan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

Bab II, menguraikan landasan dan perkembangan perumusan politik luar negeri Indonesia dan India pada tahun 1950-1965.

Bab III, menguraikan cara dan usaha Indonesia dan India meningkatkan hubungan persahabatan pada tahun 1950-1958.

Bab IV, menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan hubungan Indonesia dan India mengalami keretakan pada tahun 1959-1961.

Bab V, menguraikan mengenai peristiwa-peristiwa yang menyebabkan hubungan Indonesia dan India menjadi buruk pada tahun 1962-1965.

Bab VI, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari skripsi ini.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum :

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan hubungan Indonesia dan India pada tahun 1950-1965 ditinjau dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

2. Tujuan Khusus :

- a. Untuk mengetahui landasan dan perkembangan perumusan politik luar negeri Indonesia dan India pada tahun 1950-1965.
- b. Untuk mengetahui cara dan usaha Indonesia dan India meningkatkan hubungan persahabatan.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan

retaknya hubungan Indonesia dan India.

- d. Untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang menyebabkan memburuknya hubungan Indonesia dan India.

#### E. Manfaat Penelitian

1. Bagi IKIP Sanata Dharma :

Untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma penelitian untuk ilmu pengetahuan.

2. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan :

Penelitian ini akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan sejarah nasional Indonesia khususnya sejarah hubungan Indonesia dan India.

3. Bagi peneliti :

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang hubungan Indonesia dan India pada tahun 1950-1965 ditinjau dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di IKIP Sanata Dharma.

#### F. Metode Penelitian

Skripsi yang sudah tersaji ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan (Library Research). Dari peneliti-

an kepustakaan ini penulis dapat menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah diketemukan para ahli terdahulu; mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti; memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih; memanfaatkan data sekunder dan menghindari duplikasi penelitian.<sup>16</sup>

Data sejarah yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder pada umumnya tidak luput dari unsur subyektivitas pengarangnya. Sehubungan dengan kelemahan itu, maka data sekunder tersebut harus diseleksi dan diinterpretasi sebaik mungkin.<sup>17</sup> Hal itu perlu karena sejarah merupakan deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran.<sup>18</sup>

Dalam menyajikan data tersebut ke dalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analitik yaitu dengan menguraikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan kausalitas, faktor kondisional, determinan serta dimensi ruang dan waktu.<sup>19</sup>

Ditinjau dari jenis aktivitasnya, penulisan skripsi

---

<sup>16</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.), Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 45

<sup>17</sup> Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 233.

<sup>18</sup> M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 55.

<sup>19</sup> Sartono Kartodirdjo (ed.), Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 70.

ini merupakan hasil penelitian interpretasi kritis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan pemikiran mengenai suatu masalah dalam bentuk uraian kritis dan logis. Kritis dan logis dalam arti sesuai dengan fakta yang ada, jelas dan rasionil.<sup>20</sup>

Dengan metode/teknik tersebut di atas, penulis membahas hubungan Indonesia dan India pada tahun 1950-1965 ditinjau dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pada bab II berikut ini akan dibahas landasan dan perkembangan perumusan politik luar negeri Indonesia dan India pada tahun 1950-1965.

---

<sup>20</sup>Kartini Kartono, *op. cit.*, hlm. 29.

BAB II  
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN INDIA  
(1950-1965)

A. Politik Luar Negeri Indonesia

1. Landasan

a. Masa Demokrasi Parlementer

Pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959), yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia adalah :

(1) Pancasila<sup>21</sup>

Pancasila merupakan dasar negara, filsafat bangsa dan ideologi negara. Lima sila yang terkandung di dalamnya adalah : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Perikemanusiaan, (3) Persatuan, (4) Kerakyatan, (5) Keadilan sosial.

(2) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS)<sup>22</sup>

Alinea pertama Pembukaan UUDS menyatakan : "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Batang tubuh UUDS yang mengatur pelaksanaan politik

---

<sup>21</sup> Mohammad Hatta, Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia (Djakarta: Tintamas, 1953), hlm.28-29

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 30-31

luar negeri Indonesia adalah :

Pasal 120 :

- (1) Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian (traktat) dan persetujuan lain dengan negara-negara lain. Kecuali jika ditentukan lain dengan Undang-Undang, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sudah disetujui dengan Undang-Undang;
- (2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh Presiden hanya dengan kuasa Undang-Undang.

Pasal 121 :

Berdasarkan perjanjian dan persetujuan yang tersebut di dalam pasal 120, pemerintah memasukkan Republik Indonesia ke dalam organisasi-organisasi internasional.

Pasal 122 :

Pemerintah berusaha memecahkan perselisihan-perselisihan dengan negara-negara lain dengan jalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau perwasitan antar negara.

Pasal 123 :

Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada negara-negara lain dan menerima wakil-wakil negara-negara lain pada Republik Indonesia.

b. Masa Demokrasi Terpimpin

Pada tahun 1959-1965, dasar politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan akibat dari diberlakukannya kembali UUD 1945 dan diterapkannya Sistem Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Pada masa Demokrasi Terpimpin yang menjadi dasar politik luar negeri Indonesia adalah :

(1) Pancasila

Lima sila yang terkandung di dalamnya adalah : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) UUD 1945

Alinea pertama Pembukaannya menyatakan : "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan";

Pasal 11 : (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;

Pasal 13 : (1) Presiden mengangkat duta dan konsul, (2) Presiden menerima duta negara lain.

(3) Amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" dan dikenal se-

bagai "Manifesto Politik Republik Indonesia" (Manipol). Dengan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960, tanggal 29 Januari 1960, yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 19 Nopember 1960, Manipol tersebut dijadikan "Garis-Garis Besar Haluan Negara";

- (4) Amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul "Djalannya Revolusi Kita", dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 19 Nopember 1960 telah dijadikan "Pedoman Pelaksanaan Manipol";
- (5) Pidato Presiden pada tanggal 30 September 1960 di muka SU PBB yang berjudul "To Build the World anew" (Membangun Dunia Kembali), dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/ 1960 ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan manipol dan dengan Keputusan DPA No. 2/Kpts/Sd/61, tanggal 19 Januari 1961, dinyatakan sebagai "Garis-Garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia", dan sebagai "Pedoman Pelaksanaan Manipol dalam bidang politik luar negeri Indonesia".<sup>23</sup>

## 2. Perkembangan Perumusan

### a. Masa Revolusi Kemerdekaan

Sejak proklamasi kemerdekaan, bebas aktif merupakan asas politik luar negeri Indonesia. Namun dalam tahun-

---

<sup>23</sup>Marwati Djoened Poesponegoro dan Nuggroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 340-341

tahun pertama revolusi kemerdekaan, asas tersebut belum dirumuskan secara jelas. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada waktu itu terutama mengambil bentuk perundingan-perundingan diplomatik dengan Belanda melalui pihak ketiga maupun dalam forum PBB. Tujuan pokoknya adalah untuk mendapat pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Politik itu adalah bagian atau sisi lain dari perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Inilah yang pada waktu itu disebut sebagai *lini pertama*, di samping perjuangan bersenjata sebagai *lini kedua*.<sup>24</sup>

Pada tanggal 2 September 1948, politik luar negeri bebas aktif baru secara resmi dinyatakan oleh pemerintah di depan BP KNIP di Yogyakarta. Pernyataan itu dikeluarkan sebagai jawaban atas ajakan kaum komunis yang tergabung dalam FDR (Front Demokrasi Rakyat) agar Indonesia memihak Uni Soviet dalam *perang dingin* yang sedang berkecamuk pada waktu itu. Asas politik luar negeri yang harus ditempuh Indonesia dalam situasi internasional seperti itu adalah tidak memihak salah satu blok dan percaya pada diri sendiri. Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri menyatakan :

"...Mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar

---

<sup>24</sup>T.B. Simatupang, Laporan Dari Banaran: Kisah Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm. 114

cita-cita kita?...Pendirian yang harus kita ambil adalah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertaruhan politik internasional, melainkan kita harus menjadi subyek yang berhak menentukan nasib kita sendiri, berhak menentukan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya..."<sup>25</sup>

b. Masa Demokrasi Parlementer

Kabinet Natsir yang menjabat setelah terbentuknya kembali negara kesatuan, juga meninjau politik luar negeri dari arah pertentangan antara blok Amerika dan blok Rusia (Uni Soviet). Dalam keterangan tentang program pemerintahannya kepada parlemen, tanggal 21 September 1950, dinyatakan :

"Dalam keadaan yang berbahaya itu, Indonesia telah memutuskan akan melakukan politik luar negeri yang bebas. Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas itu, kepentingan rakyatlah yang menjadi pedomannya, dan disamping itu pemerintah akan berusaha atau membantu tiap-tiap usaha untuk mengembalikan perdamaian dunia".<sup>26</sup>

Kabinet Soekiman yang menggantikan kabinet Natsir, dalam menguraikan politik bebas aktif di depan parlemen (28 Mei 1951), menyatakan :

"...Politik bebas bukanlah politik yang didasarkan atas prinsip netralitas...dengan politik bebas ini pemerintah akan aktif dalam usahanya melaksanakan perdamaian dunia dengan mengambil dasar ideologis dan materiil; ideologis bersandar pada Pancasila dan materiil pada kekayaan alam Indonesia serta kebutuhan rakyat Indonesia".<sup>27</sup>

Sewaktu mempertahankan program pemerintahannya di depan parlemen pada tanggal 22 Mei 1952, kabinet Wilopo

<sup>25</sup> Mohammad Hatta, Mendayung Antara Dua Karang (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 17-18

<sup>26</sup> Mohammad Hatta, Dasar Politik ..., hlm. 17

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 18-19

mengartikan politik bebas aktif mengandung makna tidak memilih salah satu blok dan tidak memihak serta ikut campur tangan dalam pertentangan kedua blok tersebut. Untuk menghindari interpretasi yang salah dan keraguan aliran-aliran politik di dalam negeri ataupun blok-blok yang bertentangan, pemerintah menambahkan keterangan bahwa *sikap bebas* itu *bersifat aktif* yang didasarkan pada keiklasan sebagai anggota PBB dan cita-citanya, serta kepentingan bangsa dan negara.<sup>28</sup>

Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 Agustus 1953-12 Agustus 1955), politik bebas aktif semakin menampakkan cirinya. Kabinet Ali I menjalankan politik luar negeri yang lebih aktif dari kabinet-kabinet sebelumnya. Salah satu hasilnya adalah dengan terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika pada bulan April 1955 di Bandung. Konferensi itu menghasilkan Dasa Sila Bandung yang memperkuat konsepsi politik luar negeri bebas aktif dengan prinsip-prinsip ko-eksistensi damai antara bermacam-macam ideologi, persahabatan dan politik bertetangga yang baik, serta sikap anti kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.<sup>29</sup>

Kemudian pada masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956), asas politik

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21; Frans S. Fernandes, *op. cit.*, hlm. 98-99.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 99; Herbert Feith, *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia* (Ithaca, New York : Cornell University Press, 1968), hlm. 384-385

bebas aktif tetap menjadi ciri politik luar negeri Indonesia. Dan hal itu tetap dipertahankan pada kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956-Maret 1957). Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif menuju perdamaian dunia atas dasar kepentingan nasional.<sup>30</sup>

### C. Masa Demokrasi Terpimpin

Dari kabinet Karya sampai pada saat-saat terakhir pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak pernah secara resmi dan eksplisit meninggalkan politik bebas aktif. Secara nominal asas bebas aktif masih melandasi politik luar negeri Indonesia. Tetapi secara substansial dan hakiki politik bebas aktif telah ditinggalkan. Demikian pula secara resmi Indonesia masih menjadi anggota gerakan nonblok meskipun politik luar negeri yang dilaksanakan tidak sesuai lagi dengan jiwa gerakan nonblok.<sup>31</sup>

Pada masa itu Presiden Soekarno merupakan arsitek utama politik luar negeri Indonesia. "Manipol", "Djarek" dan "Membangun Dunia Kembali" merupakan embrio kelahiran doktrin politik baru, yaitu dunia terbagi dalam "New Emerging Forces" (NEFOS) dan "Old Established Forces" (OLDEFOS). Ke dalam NEFOS dikelompokkan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih memperjuangkan kemerde-

<sup>30</sup>Ibid., hlm. 450-451; lihat juga Roeslan Abdulgani, Mendayung Dalam Taufan (Jakarta: Penerbit Endang, 1956), hlm. 9-15

<sup>31</sup>J. Soedjati Djwandono, "Empat Puluh Tahun Politik Luar Negeri Indonesia: Perubahan Dan Kesenambungan", Analisa, No. 8, Agustus 1985, hlm. 650-651

kaannya serta negara-negara dari blok sosialis. Sedangkan ke dalam OLDEFOS dimasukkan negara-negara yang dianggap reaksioner, kolonialis, imperialis, dan yang menentang kemajuan bangsa-bangsa yang sedang berkembang dan progresif.<sup>32</sup>

Politik luar negeri yang dilaksanakan diwarnai militansi menentang kolonialisme dan imperialisme. Oleh karena itu politik konfrontasi perlu dilaksanakan oleh negara-negara yang baru merdeka (NEFOS) terhadap negara-negara yang telah mapan (OLDEFOS). Konfrontasi bertujuan untuk membebaskan dunia dari eksploitasi bangsa terhadap bangsa lain.<sup>33</sup> Pelaksanaan politik luar negeri seperti itu oleh Soekarno dimaksudkan untuk mengubah peranan internasional Indonesia yang terbatas dan untuk mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin negara-negara pasca kolonial lainnya.<sup>34</sup>

Pelaksanaan politik luar negeri berdasarkan Manipol cepat sekali melibatkan Indonesia ke dalam suatu konfrontasi dengan hampir semua negara Barat dan negara lainnya yang tidak termasuk ke dalam NEFOS. Akibatnya Indonesia semakin anti Barat dan merangkul negara-negara sosialis dan komunis, terutama RRC. Hubungan dengan RRC semakin erat dengan dibinanya suatu kerja sama yang disebut *Poros*

---

<sup>32</sup>M. Sabir, Politik ..., hlm. 192

<sup>33</sup>Frans S. Fernandes, op. cit., hlm. 150

<sup>34</sup>Michael Leifer, Politik Luar Negeri Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 82

*Jakarta-Peking*. Politik luar negeri Indonesia semakin agresif dan konfrontatif. Ketika masalah Irian Barat selesai, Indonesia mencari sasaran baru yaitu Malaysia yang dianggap sebagai proyek nekolim untuk mengepung Indonesia. Titik puncak dari pelaksanaan politik ini telah mendorong Indonesia ke luar dari PBB dan berusaha mendirikan organisasi tandingan melalui Conference of the New Emerging Forces (CONEFO). Akibatnya Indonesia terku-cil dari pergaulan Internasional dan masuk ke dalam lingkungan strategi politik RRC.<sup>35</sup> Puncak dari semuanya itu adalah terjadinya G 30 S/PKI pada tanggal 30 September 1965. Namun G 30 S/PKI mengalami kegagalan. Demokrasi Terpimpin runtuh dan Orde Baru tampil. Politik luar negeri yang bebas aktif dikembalikan ke rel yang sebenarnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

## B. Politik Luar Negeri India

### 1. Landasan

#### a. Undang-Undang Dasar India

Pasal 51 UUD India menyatakan bahwa negara berusaha keras untuk :(1) memajukan perdamaian dan keamanan internasional; (2) mempertahankan hubungan yang adil dan jujur

---

<sup>35</sup>M. Sabir, Politik ..., hlm. 193-195

antara negara-negara; (3) menghormati hukum internasional dan bertanggung jawab atas persetujuan dalam perundingan antara negara-negara; (4) menganjurkan supaya pertikaian-pertikaian internasional diselesaikan lewat arbitrase.<sup>36</sup>

b. Panchsheel

Lima prinsip yang terkandung di dalam Panchsheel adalah : (1) saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, (2) non-agresi, (3) tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing, (4) persamaan derajat dan saling menguntungkan, (5) hidup berdampingan secara damai.<sup>37</sup>

2. Perkembangan Perumusan

a. Periode Awal Kemerdekaan

Ketika India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947, dunia telah terbagi menjadi dua blok yang bertentangan yaitu blok Barat dan blok Timur. Pertentangan ini kemudian terkenal dengan nama *perang dingin*. Pengaruh langsung dari perang dingin itu dirasakan oleh India. India dihadapkan pada suatu alternatif yang sama sekali tidak disukainya. Untuk itu pada tanggal 4 Desember 1947, PM Nehru memberitahu Dewan Konstituante untuk mencari

<sup>36</sup>Anil Chandra Banerjee, The Constitution Of The Indian Republic (Calcutta: A. Mukherjee & Co. Ltd., 1950), hlm. 21.

<sup>37</sup>Norman D. Palmer, Indian Political System (Massachusetts: The Riverside Press, 1961), hlm. 244



jalan menangkis keterlibatan India tanpa harus bergabung dengan salah satu blok. Dengan demikian India akan bebas menentukan politik luar negerinya sesuai dengan kepentingan nasionalnya.<sup>38</sup>

Dalam sidang Kongres di Jaipur pada tahun 1948, dikeluarkan sebuah resolusi yang menetapkan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri India. Resolusi itu antara lain menyatakan :

"Politik luar negeri India perlu didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Kongres bertahun-tahun yang lalu. Prinsip-prinsip itu adalah memajukan perdamaian dunia, memerdekakan semua bangsa, persamaan rasial, dan diakhirinya imperialisme dan kolonialisme... Itu merupakan tujuan tetap politik luar negeri India untuk memelihara persahabatan dan hubungan kerja sama dengan semua bangsa dan menghindari keterlibatan dalam militer atau semacam persekutuan yang cenderung membagi dunia dalam kelompok-kelompok<sup>39</sup> yang bersaing dan hingga mengancam perdamaian dunia".

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar di atas, maka politik luar negeri India mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Dalam pidatonya di Universitas Columbia, pada tanggal 17 Oktober 1949, Nehru menyatakan bahwa tujuan utama politik luar negeri India adalah mencari perdamaian tidak lewat memihak salah satu kekuatan besar atau kelompok-kelompok kekuatan, tetapi lewat suatu pendekatan yang bebas terhadap setiap persengketaan dan perselisihan, memerdekakan semua bangsa, mempertahankan kemerdekaan

---

<sup>38</sup>J. C. Kundra, Indian Foreign Policy 1947-1954. A Study of Relations with the Western Block (Groningen: J.B. Walters, 1955), hlm. 1-3

<sup>39</sup>Ibid., hlm. 53-54

kaan individu dan nasional, menghapuskan diskriminasi rasial, menghapuskan kemiskinan, penyakit dan kebodohan yang menimpa sebagian besar penduduk dunia.<sup>40</sup>

Dalam perkembangan lebih lanjut, Nehru secara khusus memberi tekanan pada "nonblok terhadap kelompok-kelompok negara-negara besar", menentang kolonialisme, perlunya hidup berdampingan secara damai dan diciptakannya suasana perdamaian. Menurut Nehru, perdamaian hanya dapat diciptakan dan dipertahankan oleh cara-cara damai. Perang adalah suatu kontradiksi dari syarat-syarat perdamaian. Perdamaian tidak akan hidup dalam suasana perang dan penuh ancaman perang.<sup>41</sup>

b. Periode Panchsheel

Panchsheel atau Panch Shila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti lima dasar atau lima prinsip. Panchsheel ini pertama kali diungkapkan dalam bentuk khusus pada perjanjian India-RRC mengenai Tibet pada bulan April 1954. Hal itu diulangi lagi dalam kunjungan PM Chou En Lai ke India, pada bulan Juni 1954.<sup>42</sup> Tujuan utama India dengan Panchsheel adalah untuk menjamin garis perbatasannya dengan RRC. Di samping itu India juga

---

<sup>40</sup>Norman D. Palmer, *op. cit.*, hlm. 243; lihat juga Michael Edwardes, *Nehru: A Political Biography* (Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1973), hlm. 256

<sup>41</sup>Norman D. Palmer, *op. cit.*, hlm. 242

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 243

berharap agar Panchsheel diterima oleh semua negara di dunia ini sebagai landasan dalam menjalankan politik luar negerinya.

Walaupun PM Nehru sendiri mengakui bahwa tidak ada yang luar biasa mengenai Panchsheel, namun tak seorangpun dapat membantah bahwa ia punya arti nyata bagi mereka. Menurut PM Nehru, Panchsheel berakar sangat dalam pada pengalaman dan tradisi bangsa India. Panchsheel merupakan sikap nyata keinginan India untuk mempertahankan suatu posisi yang bebas dalam kemelut dunia dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk perdamaian dunia.<sup>43</sup>

Panchsheel kemudian dibawa oleh PM Nehru ke KAA di Bandung pada tahun 1955. Namun Panchsheel diragukan kemampuannya untuk menciptakan perdamaian oleh negara-negara yang pro blok-blok militer seperti Pakistan, Turki, Muangthai, dan Philipina. Akibatnya Panchsheel yang kemudian dikenal dengan lima prinsip hidup berdampingan secara damai tidak bisa dijadikan satu-satunya pedoman bagi resolusi-resolusi KAA untuk perdamaian dunia.<sup>44</sup>

Kemudian pada tahun 1959, RRC mengingkari Panchsheel dengan menduduki Tibet. Pengingkaran terhadap Panchsheel semakin nyata pada tahun 1962, ketika terjadi perang

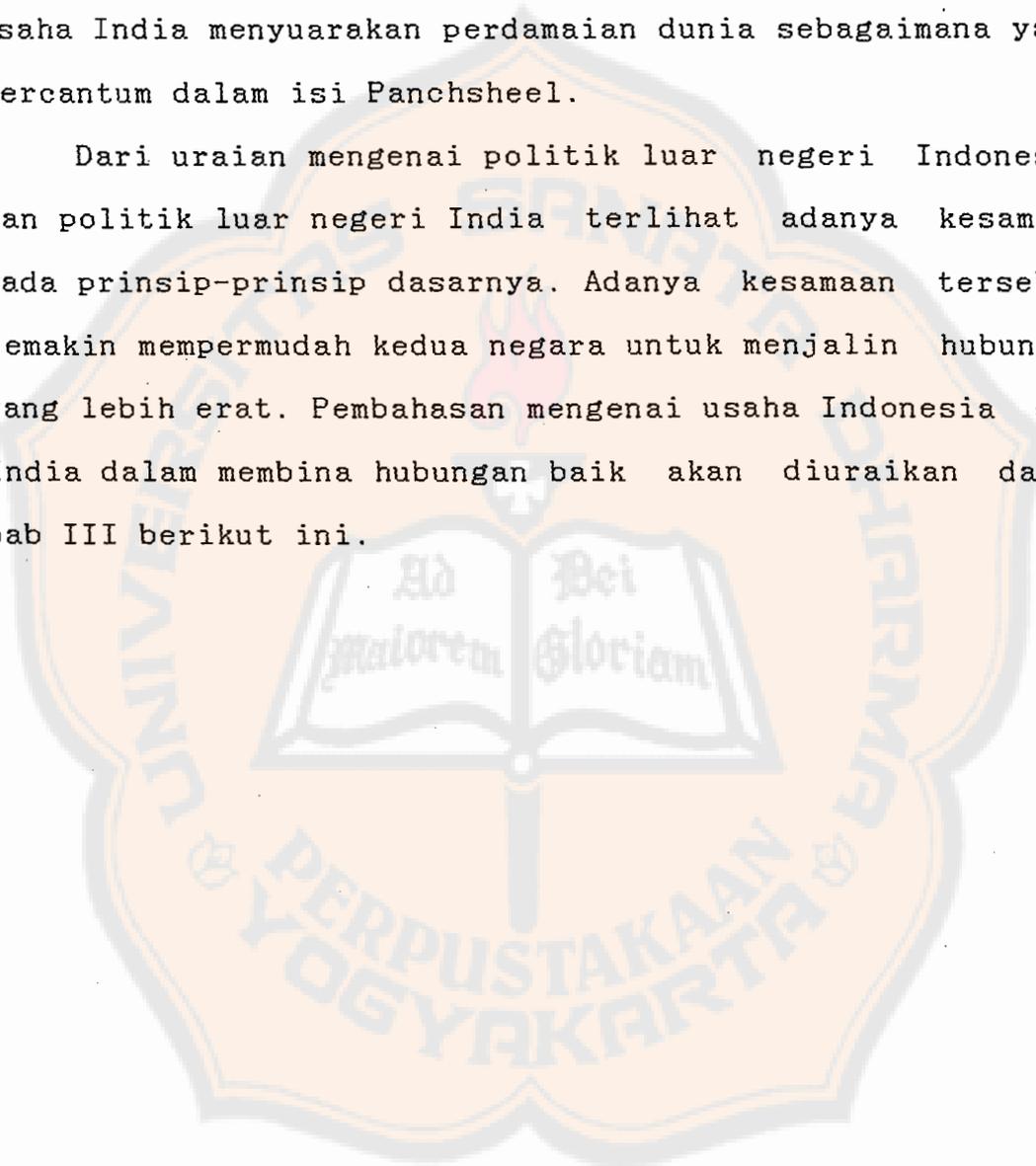
---

<sup>43</sup>Ibid., hlm. 244

<sup>44</sup>Roeslan Abdulgani, The Bandung Connection (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hlm. 122-124

perbatasan India-RRC. Dengan demikian berakhirilah periode Panchsheel bagi India dan RRC. Kegagalan India membawa RRC menghormati Panchsheel tidak membuat berhentinya usaha India menyuarkan perdamaian dunia sebagaimana yang tercantum dalam isi Panchsheel.

Dari uraian mengenai politik luar negeri Indonesia dan politik luar negeri India terlihat adanya kesamaan pada prinsip-prinsip dasarnya. Adanya kesamaan tersebut semakin mempermudah kedua negara untuk menjalin hubungan yang lebih erat. Pembahasan mengenai usaha Indonesia dan India dalam membina hubungan baik akan diuraikan dalam bab III berikut ini.



BAB III  
INDONESIA DAN INDIA MEMBINA HUBUNGAN BAIK  
(1950-1958)

Hubungan yang telah dijalin sejak awal kemerdekaan Indonesia menjadi landasan yang kuat bagi Indonesia dan India dalam meningkatkan hubungan persahabatan. Apalagi kemudian prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kedua negara mempunyai banyak kesamaan. Untuk menjelaskan usaha-usaha Indonesia dan India dalam membina hubungan baik, maka berikut ini akan diuraikan :

- A. Perjanjian Persahabatan Tahun 1951
- B. Kerja Sama Bilateral
- C. Konperensi Asia-Afrika
- D. Sikap India Dalam Masalah Irian Barat.

A. Perjanjian Persahabatan Tahun 1951

Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia (RIS) segera mendapat pengakuan dari dunia internasional. Indonesia dan India pun berusaha untuk mempererat hubungan persahabatan yang telah mereka rintis sejak dari awal kemerdekaan Indonesia. Usaha itu diawali dengan berkunjungnya Presiden Soekarno ke India pada tanggal 23-30 Januari

1950. Pada kesempatan itu Presiden Soekarno menyampaikan terima kasih bangsa Indonesia kepada bangsa India dan PM Nehru atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada Indonesia selama perjuangan kemerdekaan. Dalam pidatonya di depan Parlemen India, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia dan India sebaiknya meningkatkan hubungan baik yang telah ada antar kedua negara selama lebih dari seribu tahun sebelum diganggu oleh kekuasaan kolonial.<sup>45</sup>

Perdana Menteri Nehru membalas kunjungan tersebut dengan mengunjungi Indonesia pada tanggal 7-17 Juni 1950. PM Nehru ini merupakan kepala pemerintahan negara asing pertama yang mengunjungi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dalam kunjungan tersebut PM Nehru menyatakan dukungan India kepada Indonesia mengenai masalah Irian Barat mengingat persoalan tersebut merupakan suatu klaim nasional Indonesia yang sah.<sup>46</sup>

Sebagai tindak lanjut dari usaha membina hubungan baik, pada tanggal 3 Maret 1951, di Jakarta ditandatangani naskah *Perjanjian Persahabatan* kedua negara. Masing-masing negara diwakili oleh Mr. Moh. Roem (Menteri Luar Negeri Indonesia) dan Paramasiva Subbarayan (Dubes India untuk Indonesia) sebagai penandatanganan naskah

---

<sup>45</sup> L.P. Singh, *op. cit.*, hlm. 655-656; Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 193-194

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 194

perjanjian.<sup>47</sup>

Perjanjian persahabatan tersebut pokok-pokoknya menyatakan bahwa : (1) Antara Indonesia dan India akan terdapat perdamaian yang abadi dan persahabatan yang kekal; (2) Kedua negara akan mengangkat wakil-wakil diplomatik, konsul jenderal, konsul-konsul muda dan wakil-wakil konsul yang bertugas sesuai dengan hak dan kewajiban mereka; (3) Pada waktu-waktu tertentu atau tiap kali keadaan menghendaknya akan ada pertemuan wakil-wakil kedua negara untuk mendiskusikan tentang masalah kepentingan bersama; (4) Warga negara kedua negara yang berada di salah satu negara yang berjanji, akan mendapat hak tempat tinggal, datang dan pergi serta bebas bergerak jika warga negara tersebut tunduk kepada Undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara tersebut; (5) Kedua negara berjanji akan secepat mungkin untuk mengadakan perundingan-perundingan untuk membuat perjanjian yang tegas dan luas dalam bidang perdagangan dan bidang-bidang lainnya; (6) Perselisihan yang timbul dalam mengkritik atau melaksanakan perjanjian ini, akan diselesaikan mula-mula lewat perundingan, dan jika dalam masa enam bulan setelah perundingan tidak bisa terselesaikan maka akan diselesaikan lewat arbitrase. Perjanjian persahabatan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan jika ter-

---

<sup>47</sup> Kementrian Penerangan RI, Menyongsong Tamu Negara DR. Rajendra Prasad, Presiden Republik India (Jakarta: Kementrian Penerangan, 1958), hlm. 25

jadi perselisihan mengenai perjanjian itu, teks yang berbahasa Inggris dan telah dibubuhi meterai kedua negara adalah teks yang sah.<sup>48</sup>

#### B. Kerjasama Bilateral

Sebagai realisasi dari perjanjian persahabatan tahun 1951, Indonesia dan India kemudian menjalin kerjasama di bidang perdagangan, kebudayaan, pendidikan dan pengembangan Angkatan Udara.

##### 1. Kerjasama Perdagangan

Kerjasama perdagangan kedua negara secara resmi dibuka ketika ditandatanganinya *Perjanjian Perdagangan* di New Delhi pada tanggal 30 Januari 1953. Pokok-pokok perjanjian ini adalah mengenai usaha-usaha kedua negara dalam rangka meningkatkan hubungan perdagangan terutama dalam bidang ekspor-impor beserta dengan prosedur pelaksanaannya.<sup>49</sup>

Adapun barang-barang ekspor India ke Indonesia meliputi goni, barang-barang katun dan wol, batu bara, semen, sabun, bahan-bahan kimia dan produk farmasi, alat-alat olah raga, mesin-mesin industri, dan bermacam-macam

---

<sup>48</sup>Ministry of Information Republic of Indonesia, Friendly Relations Indonesia-India Special Issue, Djakarta, 1 December 1958, hlm. 14-16

<sup>49</sup>Ibid., hlm. 22-23

barang kerajinan. Sedangkan ekspor Indonesia ke India berupa kopra, minyak kelapa sawit, rempah-rempah, minyak kelapa, kayu, timah, karet, kulit yang disamak, garam, rotan, damar, serat sisal dan buah-buahan. <sup>50</sup>

Namun jika kita melihat nilai ekspor dan impor Indonesia ke/dari India (sebelum dan sesudah perjanjian), selalu menunjukkan nilai minus (defisit) pada sisa nilai ekspor. Hal itu dapat kita lihat dari tabel berikut:

Tabel 1  
NILAI EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA KE/DARI INDIA  
TAHUN 1950-1961 <sup>51</sup>

| Thn. | Eskpor |       | Impor |       | Sisa nilai ekspor |        |
|------|--------|-------|-------|-------|-------------------|--------|
|      | Rp.*   | US\$* | Rp.*  | US\$* | Rp.*              | US\$*  |
| 1950 | 9,2    | 2,41  | 85,9  | 22,54 | -76,7             | -20,13 |
| 1951 | 15,0   | 3,94  | 104,7 | 27,48 | -89,7             | -23,54 |
| 1952 | 17,7   | 1,55  | 220,0 | 19,22 | -102,3            | -17,67 |
| 1953 | 64,6   | 5,64  | 217,1 | 18,97 | -152,5            | -13,33 |
| 1954 | 9,9    | 0,86  | 161,1 | 14,04 | -151,2            | -13,18 |
| 1955 | 32,0   | 2,79  | 326,5 | 28,45 | -294,5            | -25,66 |
| 1956 | 32,0   | 2,79  | 184,8 | 16,10 | -152,8            | -13,31 |
| 1957 | 79,5   | 6,93  | 190,2 | 16,57 | -110,7            | -9,64  |
| 1958 | 80,3   | 6,99  | 86,2  | 7,51  | -5,9              | -0,52  |
| 1959 | 41,1   | 3,58  | 126,5 | 11,02 | -85,4             | -7,44  |
| 1960 | 255,8  | 5,65  | 350,1 | 7,73  | -94,3             | -2,08  |
| 1961 | 147,9  | 3,26  | 619,9 | 13,69 | -472,0            | -10,43 |

Keterangan :

Rp.\* : dalam jutaan rupiah

US\$\* : dalam jutaan dollar Amerika Serikat

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 8, 24-26

<sup>51</sup> Biro Pusat Statistik, Statistical Pocketbook Of Indonesia 1963 (Djakarta: BPS, 1963), hlm. 125-127

Data di atas menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia ke India setiap tahunnya selalu mengalami defisit. Hal itu terutama terjadi pada tahun 1950-1956, di mana defisit Indonesia selalu di atas 13 juta US Dollar. Baru pada tahun 1958-1960 neraca perdagangan Indonesia dan India mendekati suatu keseimbangan. Tetapi itu tidak bertahan lama, karena defisit Indonesia menjadi besar kembali pada tahun 1961.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia ke India selalu mengalami defisit. Faktor-faktor itu antara lain adalah : instabilitas politik dalam negeri di mana sering terjadi pergantian kabinet, pergolakan di daerah-daerah, penyelundupan dan korupsi yang merajalela di mana-mana. Faktor-faktor itu tentunya menghambat pembangunan ekonomi dan industri yang menunjang bidang ekspor. Faktor lainnya adalah karena barang-barang ekspor Indonesia ke India berupa bahan mentah yang harganya lebih murah dibandingkan dengan harga barang-barang industri. Sedangkan ekspor India ke Indonesia sebagian besar adalah barang-barang industri.

## 2. Kerja Sama Kebudayaan Dan Pendidikan

Berdasar pada Perjanjian Persahabatan tahun 1951 dan Komunique Bersama KAA Bandung 1955, maka Indonesia dan India menjalin kerja sama dalam bidang kebudayaan dan pendidikan. Kerja sama ini diawali dengan ditandatangani-

nya suatu *Perjanjian Kebudayaan* di New Delhi pada tanggal 29 Desember 1955 oleh L.N. Palar (Dubes Indonesia untuk India) dan A.K. Azad (Menteri Pendidikan India). Perjanjian kebudayaan itu baru disetujui oleh DPR RI pada tanggal 16 November 1957. Pertukaran ratifikasi piagam dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 1958 di New Delhi. Dan perjanjian ini secara resmi berlaku lima belas hari setelah penukaran piagam ratifikasi dengan masa berlaku 10 tahun.<sup>52</sup>

Perjanjian kebudayaan itu terdiri dari 12 pasal yang memuat hasrat kedua negara untuk membina kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan dan kesenian. Perjanjian itu juga memuat keinginan kedua negara untuk mempererat hubungan kebudayaan, mengadakan pertukaran mahaguru, serta memuat keinginan mengadakan rencana beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa kedua negara yang belajar di salah satu negara yang berjanji.<sup>53</sup>

Pertukaran mahasiswa dan mahaguru antar kedua negara segera terlaksana. Pada tahun 1958, ada 40 mahasiswa Indonesia yang belajar di India. Mereka itu antara lain Putu Sujati yang belajar filsafat di Universitas Benaras Hindu, Albert Simandjuntak yang belajar ilmu mesin di Centre Technical Institute, dan Mohammad Ali Bey

---

<sup>52</sup>Ministry of Information Republic of Indonesia, *op. cit.*, hlm. 17, 21  
<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 17-21; Kementrian Penerangan R.I., *op. cit.*, hlm. 29

yang masuk program doktoral dalam ilmu politik di universitas Aligarh. Sedangkan dari India, ada Pandit Narendra Deva yang menjadi mahaguru bahasa Sanskerta di Universitas Indonesia, dan Mr. Vishal Singh dari Indian Institute of International Affairs yang berada di Indonesia dalam rangka menyelesaikan tesisnya yang berjudul *Partai Politik Di Indonesia*. Selain pertukaran mahasiswa dan mahaguru, juga diadakan pertukaran misi kebudayaan, kesenian dan olah raga.<sup>54</sup>

### 3. Kerja Sama Angkatan Udara Indonesia Dan Angkatan Udara India

Angkatan Udara (AU) Indonesia dan AU India yang sama-sama masih dalam taraf penyempurnaan dan masih memerlukan bantuan, merasa betapa perlunya kedua belah pihak untuk bekerjasama. Kedatangan sebuah misi persahabatan AU India ke Indonesia dan diadakannya penerbangan-penerbangan kurir pada akhir tahun 1954, merupakan awal dirintisnya kerja sama AU kedua negara.<sup>55</sup>

Pada bulan Februari 1956, barulah secara resmi ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dan India mengenai kerjasama AU Republik Indonesia dengan AU India dalam bidang pembangunan dan pendidikan. Penanda-

---

<sup>54</sup>Ministry of Information Republic of Indonesia, op. cit., hlm. 10-13

<sup>55</sup>Kementrian Penerangan RI, op. cit., hlm. 30

tanganan perjanjian dilaksanakan di Jakarta oleh Abdul Hakim (Menteri Negara Pertahanan RI) dan Tyabji (Dubes India untuk Indonesia).<sup>56</sup>

Perjanjian itu bukan dimaksud untuk kerja sama dalam arti suatu gerakan-gerakan persekutuan militer, tetapi kerjasama untuk kepentingan pembangunan dan penyempurnaan Angkatan Udara kedua negara. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.<sup>57</sup>

### C. Konperensi Asia-Afrika

Selain menjalin kerja sama bilateral, Indonesia dan India juga berusaha menjalin kerja sama multilateral dengan negara-negara lain. Konperensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung merupakan salah satu bentuk kerja sama multilateral yang mereka jalin (bersama Pakistan, Birma dan Srilanka). Diawali dengan munculnya suatu gagasan pada Konperensi Kolombo, kemudian adanya penjajakan dan persiapan hingga Konperensi Bogor, barulah KAA bisa dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.

#### 1. Konperensi Kolombo

Konperensi Kolombo merupakan awal dari dicetus-

---

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid.

kannya suatu gagasan untuk mengadakan konperensi bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Konperensi Kolombo ini diprakarsai oleh PM Sir John Kotelawala dengan mengundang kolega-kolega dari negara-negara tetangga terdekatnya yaitu India, Pakistan, Burma dan Indonesia.<sup>58</sup> Dengan dihadiri oleh lima perdana menteri yaitu Sir John Kotelawala, Nehru, Mohammad Ali, U Nu, dan Ali Sastroamidjojo, konperensi ini diselenggarakan pada tanggal 28 April - 2 Mei 1954. Pokok-pokok yang dibicarakan adalah situasi di Indocina, masalah meningkatnya agresif komunis di Asia, perkembangan senjata nuklir dan kerja sama kelima negara terutama dalam bidang ekonomi.<sup>59</sup>

Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo berangkat ke Kolombo membawa misi politik luar negeri Indonesia yaitu untuk menggalang kerja sama bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Maka dalam sidang ke-6, tanggal 30 April 1954, diusulkannya supaya diadakan : "Suatu konperensi yang sama hakikatnya dengan Konperensi Kolombo sekarang ini, tetapi lebih luas jangkauannya dengan tidak hanya memasukkan negara-negara Asia, tetapi juga negara-negara Afrika

---

<sup>58</sup> Pada mulanya Indonesia tidak termasuk negara yang akan diundang ke Kolombo. Tetapi dengan melihat bahwa Indonesia termasuk pada daerah kebudayaan yang sama dan berhasil mematahkan belenggu kolonial pada saat yang hampir bersamaan dengan Srilanka, maka kemudian PM Sir John Kotelawala memutuskan untuk mengundang Indonesia (Roeslan Abdulgani, Sejarah, Cita-Cita Dan Pengaruhnya, Konperensi Asia-Afrika Bandung (Jakarta: Yayasan Idayu, 1975), hlm.8)

<sup>59</sup> Kementrian Penerangan RI, Berita Konperensi Asia-Afrika, No. 1, Th. 1955, hlm. 2-3

lainnya".<sup>60</sup>

Ternyata gagasan tersebut tidak mudah diterima oleh keempat perdana menteri lainnya. Nehru bahkan menyatakan terlalu banyak kesulitan untuk melaksanakan konperensi semacam itu. Kemudian PM Ali Sastroamidjojo melancarkan diplomasi yang menyatakan : "saya akan puas apabila Konperensi Kolombo dapat menyetujui bahwa Indonesia akan mensponsori sendiri Konperensi Asia-Afrika itu".<sup>61</sup>

Akhirnya dalam Komunike Konperensi Kolombo dinyatakan bahwa : "Para Perdana Menteri telah membicarakan perlu/tidaknya mengadakan suatu Konperensi Asia-Afrika, dan menerima baik sebuah usul bahwa Perdana Menteri Indonesia akan menyelidiki kemungkinannya". Keputusan itu dicantumkan pada bagian akhir komunike dan seakan-akan hanya embel-embel belaka. Tapi bagi Indonesia itu merupakan suatu kesungguhan. Departemen Luar Negeri segera memulai aktivitasnya untuk menjajaki dan mempersiapkan Konperensi Asia-Afrika tersebut.<sup>62</sup>

## 2. Konperensi Bogor

Melalui saluran diplomatik, Indonesia mendekati 18 negara-negara di Asia dan Afrika untuk mengetahui

---

<sup>60</sup>Roeslan Abdulgani, The Bandung..., hlm.13

<sup>61</sup>Ibid., hlm. 14

<sup>62</sup>Ibid., hlm. 14-15

tanggapan mereka mengenai gagasan diadakannya Konperensi Asia-Afrika. Dari jawaban mereka didapat ketegasan bahwa negara-negara Asia dan Afrika menyambut baik gagasan tersebut dan mendukung Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaranya. Selain itu, juga dilakukan kunjungan ke negara-negara peserta Konperensi Kolombo untuk memperoleh kepastian sikap mereka. PM Nehru yang semula ragu-ragu, akhirnya sangat mendukung diselenggarakannya Konperensi Asia-Afrika. Pernyataan yang senada juga datang dari Pakistan, Birma dan Srilanka.<sup>63</sup>

Setelah mendapat dukungan dari negara-negara Asia dan Afrika, pada tanggal 28-29 Desember 1954 PM Ali Sastroamidjojo mengundang rekan-rekannya dari India, Pakistan, Birma dan Srilanka untuk mengadakan pertemuan di Bogor. Pertemuan itu membicarakan mengenai tujuan KAA, siapa sponsornya, waktu dan lamanya konperensi, tingkat delegasi yang diminta hadir, agenda konperensi dan negara-negara yang akan diundang ke KAA.<sup>64</sup>

Mengenai tujuan konperensi, rumusan PM Nehru diterima dengan suara bulat. Rumusan tersebut adalah :

- "Konperensi Asia-Afrika akan bermaksud :
- a) untuk memajukan goodwill dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika, untuk menjelajah serta untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama, serta untuk menetapkan dan memajukan persahabatan serta hubungan sebagai tetangga yang baik;

---

<sup>63</sup> Bakran Asmawi (ed.), Dkk., Pesan Pembaharuan Dari Bandung (Jakarta: LKBN ANTARA, 1985), hlm. 13-14

<sup>64</sup> Roeslan Abdulgani, The Bandung..., hlm. 20-21

- b) untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan di lapangan sosial, ekonomi dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili;
- c) untuk mempertimbangkan soal-soal yang berupa kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia-Afrika misalnya mengenai soal kedaulatan nasional dan tentang masalah-masalah rasialisme dan kolonialisme;
- d) untuk meninjau kedudukan Asia dan Afrika serta rakyatnya dalam dunia dewasa ini serta sumbangan yang dapat mereka berikan guna memajukan perdamaian serta kerjasama di dunia".<sup>65</sup>

Kelima Perdana Menteri menetapkan yang menjadi sponsor utama dan penyelenggara konperensi adalah Indonesia atas permintaan negara-negara Konperensi Kolombo. Juga ditetapkan bahwa delegasi adalah pada tingkat menteri, walaupun yang datang kemudian para kepala negara dan pemerintahan. Mengenai agenda KAA, kelima Perdana Menteri menyerahkan sepenuhnya kepada peserta konperensi untuk menetapkannya dengan ketentuan harus terikat pada empat tujuan konperensi tersebut.<sup>66</sup>

Pembicaraan yang cukup alot adalah mengenai negara-negara yang akan diundang ke KAA. Setelah melalui perdebatan, ditetapkan bahwa yang diundang ke KAA adalah semua negara di Asia dan Afrika yang telah merdeka atau yang telah punya pemerintahan sendiri. Status peninjau bagi negara-negara itu tidak diakui. Israel tidak diundang karena mengandung resiko negara-negara Arab tidak

---

<sup>65</sup>George McTurnan Kahin, The Asian-African Conference, Bandung, Indonesia, April 1955 (Ithaca, New York : Cornell University Press, 1955), hlm. 3

<sup>66</sup>Roeslan Abdulgani, The Bandung..., hlm. 27-26

akan datang. Kemudian diputuskan untuk mengundang Nepal, Turki, Jepang, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Kamboja, Laos, Sudan, Gold Coast dan federasi Afrika Tengah. Melalui berbagai pertimbangan, akhirnya RRC juga diundang ke KAA. Sedangkan Taiwan tidak diundang karena sikap keras Burma yang menolaknya. Pada bagian akhir pembicaraan diputuskan bahwa Mongolia, Korea Utara dan Korea Selatan tidak akan diundang mengingat situasinya yang belum jelas bagi negara-negara tersebut.<sup>67</sup>

Pada tanggal 29 Desember 1954, diumumkan 25 negara Asia dan Afrika<sup>68</sup> yang diundang ke KAA ditambah dengan lima negara sponsor (Indonesia, India, Pakistan, Burma dan Srilanka). Konperensi Bogor juga memutuskan agar Indonesia membentuk sekretariat bersama yang anggotanya terdiri dari wakil negara-negara sponsor dan diketuai oleh wakil dari Indonesia. Kota Bandung ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan KAA.<sup>69</sup>

### 3. Pelaksanaan Konperensi Asia-Afrika

#### a. Persiapan KAA

---

<sup>67</sup>Ibid., hlm. 27-30, 37

<sup>68</sup>Afganistan, Arab Saudi, Ethiopia, Federasi Afrika Tengah, Gold Coast, Irak, Iran, Jepang, Kamboja, Laos, Libanon, Liberia, Libya, Mesir, Nepal, Philipina, RRC, Sudan, Suriah, Thailand, Turki, Vietnam Selatan, Vietnam Utara, Yaman dan Yordania

<sup>69</sup>Bakran Asmawi (ed.), dkk., op. cit., hlm. 17

Setelah Konperensi Bogor selesai, persiapan pelaksanaan KAA segera dimulai. Sekretariat Bersama segera dibentuk dan Roeslan Abdulgani diangkat sebagai ketuanya. Sekretariat Bersama menetapkan waktu pelaksanaan KAA adalah tanggal 18-23 April 1955. Waktu pelaksanaan ini berbeda dengan yang direncanakan dalam Konperensi Bogor yaitu pada minggu terakhir bulan April. Dasar pertimbangan dipilihnya tanggal tersebut adalah agar negara-negara Arab dan negara-negara yang beragama Buddha bisa hadir dalam KAA. Tanggal 15 April 1955 adalah hari suci agama Buddha. Sedangkan tanggal 24 April 1955, merupakan awal bulan puasa bagi umat Islam.<sup>70</sup>

Untuk mempermudah persiapan KAA, Pemerintah Indonesia juga membentuk Panitia Interdepartemental yang bertingkat nasional dan Panitia Lokal di Bandung. Persiapan fisik berupa gedung-gedung untuk sidang, hotel dan bungalow untuk penginapan, alat-alat transportasi, komunikasi, akomodasi, dan konsumsi yang khas Indonesia menjadi perhatian panitia interdepartemental dan panitia lokal. Agar persiapan itu benar-benar matang, maka pada tanggal 7 April 1955, Presiden Soekarno secara khusus datang ke Bandung mengontrol segala persiapan yang telah dilakukan panitia.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Roeslan Abdulgani, *The Bandung...*, hlm.43.

<sup>71</sup>Bakran Asmawi (ed.), dkk., *op. cit.*, hlm. 18-19.

b. Pembukaan KAA

Pada tanggal 18 April 1955, Presiden Soekarno secara resmi membuka KAA. Konperensi ini dihadiri oleh 29 delegasi yang terdiri dari 5 negara sponsor dan 24 dari 25 negara yang diundang,<sup>72</sup> para peninjau dan para tamu dari luar negara Asia dan Afrika.

Dalam pidato pembukaannya, Presiden Soekarno memulainya dengan mengingatkan pada perjuangan dan penderitaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dan sekarang tugas berat yang diemban adalah mengisi kemerdekaan itu tidak hanya dengan benda-benda fisik belaka, tetapi juga dengan nilai-nilai etika dan moral. Kemerdekaan tanpa nilai-nilai etis dan moral tak ada artinya dan sama saja seperti sebelum merdeka. Selanjutnya dinyatakannya bahwa perjuangan melawan kolonialisme belumlah berakhir. Masih banyak dari bangsa-bangsa Asia-Afrika yang belum bebas. Ditegaskannya juga bahwa kolonialisme belumlah mati. Kolonialisme sekarang telah punya baju yang modern yang sama jahatnya dengan kolonialisme klasik. Untuk itu beliau menyerukan agar peserta KAA menyatukan diri menghadapi berbagai tantangan dunia. Negara-negara Asia-Afrika tidak punya

---

<sup>72</sup>Federasi Afrika Tengah tidak bisa hadir karena kesibukan di dalam negeri, dan menyatakan mendukung tujuan-tujuan KAA. (Kementerian Penerangan RI, Konperensi Asia-Afrika Di Bandung, Penerbitan Khusus, 1 Djuli 1955, hlm. 70).

kekuatan fisik dan ekonomi yang besar, namun dapat berbuat banyak dengan memobilisasi semua kekuatan spiritual, moral dan politik untuk perdamaian dunia. Dalam menyatukan kekuatan bangsa-bangsa Asia-Afrika, beliau menyarankan agar motto bangsa Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika* dapat dipergunakan. Dengan demikian akan dapat dibangun suatu pilar kerjasama. Akhirnya, beliau mengimbau agar melupakan kepahitan dan kepedihan masa lalu dan memusatkan perhatian menghadapi masa depan dalam mencapai tujuan manusia tertinggi yaitu bebas dari belenggu ketakutan, penindasan, kesengsaraan, kemiskinan dan mencapai persamaan derajat, hak dan kewajiban.<sup>73</sup>

Pidato tersebut ternyata besar pengaruhnya terhadap jalannya konperensi. Pidato tersebut telah membangkitkan kepercayaan diri, semangat persaudaraan dan persatuan di kalangan bangsa-bangsa Asia-Afrika. Sedangkan bagi bangsa-bangsa di luar Asia-Afrika, pidato tersebut memaksa mereka untuk mengakui bahwa bangsa-bangsa Asia-Afrika telah menjadi suatu kekuatan yang tak dapat diabaikan lagi.<sup>74</sup>

#### C. Sidang Pleno Terbuka

Sehari sebelum pembukaan KAA, Nehru memprakarsai suatu pertemuan pendahuluan yang sifatnya informal.

---

<sup>73</sup>Pidato Presiden Soekarno pada pembukaan KAA, 18 April 1955 (Roeslan Abdulgani, *The Bandung...*, hlm.64-67)

<sup>74</sup>Kementrian Penerangan RI, *Konperensi...*, hlm. 71

Pertemuan ini dihadiri oleh para ketua delegasi dan/atau stafnya dari 22 negara yang telah datang di Bandung.<sup>75</sup> Dalam pertemuan itu Nehru mengusulkan agar tata tertib konperensi dibuat seluwes mungkin dan pidato pembukaan tiap-tiap delegasi ditiadakan. Namun kemudian, Pakistan dengan didukung oleh Turki dan negara-negara yang tidak hadir dalam pertemuan pendahuluan menggugat keputusan tersebut. Konperensi diskors untuk mengadakan pertemuan pendahuluan sekali lagi.<sup>76</sup>

Pertemuan pendahuluan ulangan itu menetapkan bahwa tiap-tiap ketua delegasi diberikan kesempatan untuk berpidato dalam sidang pleno terbuka. Komunike konperensi akan disusun bersama oleh seluruh delegasi. Agenda dan tata tertib yang dibuat pada pertemuan sebelumnya, disetujui. Agenda KAA meliputi lima pokok masalah, yaitu : (1) kerjasama ekonomi, (2) kerja sama kebudayaan, (3) hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, (4) masalah bangsa-bangsa terjajah, (5) memajukan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Kemudian juga ditetapkan bahwa keputusan konperensi diambil atas dasar konsensus.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>Tujuh delegasi lainnya belum datang di Bandung pada saat itu, antara lain Pakistan yang kemudian marah besar kepada Nehru (Roeslan Abdulgani, *The Bandung...*, hlm. 56)

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 57-61

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 61-62; Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 224-225

Konperensi kemudian memilih PM Ali Sastroamidjojo sebagai ketua KAA. Sekretariat Bersama ditunjuk sebagai sekretariat konperensi dengan Roeslan Abdulgani sebagai Sekretaris Jenderal. Konperensi juga membentuk tiga buah panitia, yaitu panitia politik, ekonomi dan kebudayaan.<sup>78</sup>

Sebagai ketua konperensi, PM Ali Sastroamidjojo menyampaikan pidatonya secara singkat. Dalam pidatonya dibantahnya tuduhan bahwa seakan-akan KAA dijiwai semangat anti Barat dan anti kulit putih. Juga dibantahnya pendapat seakan-akan KAA siap membentuk persekutuan kekuatan baru. Diingatkannya bahwa tujuan KAA adalah untuk meninjau kedudukan bangsa-bangsa Asia-Afrika di dunia internasional dan membicarakan apa yang dapat disumbangkan bagi perdamaian dan kerjasama dunia, serta menolak segala bentuk dominasi apapun dan dari manapun datangnya.<sup>79</sup>

Acara dilanjutkan dengan pidato para ketua delegasi. Pidato-pidato yang disampaikan berkisar pada masalah kolonialisme, komunisme, zionisme, dan upaya menciptakan perdamaian dunia. Ketua delegasi Irak, Dr. Mohammad Fadhil Jamali, dalam pidatonya mensejajarkan antara bahaya kolonialisme, zionisme dan komunisme. Menurutnya, ko-

---

<sup>78</sup> Panitia politik diketuai oleh PM Ali Sastroamidjojo, panitia ekonomi oleh Prof. Ir. Roosseno, dan panitia kebudayaan oleh Prof. Mr. Moh. Yamin (Bakran Asmawi (ed.)<sup>79</sup> dkk., *op. cit.*, hlm. 22-23)

<sup>79</sup> Roeslan Abdulgani, *The Bandung...*, hlm. 76-77

lonialisme kuno masih merupakan masalah yang nyata sekarang ini di Afrika Utara. Dikatakannya zionisme merupakan bab terakhir dari kitab kolonialisme kuno. Dan komunisme dikatakannya sebagai agama yang berfihak pada materialisme, mengingkari Tuhan dan menimbulkan permusuhan antar golongan atau klas. Menurutnya, komunisme merupakan salah satu bentuk baru dari kolonialisme.<sup>80</sup>

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Dr. Djalal Abdoh dari Iran, Jenderal Carlos Romulo dari Philipina, Fatin Rustu Zorlu dari Turki, Pangeran Wan Waithayakon dari Thailand, dan Mohammad Ali dari Pakistan.<sup>81</sup> Mereka juga meragukan efektivitas lima prinsip hidup berdampingan secara damai. Dalam pada itu PM Moh. Ali mengusulkan supaya lima prinsip tersebut disempurnakan dengan penambahan dua prinsip lagi yang dinamakannya *The Seven Pillars of Peace*. Tambahan prinsip baru itu adalah : (1) hak bela diri secara sendirian maupun secara kolektif; dan (2) kewajiban menyelesaikan semua pertikaian internasional dengan jalan damai, yaitu dengan perundingan dan arbitrase.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 227

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm. 227-228; lihat juga Kahin, *op. cit.*, hlm 12-14

<sup>82</sup>Maksud Pakistan adalah selain untuk menyaingi gagasan India, juga untuk mencari justifikasi dan legalisasi formal di forum KAA untuk membenarkan keanggotaannya dalam SEATO serta untuk mendesak India menerima plebisit di Kashmir (Roeslan Abdulgani, *The Bandung...*, hlm. 102-103)

Akhirnya yang banyak mendapat perhatian adalah pidato PM Chou En Lai. Dikatakannya bahwa RRC datang ke Bandung tidak untuk menciptakan perbedaan tetapi untuk mencari persatuan. RRC tidak membawa apa-apa dalam KAA, kecuali keinginan untuk mencapai saling pengertian, hormat menghormati, saling bersimpati dan saling membantu. Tentang perbedaan ideologi, sistem sosial dan politik, dikatakannya apakah dengan perbedaan-perbedaan itu kita akan saling mengucilkan? Mengenai masalah kebebasan beragama, dikatakannya bahwa "kami kaum komunis adalah atheis, tetapi kami menghormati mereka yang beragama dan kami berharap sebaliknya". Soal aksi subversif komunis yang dituduhkan oleh banyak delegasi, dibantahnya bahwa RRC menyokong aksi-aksi tersebut.<sup>83</sup>

d. Sidang-sidang Tertutup

Sidang-sidang panitia politik, ekonomi dan kebudayaan dimulai pada tanggal 20 April 1955. Semua sidang panitia ini sifatnya tertutup. Karena itu, pembicaraan-pembicaraan dilakukan dengan lebih terbuka dan mendalam. Panitia ekonomi dan kebudayaan tidak mengalami banyak hambatan dalam sidang-sidangnya. Keputusan dapat segera diambil tanpa pembicaraan yang bertele-tele.<sup>84</sup>

Sidang yang paling alot dialami oleh panitia

<sup>83</sup> Ibid., hlm. 106-108; juga dalam Ide Anak Agung Gde Agung op. cit., hlm. 229-230

<sup>84</sup> Roeslan Abdulgani, The Bandung..., hlm. 109



politik karena di situ duduk ketua-ketua delegasi dan permasalahan yang mereka bicarakan sangat kompleks dan peka. Agenda yang dibicarakan meliputi : (1) hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, (2) persoalan bangsa yang masih terjajah, (3) memajukan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Pembicaraan masalah pertama berjalan cukup lancar. Dengan cepat dapat diselesaikan beberapa konsensus tentang hak-hak asasi manusia dalam hubungannya dengan piagam PBB dan hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri termasuk rasialisme.<sup>85</sup>

Dalam masalah Palestina, delegasi negara-negara Arab, Pakistan, Afganistan dan Iran dengan keras mengutuk zionis Israel dan menyokong perjuangan bangsa Palestina. Dalam hal ini India dan Birma bersikap lebih netral. Sedangkan RRC dengan tegas menyatakan dukungannya pada bangsa Palestina. Kemudian diputuskan bahwa KAA menyokong hak-hak bangsa Arab atas Palestina dan menyerukan ditaatinya resolusi-resolusi PBB dan dicapainya suatu penyelesaian dengan jalan damai. KAA juga menyatakan dukungannya kepada rakyat Aljazair, Maroko dan Tunisia untuk menentukan nasibnya sendiri dan mendesak Perancis untuk menyelesaikan soal ini secepatnya.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Ibid., hlm. 109-110

<sup>86</sup> Kahin, op. cit., hlm. 16-17

Masalah Irian Barat yang tidak ada di dalam agenda dan tidak disinggung dalam pidato Presiden Soekarno dan PM Ali Sastroamidjojo,<sup>87</sup> ternyata dimunculkan oleh delegasi Suriah. Maka KAA menyokong posisi Indonesia dalam masalah Irian Barat, yang didasarkan pada persetujuan yang telah dicapai antara Indonesia dan Belanda. KAA juga mendesak agar Belanda secepat mungkin memulai lagi perundingan-perundingan untuk menepati kewajiban-kewajiban mereka dan menyatakan harapan agar PBB mau membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian perselisihan dengan jalan damai.<sup>88</sup>

Masalah yang kemudian meledak adalah mengenai kolonialisme. PM Sir John Kotelawala membuat kejutan dengan menyatakan adanya kolonialisme dalam bentuk lain. Isi pernyataannya itu antara lain :

"Pikirkan, umpamanya saja negara-negara satelit di bawah dominasi komunis di Eropa Tengah dan Eropa Timur: Hongaria, Rumania, Bulgaria, Albania, Cekoslowakia, Latvia, Lithuania dan Polandia, apakah mereka bukan tanah jajahan sama dengan setiap tanah jajahan di Asia dan Afrika? Dan kalau kita sudah bersatu melawan kolonialisme, apakah juga bukan kewajiban kita untuk secara terang-terangan menentang kolonialismenya Soviet seperti kita menentang imperialisme Barat?"<sup>89</sup>

Pernyataan di atas membuat suasana menjadi tegang, teru-

---

<sup>87</sup> Hal ini dengan sengaja dilakukan untuk menghilangkan kesan seakan-akan Indonesia memeralat KAA untuk kepentingannya sendiri (Roeslan Abdulgani, The Bandung..., hlm. 111-112)

<sup>88</sup> Ibid., hlm. 114

<sup>89</sup> Ibid., hlm. 116; juga lihat Kahin, op. cit., hlm. 18-19

tama antara PM Sir John Kotelawala dengan PM Chou En Lai. PM Nehru mencoba menengahi, namun tidak berhasil. Dalam pernyataan balasannya PM Chou En Lai mengulangi lagi inti pidato pembukaannya. Dia tidak menyetujui pendapat bahwa keberadaan Soviet di negara-negara di Eropa Timur dan Eropa Tengah adalah kolonialisme dalam bentuk baru.<sup>90</sup>

Suasana kemudian mereda, namun bola kolonialisme bentuk baru itu telah diteruskan oleh Pakistan, Turki, Irak dan Philipina. Panitia khusus yang dibentuk untuk merumuskan konsensus akhirnya mengeluarkan pernyataan : "kolonialisme dalam segala manifestasinya adalah suatu kejahatan dan harus diberantas secepat mungkin".<sup>91</sup>

Masalah berat lain yang dibicarakan adalah mengenai lima prinsip hidup berdampingan secara damai. India, Indonesia, Birma, RRC dan Mesir menyokong dan menyetujui lima prinsip ini dan menentang adanya blok-blok militer seperti SEATO, NATO, Pakta Warsawa dan Pakta Bagdad. Dilain pihak Pakistan, Irak, Turki, Philipina dan Thailand berpandangan sebaliknya, pro blok-blok militer dan skeptis terhadap lima prinsip hidup berdampingan secara damai.<sup>92</sup>

Negara-negara yang menyokong lima prinsip hidup

---

<sup>90</sup>Roeslan Abdulgani, *The Bandung...*, hlm. 116-119

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm. 119-120

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 122

berdampingan secara damai menegaskan betapa pentingnya hidup toleran dan saling menghargai dalam ketegangan dunia yang terus memuncak. Negara-negara besar menciptakan blok-blok militer bukannya untuk menciptakan perdamaian dunia, melainkan semakin mempertajam krisis dunia. Masalah hidup berdampingan secara damai bukan hanya masalah negara-negara besar, tetapi juga negara-negara sedang dan kecil. Negara-negara besar diharapkan supaya menghentikan permainan kekuasaan politiknya dan mengakui hak negara-negara lain untuk menjalankan politik luar negerinya sendiri. Selanjutnya dinyatakan bahwa perdamaian tercipta bukan berdasarkan *balance of military power* sebab hal itu hanya akan menimbulkan ketakutan, kekuatiran dan keprihatinan di mana-mana. Perdamaian akan tercipta jika ada pengertian dan sikap saling percaya di antara negara-negara yang berbeda sistem politik dan ideologinya.<sup>93</sup>

Pendapat-pendapat di atas disanggah oleh negara-negara yang pro blok-blok militer dan yang meragukan lima prinsip hidup berdampingan secara damai. PM Moh. Ali menganggap lima prinsip tersebut tidak cukup untuk menjamin dan menciptakan perdamaian dunia. Kemudian diulanginya lagi *the seven pillars of peace* yang pernah diucapkannya di dalam sidang pleno terbuka. Pendapat ini

---

<sup>93</sup> Ibid., hlm. 122-131

mendapat dukungan dari Turki, Irak, Thailand, dan Philipina.<sup>94</sup>

Untuk merumuskan persoalan tersebut, dibentuk sebuah panitia perumus yang diketuai oleh Presiden Nasser. Namun pekerjaan panitia ini tak kunjung selesai karena banyaknya perbedaan pendapat yang sulit untuk dipertemukan. Akibatnya penutupan KAA terpaksa ditunda sehari. Setelah PM Ali Sastroamidjojo turun tangan, barulah dicapai konsensus dengan menerima usul kompromi Presiden Nasser yang menyatakan panitia menerima "hak bela diri kolektif dalam blok-blok militer, asalkan tidak digunakan bagi kepentingan negara-negara besar".<sup>95</sup>

#### 4. Hasil-Hasil KAA

Dalam sidang penutupannya tanggal 24 April 1955, KAA mengeluarkan suatu konsensus yang dituangkan dalam sebuah komunike akhir. Komunike akhir tersebut terdiri dari 7 bab, yaitu mengenai : (1) kerja sama ekonomi, (2) kerja sama kebudayaan, (3) hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri, (4) masalah-masalah rakyat terjajah, (5) masalah-masalah lain, (6) memajukan perdamaian dan kerja sama dunia, (7) deklarasi memajukan perdamaian dan kerja sama dunia.

---

<sup>94</sup> Ibid., hlm. 123-124, 129-130

<sup>95</sup> Ibid., hlm. 145

Komunike mengenai deklarasi memajukan perdamaian dan kerja sama dunia yang terdiri dari 10 prinsip yang kemudian terkenal dengan *Dasa Sila Bandung*, merupakan hasil KAA yang sangat terkenal. Kesepuluh prinsip tersebut :

- (1) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB.
- (2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa-bangsa.
- (3) Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa-bangsa besar maupun kecil.
- (4) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam masalah dalam negeri negara lain.
- (5) Menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.
- (6) (a) Tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar.  
(b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.
- (7) Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
- (8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hakim ataupun cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB.
- (9) Memajukan kepentingan bersama dan menjalin kerja sama.
- (10) Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Dasa sila Bandung ini kemudian bergaung jauh ke luar wilayah Asia-Afrika. Ia kemudian menjadi asas hubungan antar negara dan telah diterima secara luas sebagai suatu pegangan dalam menyelesaikan masalah-masalah penting di forum-forum internasional. Kemudian gerakan nonblok

---

<sup>96</sup> Ibid., hlm. 216-217

juga mengambilnya sebagai prinsip-prinsip dasarnya.<sup>97</sup> Dasa Sila Bandung ini kemudian juga menjadi sumber bagi PBB dalam mengeluarkan resolusi mengenai hubungan-hubungan secara damai di antara negara-negara (Resolusi No.1236-XII) dan resolusi diakhirinya kolonialisme (Resolusi No. 1514-XV).<sup>98</sup>

#### 5. Akibat KAA Bagi Hubungan Indonesia Dan India

Ada tiga keuntungan yang diperoleh Indonesia dari KAA. Pertama, keberhasilan Indonesia sebagai pencetus, sponsor utama dan penyelenggara KAA membuat prestise Indonesia naik di mata dunia internasional.<sup>99</sup> Kedua, Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara peserta KAA dalam perjuangannya membebaskan Irian Barat. Ketiga, Indonesia dan RRC berhasil menyelesaikan persoalan mengenai etnik China keturunan di Indonesia dengan ditandatangani *Perjanjian Dwi Kewarganegaraan* pada tanggal 22 April 1955.<sup>100</sup>

KAA cukup mengecewakan bagi India, terutama bagi PM Nehru. Pertama, ambisinya untuk menjadi pemimpin dan orang pertama dalam KAA mengalami kegagalan. Kedua, lima prinsip hidup berdampingan secara damai yang dibanggakan-

---

<sup>97</sup>Bakran Asmawi (ed.), dkk., op. cit., hlm. 33

<sup>98</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, op. cit., hlm. 245

<sup>99</sup>Michael Leifer, op. cit., hlm. 58

<sup>100</sup>Kementrian Penerangan RI, Konperensi..., hlm. 72-73

nya banyak mendapat tantangan dari negara-negara lain terutama negara-negara yang pro blok-blok militer. Akibatnya lima prinsip tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya pedoman bagi resolusi-resolusi KAA.<sup>101</sup> Ketiga, pendapat PM Nehru yang menyatakan "kolonialisme klasik dan imperialisme kuno telah mati" mendapat sanggahan dari Presiden Soekarno<sup>102</sup> dan ketua delegasi lainnya seperti PM Sir John Kotelawala dan Moh. Fahdil Jamali. Dan sejak KAA, simpati negara-negara Asia-Afrika terhadap kepemimpinan India mulai berkurang seiring dengan semakin menjolnya peranan internasional Indonesia dan RRC.<sup>103</sup>

Hasil KAA ternyata telah membuat persoalan tersendiri bagi hubungan Indonesia dan India. Suksesnya KAA merupakan titik puncak kerjasama kedua negara dan sekaligus merupakan titik awal mendinginnya hubungan kedua negara.<sup>104</sup> Hal itu pada tahun-tahun berikutnya lebih diperuncing lagi oleh perbedaan pendapat antara PM Nehru dan Presiden Soekarno mengenai masalah kolonialisme dan imperialisme.

Sikap dingin itu tidak langsung mengakibatkan membu-

---

<sup>101</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, op. cit., hlm. 242

<sup>102</sup>Ibid., hlm. 511-512

<sup>103</sup>Frans S. Fernandes, op. cit., hlm. 131

<sup>104</sup>Menurut Michael Leifer, sikap paternalisme yang berlebihan dari PM Nehru menyebabkan hubungan Jakarta dan New Delhi menjadi dingin (Michael Leifer, op. cit., hlm. 58)

ruknya hubungan kedua negara. Kerjasama dan hubungan-hubungan lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pada tanggal 29 Desember 1955, kedua negara menjalin kerjasama kebudayaan. Dan pada bulan Februari 1956, kerjasama dalam pengembangan Angkatan Udara ditandatangani oleh kedua negara.<sup>105</sup> Saling berkunjung tokoh-tokoh pemerintahan kedua negara juga tetap dilaksanakan seperti yang dilakukan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Wapres India Radhakrisnan pada tahun 1955. Dan pada tahun 1958, saling berkunjung juga dilakukan oleh Presiden Soekarno dan Presiden Rajendra Prasad.<sup>106</sup>

#### D. Sikap India Dalam Masalah Irian Barat

Sejak pengakuan kedaulatan oleh Belanda, masalah Irian Barat selalu menjadi perhatian politik luar negeri Indonesia. Masalah ini timbul karena adanya ganjalan pada salah satu butir keputusan KMB yang menyatakan :

"Status quo wilayah New Guinea akan dipertahankan dengan ketentuan bahwa dalam masa setahun setelah pengakuan kedaulatan kepada RIS, soal kedudukan politik New Guinea akan ditentukan melalui perundingan antara RIS dan kerajaan Belanda".<sup>107</sup>

Ternyata setelah lewat setahun, Belanda tetap mempertahankan kedudukannya di Irian Barat dan perundingan yang

---

<sup>105</sup> Lihat bab III, mengenai kerjasama bilateral Indonesia dan India, bagian : Kerjasama kebudayaan dan pendidikan serta Kerjasama AU Indonesia dan AU India.

<sup>106</sup> Kementrian Penerangan RI, Menyongsong..., hlm.1,30,47

<sup>107</sup> Notosoetardjo, Dokumen-2 Konperensi Media Bundar (Djakarta: Penerbit Endang, 1956), hlm. 152

dijalankan (seperti yang dilakukan oleh delegasi Mohammad Roem di Den Haag, pada bulan Desember 1950) tidak membawa hasil.<sup>108</sup>

India sebagai negara yang selalu menyokong posisi Indonesia, dalam masalah ini juga berpihak pada Indonesia. Ketika mengadakan kunjungan ke Indonesia pada bulan Juni 1950, PM Nehru menyatakan dukungan terhadap posisi Indonesia dalam masalah Irian Barat. Dikatakannya bahwa : Irian Barat adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Republik Indonesia baik itu dari segi sejarah, etnologi maupun perjanjian-perjanjian internasional.<sup>109</sup>

Ketika masalah Irian Barat diusulkan dalam agenda sidang Majelis Umum IX PBB tahun 1954, India dengan gigih menyokong posisi Indonesia. Dalam rapat pleno MU pada tanggal 10 Desember 1954 untuk membicarakan rancangan resolusi mengenai Irian Barat, delegasi India menyatakan:

"masalah Irian Barat adalah sangat mendasar; dan itu merupakan usaha pengenyahan prestise kolonialisme masa lalu di Asia, agar dendam dan kebencian antara Timur dan Barat dapat dihilangkan dari bagian bumi ini".<sup>110</sup>

India menyokong Indonesia tidak hanya didasarkan atas penentangan terhadap kolonialisme yang masih berlangsung di Asia, tetapi juga didasarkan pada adanya hubungan se-

---

<sup>108</sup>M. Sabir, Politik..., hlm. 119-120; Michael Leifer, op. cit., hlm. 44-45

<sup>109</sup>Ministry of Information Republic of Indonesia, op. cit., hlm. 9

<sup>110</sup>Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, The Question Of West Irian In The United Nations, 1954-1957 (Djakarta: Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, 1958), hlm. 161, 168-170

jarah, geografis dan politik antara Indonesia dan Irian Barat. Dalam pemungutan suara yang dilakukan pada hari itu, resolusi tidak memperoleh 2/3 suara yang diperlukan agar masalah Irian Barat bisa dibicarakan dalam Sidang MU IX PBB. <sup>111</sup>

Krishna Menon, wakil tetap India di PBB, dalam perdebatannya mengenai masalah Irian Barat di PBB tanggal 26 November 1957, menyatakan :

"Indonesia tidak menciptakan kemerdekaannya meliputi 2000 atau 2100 pulau-pulau, tetapi meliputi seluruh wilayah di mana Belanda mempunyai hegemoni. India beranggapan bahwa pelanjutan kolonialisme dalam bentuk apapun pada saat ini telah usang dan harus diakhiri untuk kepentingan-kepentingan semua pihak yang bersangkutan". <sup>112</sup>

Dan mengenai istilah menentukan nasib sendiri yang digembarkan Belanda bagi rakyat Irian Barat, Krishna Menon menyangkal bahwa "tidak ada penentuan nasib sendiri di wilayah yang sudah berdaulat". <sup>113</sup>

Dalam rangka kunjungan PM Nehru ke negara-negara Arab dan Eropa (termasuk Belanda) pada tahun 1957, dinyatakan bahwa India tetap menyokong posisi Indonesia dalam masalah Irian Barat. India mengharapkan adanya penyelesaian secara damai antara Indonesia dan Belanda dengan cara yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. <sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Kementrian Penerangan RI, Menyongsong..., hlm. 31

<sup>113</sup> Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, op. cit., hlm 415

<sup>114</sup> Kementrian Penerangan RI, Menyongsong..., hlm. 32

Pers India juga memberikan reaksi yang hangat dan tajam dalam mengkritik pihak Barat di mimbar PBB dalam masalah Irian Barat. Surat kabar berpengaruh di India, seperti *India Express*, *Hindu National Herald*, dan *Amritsa Bazar Patrika* mengecam Australia karena makin mempersulit masalah Irian Barat untuk kepentingan-kepentingannya terhadap posisi Irian Barat bagi daerah pertahanannya.<sup>115</sup>

Indonesia secara berturut-turut mengajukan lagi masalah Irian Barat dalam sidang MU X tahun 1955, sidang MU XI tahun 1956 dan sidang MU XII tahun 1957. Hasil pemungutan suara yang diperoleh tidak berbeda dengan hasil yang diperoleh pada sidang MU IX tahun 1954. Indonesia tetap tidak memperoleh 2/3 suara yang diperlukan<sup>116</sup> walaupun telah mendapat dukungan dari negara-negara Asia dan Afrika yang ikut dalam KAA di Bandung.

Setelah empat kali mengalami kegagalan, Indonesia akhirnya memutuskan untuk mencari penyelesaian di luar forum PBB. Pada tahun 1957, Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan memulangkan secara besar-besaran warga negara Belanda. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1960, hubungan diplomatik dengan Belanda diputuskan. Sejak itu Presiden Soekarno telah bertekad untuk merebut Irian Barat dengan kekuatan senjata. Untuk

---

<sup>115</sup> Ibid.

<sup>116</sup> M. Sabir, Politik..., hlm. 121

memperkuat diri, Indonesia membeli persenjataan dari Uni Soviet. Gaung konfrontasi ditingkatkan. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) di Yogyakarta yang intinya : (1) gagal-kan pembentukan negara boneka Papua; (2) kibarkan bende-ra Merah Putih di Irian Barat; (3) persiapan melakukan mobilisasi umum. Sebagai tindak lanjut TRIKORA, dibentuk Operasi Komando Mandala yang bermarkas di Ambon. Penyusupan ke Irian Barat terus dilakukan dan bentrokan senjata sudah terjadi. Amerika yang mengkuatirkan Indonesia masuk dalam rangkulan komunis, akhirnya turun tangan mendesak Belanda untuk duduk dalam meja perundingan. Perundingan menghasilkan kesepakatan bahwa administrasi Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia dan penduduk kemudian akan menentukan pilihan nasibnya sendiri. Setelah tugas UNTEA selesai, pada tanggal 4 Mei 1963, Irian Barat kembali kepangkuan Indonesia.<sup>117</sup> Dan selama itu juga India secara konsisten mendukung Indonesia.<sup>118</sup>

Hubungan yang telah dibina dari tahun 1950 akhirnya mengalami keretakan pada tahun 1959. Masalah-masalah yang menyebabkannya akan dibahas dalam bab IV berikut ini.

---

<sup>117</sup> Michael Leifer, *op. cit.*, hlm. 68-77, 88-100

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 100

BAB IV  
HUBUNGAN INDONESIA DAN INDIA RETAK  
(1959-1961)

Walaupun telah ada perjanjian persahabatan tahun 1951, hubungan Indonesia dan India retak juga. Timbulnya perbedaan pandangan terhadap RRC merupakan salah satu faktor yang menyebabkan retaknya hubungan kedua negara.<sup>119</sup> Sebelumnya kedua negara mempunyai hubungan yang erat dengan RRC. Pemberontakan rakyat Tibet tahun 1959 dan pelanggaran wilayah India oleh tentara RRC semakin melengkapi pengingkaran perjanjian persahabatan tahun 1954. Hubungan India dan RRC menjadi buruk. Sementara itu di Indonesia terjadi perubahan radikal dalam sistem politik dari Demokrasi Parleментар ke Demokrasi Terpimpin. Orientasi politik luar negeri Indonesia menjadi selaras dengan orientasi politik luar negeri RRC. Perubahan itu semakin menarik pemerintah RRC untuk mengadakan hubungan yang lebih terbuka dengan Indonesia.<sup>120</sup>

Keretakan hubungan Indonesia dan India semakin nampak dalam KTT Nonblok I di Beograd pada bulan September 1961. Dalam konperensi tersebut terlihat dengan jelas perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia. Pidato Presiden Soekarno yang bertentangan dengan pidato PM Nehru mencerminkan bahwa Indonesia telah merubah posisi-

---

<sup>119</sup>L.P. Singh, *op. cit.*, hlm. 657

<sup>120</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 512

nya terhadap India.<sup>121</sup>

Untuk menjelaskan mengenai retaknya hubungan Indonesia dan India, maka berikut ini akan diuraikan :

- A. Masalah RRC Dalam Hubungan Indonesia Dan India
- B. Indonesia Dan India Dalam KTT Nonblok I

A. Masalah RRC Dalam Hubungan Indonesia Dan India

Timbulnya perbedaan pandangan terhadap RRC merupakan salah satu faktor yang menyebabkan retaknya hubungan Indonesia dan India. Untuk menjelaskan hal tersebut, maka berikut ini akan diuraikan mengenai :

- 1. Hubungan Indonesia Dan RRC Tahun 1950-1961
- 2. Pemberontakan Rakyat Tibet Tahun 1959

1. Hubungan Indonesia Dan RRC Tahun 1950-1961

Berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC) pada tanggal 1 Oktober 1949 merupakan suatu era baru bagi bangsa Cina. Indonesia segera memberikan pengakuan terhadap negara baru tersebut. Pada tahun 1950, kedua negara menjalin hubungan diplomatik. Namun hubungan yang baru terjalin tersebut terganggu oleh tindakan duta besar RRC yang tidak bersahabat dengan pemerintah Indonesia. Duta besar RRC tersebut dengan bertopang pada kekebalan diplomatiknya banyak melakukan kegiatan propokatip yang menguntungkan PKI. Menghadapi kenyataan itu, kabinet Soekiman mengambil sikap tegas terhadap kedutaan RRC di Jakarta. Ruang gerak

<sup>121</sup> Ibid.

kegiatan dan jumlah staf kedutaan RRC di Jakarta dibatasi.<sup>122</sup>

Hubungan menjadi baik kembali pada masa pemerintahan kabinet Ali I (1953-1955). Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI dan PKI walaupun partai ini (PKI) tidak duduk dalam kabinet. Ketika diselenggarakannya KAA di Bandung, Indonesia dan RRC memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelesaikan masalah dwi kewarganegaraan bagi etnik Cina di Indonesia. Pada tanggal 22 April 1955, perjanjian dwi kewarganegaraan ditandatangani di Bandung oleh PM Chou En Lai dan PM Ali Sastroamidjojo. Motivasi utama RRC menyelesaikan masalah dwi kewarganegaraan tersebut adalah untuk memperlihatkan maksud baiknya kepada negara-negara Asia lainnya yang juga memiliki etnik Cina. Di samping itu RRC juga memperlihatkan sikap damai dalam menyelesaikan masalah Cina di seberang lautan. Namun perjanjian dwi kewarganegaraan tersebut mendapat tantangan dari pihak oposisi dan juga dari kalangan etnik Cina yang telah menjadi warga negara Indonesia sejak pengakuan kedaulatan. Akibatnya parlemen tidak dapat meratifikasi perjanjian tersebut. Dan baru pada tahun 1960 perjanjian tersebut diratifikasi oleh parlemen.<sup>123</sup>

Sikap RRC yang bersahabat dalam KAA menarik simpati negara-negara Asia-Afrika. Keberhasilan itu meningkatkan kepercayaan diri RRC untuk memainkan peranan yang lebih

---

<sup>122</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 410  
<sup>123</sup>*Ibid.*, hlm. 411-412

besar dalam hubungan internasional. Sesudah KAA, keinginan RRC untuk menjadi pemimpin Asia semakin besar. Untuk mencapai tujuan itu, RRC perlu partner yang sepeham. India yang sejak ditandatanganinya Panchsheel dijadikan partner mulai ditinggalkannya. Pemerintah RRC melihat Indonesia dapat dijadikan partner baru dalam mencapai cita-cita itu.<sup>124</sup>

Pada tahun 1956, Presiden Soekarno mengadakan kunjungan kenegaraan ke RRC. Dalam kunjungan itulah Presiden Soekarno menemukan inspirasi untuk menerapkan sistem pemerintahan baru di Indonesia. Sistem itu adalah demokrasi terpimpin yang mulai diterapkan pada tanggal 5 Juli 1959. Pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno menampilkan politik luar negeri yang militan dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Politik itu sejalan dengan politik luar negeri RRC. Oleh karena itu RRC dan Indonesia harus berkerjasama dalam membebaskan Asia dari pengaruh dan dominasi bangsa Barat serta menggantikan kedudukan mereka sebagai pemimpin Asia.<sup>125</sup>

Walaupun sejak tahun 1956 ada gerakan anti Cina dalam bidang perdagangan, hubungan Indonesia dan RRC masih dapat berjalan dengan baik. Pada bulan Maret 1958, RRC memberikan kredit sebesar 11,2 juta dollar Amerika kepada Indonesia untuk pembangunan perekonomian.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup>Ibid., hlm. 511-512  
<sup>125</sup>Ibid., hlm. 413  
<sup>126</sup>Ibid., hlm. 426

Agar masalah anti Cina tidak berlarut-larut, pada akhir tahun 1959, menteri perdagangan Rahman memberlakukan peraturan baru perdagangan domestik yang melarang orang asing berperan sebagai pedagang kecil. Peraturan ini sangat menyulitkan ruang gerak para pedagang Cina. Dan kebijaksanaan ini didukung sepenuhnya oleh militer dan golongan nasionalis. Karena keadaan tersebut dapat menimbulkan rusaknya hubungan dengan RRC, maka Presiden Soekarno mengirim Menlu Subandrio ke Peking untuk menjelaskan duduk perkaranya. Kemudian Presiden Soekarno juga memodifikasi peraturan tersebut agar ruang gerak pedagang Cina tidak terlalu dibatasi. Dalam hal ini, PKI bersikap sangat hati-hati.<sup>127</sup>

Gerakan anti Cina akhirnya memang membuat hubungan Indonesia dan RRC tegang. Pemerintah RRC memberikan reaksi keras terhadap usaha militer Indonesia melaksanakan peraturan pemerintah yang melarang orang asing (terutama etnik Cina) mengadakan perdagangan eceran di luar kota-kota besar. Bagi militer, pelaksanaan peraturan tersebut sangat menguntungkan posisi mereka untuk memperlemah kekuatan PKI. Pada puncak pertikaian tersebut, Menlu Subandrio yang sedang berada di Peking untuk mencoba berunding dengan pemerintah RRC mengenai persoalan di atas, merasa diancam oleh mitra imbangnya Menlu Chen Yi. Chen Yi menyatakan bahwa jika Indonesia tidak menghapuskan gerakan-

---

<sup>127</sup> Ibid., hlm. 428-430

gerakan anti Cina, maka Peking akan menghimbau Cina Singapura untuk melancarkan pemboikotan perdagangan sehingga akan melumpuhkan perekonomian Indonesia. Kedua negara akhirnya sepakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengganjal tersebut secepatnya agar hubungan bisa pulih kembali.<sup>128</sup>

Pada bulan April 1961, kunjungan Menlu Chen Yi ke Jakarta membuka suatu era baru hubungan Indonesia dan RRC. Dalam kunjungan tersebut ditandatangani perjanjian persahabatan dan kerja sama kebudayaan antara kedua negara. Chen Yi juga menegaskan kembali dukungan pemerintahnya terhadap gagasan Presiden Soekarno untuk mengadakan KAA II. Pada bulan Juni 1961, Presiden Soekarno mengadakan kunjungan lagi ke Peking. Pada bulan Oktober 1961, pemerintah RRC kembali menyerahkan pinjaman sebesar 30 juta dollar Amerika kepada Indonesia sebagai tambahan atas kredit sebesar 41 juta dollar Amerika yang dialokasikan pada tahun 1958-1959.<sup>129</sup>

Sejak tahun 1961, hubungan Indonesia dan RRC semakin akrab seiring dengan semakin dinginnya hubungan Indonesia dan India. Dalam KTT Nonblok I di Beograd, Soekarno dan Nehru tidak lagi mempunyai wawasan yang sama. Perbedaan keduanya semakin meruncing bersamaan waktunya dengan konflik India-RRC dan perselisihan RRC-Soviet. Dan dalam

---

<sup>128</sup>Michael Leifer, *op. cit.*, hlm. 101

<sup>129</sup>*Ibid.*, hlm. 102; Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 430

situasi seperti itu Indonesia dan India justru menempatkan diri mereka pada struktur pemihakan yang bersaing. India memihak Soviet dan Indonesia memihak RRC.<sup>130</sup>

## 2. Pemberontakan Rakyat Tibet Tahun 1959

Akar pemberontakan rakyat Tibet sebenarnya sudah ada sejak tahun 1950 ketika RRC menginvasi negeri ini. Pada tanggal 23 Mei 1951, pemerintah RRC dan Tibet menandatangani perjanjian 17 pasal untuk menentukan masa depan negeri itu. Isi perjanjian itu antara lain menetapkan bahwa urusan luar negeri Tibet dilaksanakan oleh pemerintah pusat di Peking; pemerintah RRC mengakui otonomi Tibet dan tidak akan mengubah sistem politik yang telah ada. Untuk memperlihatkan maksud baiknya, RRC menahan diri untuk tidak memaksakan paham komunis di Tibet. Tetapi di balik semuanya itu RRC tetap mencoba memanipulasi sistem politik di Tibet dengan memperkuat kekuasaan Panchen Lama untuk menggeser kekuasaan Dalai Lama.<sup>131</sup> Menghadapi kenyataan itu, ketika berkunjung ke India pada bulan Nopember 1956 Dalai Lama bermaksud tidak mau kembali ke Tibet. Ia hanya mau kembali apabila Nehru mendapat jaminan dari Chou En Lai bahwa otonomi Tibet benar-benar dihormati dan tidak ada pemaksaan ajaran komunis di sana.

---

<sup>130</sup>Michael Leifer, *op. cit.*, hlm. 104

<sup>131</sup>William J. Barnds, India, Pakistan And The Great Powers (New York: Praeger, 1972), hlm. 144; lihat juga Girilal Jain, Panchsheela (Djakarta: Penerbit Swada, 1963), hlm. 57-60

Sikap Dalai Lama ini menambah kecurigaan RRC terhadap India.<sup>132</sup>

Pada tahun 1958, kerusuhan-kerusuhan di Tibet semakin meningkat khususnya di Khampa. Pada tanggal 10 Juli 1958, Peking mengirim peringatan ke New Delhi yang isinya menuduh agen-agen Amerika dan Cina Nasioalis menggunakan kota perbatasan Kalimpong sebagai basis untuk melakukan kegiatan subversif di Tibet. Peringatan tersebut dijawab New Delhi dengan bersahabat dan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak beralasan. New Delhi juga meyakinkan Peking bahwa kegiatan-kegiatan yang memusuhi RRC tidak akan diijinkan di wilayah India.<sup>133</sup>

Pada awal tahun 1959, kerusuhan telah menyebar ke luar wilayah Khampa. Bulan Maret 1959, perlawanan bersenjata telah berkobar di Lhasa. Menghadapai situasi itu, India hanya berdiam diri saja karena menganggap masalah di Tibet adalah persoalan dalam negeri RRC. Tetapi kemudian India akhirnya ikut terseret ke dalam masalah Tibet. India sangat marah ketika kedutaan RRC di New Delhi menyatakan bahwa pemberontakan direncanakan di Kalimpong.<sup>134</sup> Tuduhan itu menyebabkan rakyat India marah. Demonstrasi yang mendukung pemberontakan rakyat Tibet dan anti RRC muncul di berbagai kota di India. Puncak demonstrasi ter-

---

<sup>132</sup>Ibid., hlm. 76

<sup>133</sup>W.J.Barnds, op. cit., hlm. 144; Neville Maxweel, India's China War (Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1972), hlm. 101

<sup>134</sup>W.J. Barnds, op. cit., hlm. 145; Girilal Jain, op. cit., hlm. 96-97

jadi di Bombay pada bulan April 1959 di mana photo Mao Tse Tung yang ada di tembok konsulat RRC dilempari dengan telur dan tomat busuk oleh para demonstran.<sup>135</sup>

Pemberontakan rakyat Tibet dengan cepat dapat ditumpas. Dalai Lama beserta dengan 13.000 para pengikutnya menyeberang ke India dan meminta suaka politik. Pemerintah India memberikan suaka politik dengan syarat Dalai Lama tidak melakukan kegiatan politik di India. Pemberian suaka politik tersebut semakin memperbesar kemarahan RRC terhadap India. Namun Nehru tetap berusaha mengurangi ketegangan dengan menegaskan kembali Panchsheel. Nehru menyatakan bahwa "jika kita percaya kepada Panchsheel, ikutilah dia walaupun tidak satu pun negara di dunia ini yang mengikutinya".<sup>136</sup>

Pemberontakan rakyat Tibet merupakan suatu pukulan berat bagi RRC. RRC merasa yakin bahwa India terlibat dalam pemberontakan itu. Pembicara-pembicara pada Kongres Rakyat Nasional II di Peking menyatakan bahwa Dalai Lama pergi ke India di bawah paksaan kaum pemerontak. Isi pemberitaan radio dan pers RRC juga menuduh India terlibat dalam pemberontakan itu. Dan pada tanggal 16 Mei 1959, duta besar RRC di New Delhi membuat pernyataan yang menuduh para pemimpin politik dan pers India menyokong pemberontakan rakyat Tibet. Dikatakannya juga bahwa India

---

<sup>135</sup>Neville Maxweel, op. cit., hlm. 100

<sup>136</sup>W.J. Barnds, Op. cit., hlm. 145.

memutarbalikkan fakta terhadap dunia luar mengenai cara RRC menanggulangi pemberontakan tersebut.<sup>137</sup>

Ketegangan antara India dan RRC meningkat. Apalagi kemudian RRC tidak mau mengakui garis batas McMahon dan mengklaim wilayah India seluas 50.000 mil persegi di Ladakh dan NEFA.<sup>138</sup> Pada tanggal 25 Agustus 1959, terjadi bentrokan senjata antara tentara kedua negara di Longju. Bentrokan senjata kembali terjadi di Kongka Pass pada tanggal 21 Oktober 1959.<sup>139</sup> Untuk mencegah konflik yang lebih besar, usaha-usaha peredaan ketegangan melalui jalur diplomasi terus dilakukan kedua negara. Pada bulan April 1960, Nehru dan Chou En Lai mengadakan pertemuan di New Delhi untuk membicarakan sengketa perbatasan tersebut. Namun pertemuan itu tidak membuahkan hasil.<sup>140</sup> Kedua negara semakin terseret kepada konflik yang lebih besar hingga pecahnya perang India-RRC pada tahun 1962.

Penindasan pemberontakan rakyat Tibet dan konflik perbatasan dengan India mengakibatkan berubahnya sikap negara-negara Asia terhadap RRC, namun tidak bagi Indonesia. Ketika India dan negara-negara Asia mengutuk cara RRC menumpas pemberontakan rakyat Tibet, Indonesia hanya berdiam diri saja. Dan ketika konflik perbatasan India-RRC meletus, Indonesia bahkan tidak memberikan dukungan

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 145-146; Girilal Jain, *op. cit.*, hlm. 98-126

<sup>138</sup> W.J. Barnds, *op. cit.*, hlm. 149-150

<sup>139</sup> Neville Maxweel, *op. cit.*, hlm. 106-109

<sup>140</sup> W.J. Barnds, *op. cit.*, hlm. 153-155

dan rasa simpati kepada India.<sup>141</sup> Menurut pandangan pemimpin Indonesia, RRC merupakan kekuatan anti imperialis yang progresif yang bermanfaat untuk diajak bekerja sama. Indonesia juga menyesalkan tindakan India mempertahankan garis batas buatan Inggris dengan menolak tuntutan-tuntutan historis RRC atas wilayah India. Sikap pemimpin Indonesia itu menyebabkan pemimpin India mempertanyakan kadar persahabatan Indonesia terhadap India.<sup>142</sup>

#### B. Indonesia Dan India Dalam KTT Nonblok I

Keretakan hubungan Indonesia dan India semakin nyata terlihat ketika KTT Nonblok I berlangsung di Beograd pada tanggal 1-6 September 1961. Untuk menjelaskan mengenai keretakan hubungan tersebut, maka berikut ini akan diuraikan beberapa hal mengenai :

1. Sikap India Terhadap Gagasan KAA II
2. Peranan Yugoslavia Yang Menentukan
3. Konperensi Persiapan Di Kairo
4. Pertentangan Indonesia Dan India Dalam KTT Nonblok I

##### 1. Sikap India Terhadap Gagasan KAA II

Didorong oleh keberhasilan KAA I yang telah mengharumkan nama dan mempertinggi martabat Indonesia di du-

---

<sup>141</sup>V.K. Sinha, "India and South East Asia", in A.B. Shah (ed.), India's Defense And Foreign Policies (Bombay: Manaktalas, 1966), hlm. 108

<sup>142</sup>L.P. Singh, op. cit., hlm. 657



nia internasional, membuat Presiden Soekarno senantiasa mendukung gagasan diadakannya KAA II pada kesempatan pertama. Hal itu dapat dilihat ketika Majelis Umum PBB gagal memasukan masalah Irian Barat ke dalam agenda Sidang Umum PBB, reaksi Presiden Soekarno adalah agar KAA II diselenggarakan untuk hal tersebut. Berulang kali setiap ada kesempatan, Presiden Soekarno mengetengahkan gagasan untuk mengadakan KAA II.<sup>143</sup>

Ketika Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin dalam pemerintahannya, Presiden Soekarno semakin berambisi untuk menampilkan Indonesia sebagai negara besar dan sebagai pemimpin negara-negara di Asia. KAA II dilihatnya dapat dijadikan sarana untuk tujuan tersebut.<sup>144</sup> Gagasan Presiden Soekarno untuk menyelenggarakan KAA II mendapat dukungan penuh dari RRC. Ketika Menlu Chen Yi berkunjung ke Jakarta pada bulan April 1961, ditegaskan bahwa sudah sangat dirasakan perlunya untuk mengadakan KAA II dalam waktu dekat ini.<sup>145</sup>

Dukungan RRC terhadap gagasan Presiden Soekarno dapat dipahami karena RRC memperhitungkan bahwa ia akan dapat mengulangi peranannya yang sangat lihai seperti dalam KAA I dahulu. Dikaitkan dengan sudah banyaknya negara Asia dan Afrika yang sudah merdeka, RRC melihat adanya

---

<sup>143</sup> M. Sabir, Quo Vadis Nonblok? (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), hlm. 65

<sup>144</sup> Ibid.

<sup>145</sup> G.H. Jansen, Nonalignment and the Afro-Asian States (New York: Praeger, 1966), hlm. 280

kesempatan baik untuk menanamkan pengaruhnya lewat konferensi semacam itu. Lagi pula hubungan RRC dan Uni Soviet semakin memburuk dan RRC ingin menunjukkan bahwa ia masih punya banyak teman walaupun Soviet berusaha mengucilkannya.<sup>146</sup>

Tekad Indonesia dan RRC untuk mengadakan KAA II ternyata tidak mendapat dukungan dari negara-negara Asia-Afrika. Tantangan terhadap gagasan itu terutama datang dari India. PM Nehru sangat menyangsikan kegunaan diadakannya KAA II karena menurutnya konferensi seperti itu hanya akan menampilkan perbedaan pendapat dan pendirian di antara negara-negara Asia-Afrika. Selain dari masalah anti penjajahan, tidak banyak hal lagi yang dapat dianggap sebagai titik pemersatu bangsa-bangsa Asia-Afrika.<sup>147</sup>

Selain itu, hubungan India dan RRC semakin memburuk. Dalam situasi seperti itu Nehru melihat bahwa tidak tepat waktunya untuk mengadakan KAA II. Nehru juga berpendapat bahwa penjajahan sudah menghadapi masa senja. Tidak luput pula dalam pemikirannya bahwa hubungan antar negara di Asia dan Afrika kini tidak menunjukkan tanda-tanda persatuan lagi. India sedang konflik dengan RRC. Negara-negara Afrika terpecah dalam kelompok-kelompok yang bermusuhan. Kelompok Casablanca bertikai dengan kelompok Monrovia. Di samping itu masih ada kelompok lain yang menamakan dirinya kelompok Brazzaville. Dengan latar belakang itu maka

---

<sup>146</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 317  
<sup>147</sup>M. Sabir, *Quo Vadis ...*, hlm. 66

Nehru tidak bersedia merestui KAA II.<sup>148</sup>

## 2. Peranan Yugoslavia Yang Menentukan

Di kalangan negara-negara sosialis, Yugoslavia adalah satu-satunya penganut prinsip nonblok. Prinsip ini dianutnya sebagai akibat dari perpecahannya dengan Stalin pada tahun 1948. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami mengapa Tito menaruh perhatian khusus kepada negara-negara nonblok terutama yang dianggapnya berpengaruh di kawasan Asia dan Afrika. Perhatian khusus itu tercermin dari perlawatannya ke India, Birma, Indonesia dan Mesir.<sup>149</sup>

Tito menyadari bahwa pendiriannya menentang komunisme ala Stalin dapat membahayakan negara mengingat posisi geografis Yugoslavia dikelilingi oleh negara-negara Pakta Warsawa. Uni Soviet dapat sewaktu-waktu mengadakan intervensi dengan alasan menyelamatkan sosialisme. Hal itu dapat saja terjadi walaupun Krushchev telah mengakui kekeliruan Soviet ketika ia mengadakan lawatan rekonsiliasi ke Beograd tahun 1955.<sup>150</sup>

Terdorong oleh kecenderungan menyelamatkan diri, Tito mulai mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan hubungan yang lebih akrab dengan negara-negara nonblok. Sebagai langkah pertama, Tito menjalin hubungan dengan

---

<sup>148</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 316

<sup>149</sup>*Ibid.*, hlm. 317-318

<sup>150</sup>M. Sabir, *Quo Vadis ...*, hlm. 67

Presiden Nasser dari Mesir yang dianggapnya sebagai salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di kalangan negara-negara nonblok. Tahun 1960-1961 terjadi kunjung mengunjungi antar keduanya.<sup>151</sup>

Dalam pembicaraan mereka, keduanya sependapat bahwa tidak mungkin lagi menyelenggarakan Konperensi Bandung II (KAA II) mengingat konstelasi politik internasional telah banyak mengalami perubahan. Dibayangi oleh ketegangan dunia yang terus memuncak akibat krisis Berlin, kedua kepala negara itu sependapat agar negara-negara yang tidak mengikatkan diri pada salah satu blok (nonblok) mengadakan konperensi untuk meredakan ketegangan tersebut. Jika KAA II tidak dapat dilaksanakan, mengapa tidak mencoba mengadakan konperensi negara-negara nonblok yang jangkauannya jauh lebih luas dari KAA. Dengan mengadakan konperensi semacam itu, Yugoslavia dapat pula mencapai tujuannya mencari perlindungan negara-negara nonblok dari ancaman Uni Soviet.<sup>152</sup>

Ketika gagasan itu mulai matang, Tito dan Nasser mengirim surat kepada Nehru untuk meminta dukungannya dan sekaligus menjadi ko-sponsor konperensi. Nehru menjawabnya dengan dingin dan tidak bersedia merestuinnya. Pada bulan Maret 1961, ketika Nehru singgah di Kairo, Nasser mengulangi tawarannya itu. Nehru tetap menolak ajakan tersebut. Nehru kelihatannya masih belum lupa perdebatan

---

151

152 *Ibid.*

Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 318

pahit dan kesulitan untuk memperoleh kata sepakat yang dialaminya pada Konperensi Bandung. Lebih dari itu Nehru menduga bahwa dalam konperensi seperti itu negara-negara nonblok akan terlibat dalam debat kusir dan perang celaan terhadap negara-negara Barat. Menurut pendapatnya hal itu justru akan memperhebat ketegangan antara kedua blok sehingga lebih membahayakan perdamaian dunia.<sup>153</sup>

Karena sikap Nehru itu, Tito dan Nasser memutuskan untuk berusaha sendiri merealisasikan rencana tersebut. Kemudian mereka mengeluarkan komunike untuk mengadakan konperensi negara-negara nonblok yang bertujuan memperkuat perdamaian dunia yang sedang dilanda oleh peristiwa-peristiwa internasional yang tidak menguntungkan. Dalam suatu undangan untuk mengadakan konperensi persiapan, mereka menjelaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi kepala negara-negara nonblok untuk mengadakan pertemuan dengan kehadiran yang paling banyak dan penyelenggaraannya dalam waktu dekat ini.<sup>154</sup>

Berbeda dengan Nehru, Presiden Soekarno menyambut baik prakarsa Tito-Nasser tersebut walaupun rencana KAA II bisa batal oleh konperensi itu. Bahkan Indonesia bersedia menjadi salah satu sponsornya. Kesediaan Soekarno menyambut prakarsa tersebut mudah untuk dipahami. Soekarno memerlukan mimbar untuk memperkenalkan arah baru poli-

---

<sup>153</sup>Ibid., hlm. 318-319

<sup>154</sup>G.H. Jansen, op. cit., hlm. 281

tik luar negeri yang akan diterapkannya.<sup>155</sup>

Mengingat situasi internasional yang bertambah buruk, India akhirnya bersedia hadir dalam KTT Nonblok I. Jika India menolak hadir, ia akan terkucil dan kemungkinan akan dianggap pembangkang atau mungkin dituduh telah meninggalkan prinsip nonblok. Bagaimanapun juga, Nehru dengan enggan dan penuh prasangka akhirnya muncul di Beograd untuk ambil bagian dalam KTT Nonblok I.<sup>156</sup>

### 3. Konperensi Persiapan Di Kairo

Negara-negara sponsor (Yugoslavia, Mesir dan Indonesia) memutuskan bahwa konperensi persiapan dilaksanakan di Kairo pada tanggal 5-12 Juni 1961, untuk membicarakan mengenai agenda, negara-negara peserta dan tempat pelaksanaan KTT Nonblok. Konperensi persiapan itu dihadiri oleh 20 negara peserta. Adapun agenda yang dihasilkan terdiri dari :

#### a. Bidang Politik :

- (1) Bertukar pandangan mengenai situasi internasional.
- (2) Membahas hak-hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri dan tidak campur tangan urusan dalam negeri suatu negara
- (3) Perjuangan melawan apartheid dan diskriminasi rasial.
- (4) Pelucutan senjata secara total, larangan percobaan senjata nuklir dan anti pangkalan militer asing.
- (5) Hidup berdampingan secara damai antar negara tanpa memandang perbedaan sistem sosial dan politik masing-masing.
- (6) Peranan dan struktur PBB serta implementasi resolusi-resolusinya.

#### b. Bidang Ekonomi :

- (1) Memecahkan masalah pembangunan ekonomi yang ti-

<sup>155</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 319

<sup>156</sup>*Ibid.*, hlm. 320

duk seimbang antar negara-negara di dunia.  
(2) Peningkatan kerjasama ekonomi dan batuan tek-  
nik.<sup>157</sup>

Negara-negara yang akan diundang harus memenuhi kri-  
teria nonblok. Adapun kriteria yang dihasilkan oleh kon-  
perensi persiapan (kriteria Kairo) adalah :

- a. Negara yang menganut politik bebas berdasarkan prinsip hidup berdampingan secara damai dan prinsip nonblok atau yang menunjukkan kecenderungan ke arah politik tersebut.
- b. Negara tersebut harus senantiasa mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional.
- c. Negara tersebut bukan anggota persekutuan militer multilateral yang dibentuk dalam rangka konflik negara-negara besar.
- d. Jika negara tersebut telah mengizinkan pangkalan militer di wilayahnya, maka konsesi-konsesi itu hendaknya bukan diberikan dalam rangka pertarungan negara-negara besar.
- e. Jika negara tersebut anggota dari pengaturan perta-  
hanan bilateral atau regional, itu hendaknya bukan  
dalam rangka pertarungan negara-negara besar.<sup>158</sup>

Mengenai jumlah negara yang akan diundang, Yugosla-  
via dan Mesir ingin para pesertanya dibatasi hanya pada  
negara-negara yang hadir dalam konperensi persiapan saja.  
Sedangkan India dan negara-negara Asia lainnya ingin kon-  
perensi dihadiri oleh sebanyak mungkin negara asal saja  
politik luar negerinya mengandung prinsip nonblok. Kelom-  
pok terakhir ini berhasil memaksakan pendiriannya sehing-  
ga negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa  
yang dapat dianggap nonblok semuanya diundang.<sup>159</sup>

Tempat konperensi diusulkan Havana, Beograd dan  
Kairo. Pilihan dengan mudah jatuh pada Beograd karena  
Havana dianggap kurang menarik dan Kairo sudah dijadikan

---

<sup>157</sup>Bakran Asmawi (ed.), *op. cit.*, hlm. 46-47

<sup>158</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 323

<sup>159</sup>M. Sabir, *Quo Vadis ...*, hlm. 73

sebagai tempat konperensi persiapan. Dan tanggal 1-6 September ditetapkan sebagai waktu penyelenggaraannya.<sup>160</sup>

#### 4. Pertentangan Indonesia Dan India Dalam KTT Nonblok I

Pada tanggal 1 September 1961, KTT Nonblok I secara resmi dibuka oleh Presiden Tito. Pada saat itulah secara resmi lahir gerakan nonblok yaitu suatu gerakan dari negara-negara yang tidak ingin menjadi obyek pertarungan politik internasional tetapi ingin menjadi subyek yang secara aktif ikut memecahkan masalah-masalah dunia. Sejak itu gerakan nonblok menjadi suatu fenomena baru dalam tatahubungan internasional.<sup>161</sup>

Konperensi yang berlangsung sampai tanggal 6 September 1961 itu dihadiri oleh 25 peserta penuh<sup>162</sup> dan tiga peninjau dari Ekuador, Bolivia dan Brasil. Negara-negara Eropa yang diundang menolak untuk hadir karena khawatir akan mengurangi kadar netralitas yang dianutnya.<sup>163</sup>

Ketika konperensi berlangsung, ternyata dalam tubuh nonblok terdapat dua kelompok yang saling bertentangan dalam melihat masalah-masalah dunia. Kelompok pertama mencakup kebanyakan negara Asia serta sekelompok kecil negara Afrika yaitu Maroko dan Ethiopia. Kelompok ini

---

<sup>160</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 324

<sup>161</sup>Bakran Asmawi (ed.), *op. cit.*, hlm. 47

<sup>162</sup>Afganistan, Aljazair, Arab Saudi, Birma, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Kamboja, Kongo, Kuba, Libanon, Mali, Maroko, Nepal, Rep. Persatuan Arab, Siprus, Srilanka, Somalia, Sudan, Tunisia, Yaman, Yugoslavia

<sup>163</sup>Frans S. Fernandes, *op. cit.*, hlm. 166

bersifat moderat dengan PM Nehru sebagai pimpinannya. Mereka menginginkan agar konperensi dapat secara realitis melihat dan mengatasi memuncaknya ketegangan antara kedua blok akibat dari Krisis Berlin dan pembatalan secara unilateral perjanjian percobaan senjata nuklir (testban). Mereka mengharap agar konperensi mencari jalan agar kedua blok bisa diajak bersama-sama menciptakan perdamaian dunia. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari sebagian besar negara-negara Afrika, Yugoslavia dan Indonesia. Kelompok ini bersifat radikal militan dengan Presiden Soekarno sebagai pemimpinnya. Mereka menyerukan semangat anti Barat, anti kolonialisme dan imperialisme.<sup>164</sup> Perbedaan pendapat antara kedua kelompok itu sebenarnya merupakan imbas dari pertentangan antara Indonesia dan India yang berada di bawah kepemimpinan Soekarno dan Nehru.

Dalam pidatonya di depan konperensi, Nehru sangat prihatin atas konflik ideologi negara-negara adi kuasa yang semakin memuncak sehingga dapat menimbulkan perang baru. Ia menekankan bahwa perang dan damai harus menjadi perhatian utama negara-negara nonblok. Sejalan dengan pemikiran itu, Nehru dengan bersemangat menyerukan agar konperensi dengan kekuatan moralnya dapat mengajak kedua negara adi kuasa untuk melakukan perundingan sehingga dapat mengurangi ketegangan dunia dan membawa dunia ke

---

<sup>164</sup> Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 327-328

arah perdamaian. Selain itu Nehru juga mencela pidato-pidato yang melulu mengutuk kolonialisme dan imperialisme karena hal itu tidak akan mengurangi ketegangan dunia yang terus memuncak.<sup>165</sup>

Pidato Nehru tersebut mendapat reaksi yang keras dari kelompok radikal. Presiden Soekarno dalam pidatonya dengan tegas bertentangan dengan pendapat-pendapat Nehru. Dalam pidato tersebut Presiden Soekarno menyatakan :

"Pendapat dunia yang ada dewasa ini membuat kita percaya bahwa sumber ketegangan dan perselisihan internasional yang sesungguhnya adalah konflik ideologi antara negara-negara adi kuasa. Saya kira hal itu tidak benar. Ada konflik yang menembus lebih dalam raga manusia yaitu konflik antara kekuatan yang baru bangkit bagi kemerdekaan dan keadilan dan kekuatan dominan yang lama; yang satu mendorongkan kepalanya tanpa belas kasihan melalui lapisan bumi yang telah memberinya darah kehidupan, sedangkan yang lainnya berjuang tanpa lelah untuk mempertahankan semua yang ia dapat dan mencoba untuk menahan jalannya sejarah".<sup>166</sup>

Pandangan konvensional nonblok selama ini mendasarkan diri pada asumsi bahwa negara-negara pasca-kolonial yang bertindak sebagai kekuatan ketiga tidak hanya akan menghindarkan diri dari lilitan perang dingin tetapi juga akan berperan sebagai sarana bagi konsiliasi dan mediasi yang mampu meredakan ketegangan dunia. Namun dalam pemikiran Presiden Soekarno tidak tersedia ruang bagi kekuatan ketiga seperti itu karena dalam penafsirannya sistem internasional merupakan struktur dua pihak yang menggambarkan suatu konflik endemik antara kekuatan yang baru

---

<sup>165</sup>Ibid., hlm. 333

<sup>166</sup>Michael Leifer, *op. cit.*, hlm. 85

muncul dan kekuatan yang telah mapan tanpa adanya kemungkinan untuk hidup berdampingan.<sup>167</sup>

Bagi Presiden Soekarno, kolonialisme merupakan masalah yang sangat penting yang sedang dihadapi oleh negara-negara nonblok. Soekarno tidak setuju dengan pendapat Nehru yang menyatakan kolonialisme telah mati. Menurutnya kolonialisme dan imperialisme mempunyai bermacam-macam manifestasi yang saat ini berbentuk neokolonialisme yang lebih berbahaya dari bentuk lamanya. Mengikuti pemikiran ini, Soekarno percaya bahwa negara-negara nonblok adalah manifestasi dari kekuatan yang baru bangkit yang akan menghancurkan kekuatan lama yang telah mapan.<sup>168</sup>

Perbedaan pendapat juga dihadapi oleh panitia kerja. Delegasi Indonesia dan India selalu terlibat dalam perdebatan yang seru pada setiap pokok masalah yang dibicarakan. Menlu Subandrio selalu bertentangan dengan Krishna Menon. Dan dalam suatu pertemuan panitia kerja, Menlu Subandrio menjelaskan mengenai posisi Indonesia dalam masalah Irian Barat yang semakin eksplosif karena Belanda mendirikan pangkalan militer untuk mempertahankan posisinya di sana. Sebagai konsekuensinya Indonesia terpaksa melakukan konfrontasi dengan Belanda. Krishna Menon memberikan tanggapan terhadap penjelasan itu dengan menyatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan

---

<sup>167</sup>

<sup>168</sup> Ibid.

Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 334

kata "konfrontasi" tersebut. Subandrio menjawabnya dengan berang dan mengatakan "jika delegasi India yang terhormat tidak mengerti arti kata konfrontasi, silahkan melihatnya dalam kamus kecil Oxford".<sup>169</sup>

Dengan kondisi seperti tersebut di atas, panitia kerja sangat sulit untuk menyusun rancangan resolusi. Menjelang pertemuan penutupan konperensi, konsensus belum dicapai dalam menyusun rancangan resolusi. Kelihatannya konperensi akan mengalami kegagalan. Pada saat-saat kritis itulah akhirnya disetujui seruan Nehru mengenai bahaya perang dan himbauan perdamaian dijadikan masalah utama dalam dokumen konperensi. Sebagai tanda kemauan baiknya, Nehru menyetujui masalah-masalah lain yang telah didiskusikan untuk dimasukkan menjadi bagian dari dokumen tersebut. Oleh karena itu resolusi KTT Nonblok I terdiri dari dua bagian. Pertama, mengenai "pernyataan akan bahaya perang dan himbauan bagi perdamaian". Kedua, mengenai "deklarasi kepala negara atau pemerintahan negara-negara nonblok" yang menyangkut berbagai masalah dunia seperti kolonialisme, hubungan internasional, kedudukan PBB, masalah Jerman, masalah pelucutan senjata, dan berbagai isu perangdingin.<sup>170</sup>

Agar hasil KTT Nonblok tersebut diperhatikan oleh kedua negara adi kuasa, maka resolusi yang dihasilkan

---

<sup>169</sup>Ibid., hlm. 332  
<sup>170</sup>Ibid., hlm. 376

disampaikan secara langsung kepada pemimpin kedua negara adi kuasa tersebut. Untuk menyampaikannya kepada Presiden Kennedy, konperensi mengutus Presiden Soekarno dan Presiden Madibo Keita. Dan kepada Krushchev, konperensi mengutus PM Nehru dan Presiden Kwame Nkrumah.<sup>171</sup>

Setelah melihat liku-liku KTT Nonblok I dari latar belakangnya sampai pada pelaksanaannya, jelas terlihat semakin besarnya perbedaan yang timbul di kalangan negara-negara nonblok. Sementara itu jurang perbedaan antara Indonesia dan India pun semakin lebar seiring dengan semakin tajamnya perbedaan pendapat antara Nehru dan Soekarno. Situasi yang tidak menguntungkan itu semakin melicinkan jalan ke arah memburuknya hubungan kedua negara. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan hubungan kedua negara menjadi buruk akan dibahas pada bab V berikut ini.

---

<sup>171</sup>Ibid., hlm. 339

BAB V  
HUBUNGAN INDONESIA DAN INDIA MEMBURUK  
(1962-1965)

Sejak tahun 1962, hubungan Indonesia dan India memburuk. Ada beberapa peristiwa yang menyebabkannya. Untuk menjelaskannya, maka berikut ini akan diuraikan mengenai:

- A. Kasus Asian Games IV Di Jakarta
- B. Sikap Indonesia Terhadap Perang RRC-India
- C. Sikap India Terhadap Konfrontasi Indonesia-Malaysia
- D. Pertentangan Indonesia Dan India Dalam KTT Nonblok II
- E. Kegagalan Konperensi Asia Afrika II

A. Kasus Asian Games IV Di Jakarta

Ketika Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Asian Games IV, Soekarno melihat hal itu dapat dijadikan sarana yang baik untuk memperlihatkan kebesaran Indonesia di bawah demokrasi terpimpin. Soekarno merencanakan untuk membuat penyelenggaraan pesta Asian Games tersebut semeriah mungkin. Untuk itu pemerintah Indonesia mendirikan kompleks olah raga baru yang didalamnya terdapat stadion yang berkapasitas 100.000 tempat duduk. Dan untuk pembangunannya Indonesia mendapat bantuan dari Uni Soviet sebanyak 12 juta dollar dari total biaya 17 juta dollar

Amerika.<sup>172</sup>

Sebelum pesta olah raga itu dibuka, panitia pelaksana Asian Games Indonesia mengalami suatu dilema. Federasi Asian Games dan panitia pelaksana Asian Games Indonesia bersengketa mengenai partisipasi atlet-atlet Taiwan dan Israel. Walaupun jaminan politik telah diberikan, namun seminggu sebelum pembukaan Asian Games, Taiwan dan Israel belum menerima undangan. Dalam hal ini panitia pelaksana tidak berdaya karena Kementerian Luar Negeri tidak bersedia mengeluarkan visa bagi kontingen Taiwan dan Israel yang dikatakannya berasal dari OLDEFOS. Lagi pula dalam kasus Israel, pandangan golongan Islam dan solidaritas terhadap negara-negara Arab harus diutamakan. Sedangkan dalam kasus Taiwan, pandangan golongan komunis Indonesia dan persahabatan dengan RRC juga harus diutamakan.<sup>173</sup>

Pada tanggal 21 Agustus 1962, seorang anggota Komite Pelaksana Federasi Asian Games dari Taiwan, Dr. Gunsun Hoh datang dari Bangkok ke Jakarta tanpa visa. Petugas imigrasi menolaknya masuk Indonesia tanpa visa dan memerintahkan untuk segera meninggalkan Indonesia. Dua jam kemudian Dr. Gunsun Hoh terpaksa kembali ke Bangkok. Di Bangkok Dr. Gunsun Hoh membuat pernyataan yang mencela tindakan pemerintah Indonesia yang telah melanggar Piagam Asian Games. Akibat insiden itu, pemerintah Israel mena-

<sup>172</sup>Ibid., hlm. 513

<sup>173</sup>Michael Leifer, *op. cit.*, hlm. 103

rik diri dari keikutsertaannya dalam Asian Games IV. Komite Olimpiade Internasional (IOC) menarik perlindungannya atas pesta olah raga tersebut. Dan Federasi Atletik Amatir Internasional (IAAF) mengancam akan menarik pengakuannya jika visa tidak diberikan. <sup>174</sup>

Dalam kenyataannya Asian Games IV tetap dibuka sesuai dengan rencana. Pada tanggal 24 Agustus 1962, Presiden Soekarno secara resmi membuka Asian Games IV. Ternyata masalah tersebut di atas belumlah selesai. M.N. Sondhi, Wakil Presiden Federasi Asian Games yang berkebangsaan India tidak setuju dengan tindakan pemerintah Indonesia yang mencampuradukan olah raga dan politik. Sondhi berusaha untuk menghapuskan status AG tersebut. Kemudian Sondhi mengajukan suatu memorandum kepada Komite Eksekutif Federasi Asian Games yang isinya mengusulkan agar Asian Games yang sedang berlangsung diganti namanya menjadi "Kompetisi Internasional" dan rekor yang dibuat tidak diakui sebagai rekor Asian Games. Sementara masih dipertimbangkan oleh Komite Eksekutif Asian Games, usulan Sondhi tersebut bocor kepada pers sehingga menimbulkan kegemparan. <sup>175</sup>

Usulan Sondhi tersebut dianggap sebagai penghinaan pribadi Presiden Soekarno dan bangsa Indonesia. Demonstrasi menentang Sondhi segera muncul di Jakarta. Karena dia

---

<sup>174</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 513-514  
<sup>175</sup>*Ibid.*, hlm. 514-515

berkebangsaan India, maka kaum demonstran berasumsi bahwa tindakannya diinspirasi oleh pemerintah India. Kedutaan India di Jakarta diserang para demonstran sehingga menimbulkan kerusakan di sana sini. Para demonstran kemudian menuju Hotel Indonesia tempat Sondhi menginap. Demi keselamatan dan keamanannya, Sondhi diperintahkan untuk meninggalkan Indonesia.<sup>176</sup>

Pemerintah India melancarkan protes kepada pemerintah Indonesia atas kejadian tersebut. Dikemukakan bahwa tindakan Sondhi bukan atas nama pemerintah India tetapi sebagai Wakil Presiden Federasi Asian Games. Protes India tersebut tidak begitu ditanggapi. Dan setiap kali atlet India muncul di lapangan, mereka menjadi bahan ejekan dan cemoohan penonton. Demikian halnya ketika upacara penutupan Asian Games IV, para atlet dan bendera India begitu diremehkan.<sup>177</sup>

PM Nehru mengerti bahwa semuanya itu akibat dari perubahan politik luar negeri Indonesia dan kuatnya pengaruh PKI yang berusaha menjauhkan Indonesia dari India. Pemerintah Indonesia juga tidak pernah secara nyata mengutuk tindakan para demonstran yang merusak kedutaan India di Jakarta. Bahkan pemerintah Indonesia dapat memahami mengapa masyarakat begitu marah atas tindakan Sondhi tersebut. Sikap pemerintah Indonesia itu

---

<sup>176</sup>Ibid., hlm. 515-516

<sup>177</sup>Ibid., hlm. 516

semakin jelas dengan dikeluarkannya suatu pernyataan yang isinya antara lain menyatakan :

"...sejak mengetahui adanya usaha untuk menggagalkan Asian Games, yang merupakan suatu penghinaan terhadap Presiden Soekarno, kemarahan timbul dikalangan masyarakat. Front Nasional sebagai organisasi massa terpaksa menyalurkan kemarahan supaya tidak terlalu menimbulkan kegemparan. Karena kemarahan tak tertahan, demonstrasi memuncak pada tanggal 3 September yang ditujukan untuk memberikan suatu pernyataan yang membela kehormatan kepala negara, dan menyerukan kepada seluruh bangsa Asia untuk menjaga persahabatan di antara mereka, dan menjamin kelangsungan Asian Games IV....".<sup>178</sup>

Kejadian yang tidak mengenakkan tersebut mengakibatkan semakin dinginnya hubungan antara Indonesia dan India. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kasus tersebut di atas sudah dapat dikira oleh pemerintah Indonesia. Dalam sidangnya pada tanggal 7 Februari 1963 di Lausanne, Komite Olimpiade Internasional menskors Indonesia dari pertandingan Olimpiade sehingga tidak bisa ikut dalam Olimpiade di Tokyo tahun 1964. Tindakan IOC tersebut ditafsirkan Soekarno sebagai gagasan imperialis dan sebagai pembenaran atas garis revolusi NEFOS. Sebagai tantangan balasan terhadap IOC, Soekarno mensponsori suatu pesta olah raga yang bersifat revolusioner yang dinamakannya Games of the New Emerging Forces (GANEFO). Pesta olah raga ini dibuka pada tanggal 10 November 1963 di Jakarta dengan diikuti oleh 51 negara yang tergolong dalam NEFOS di Asia, Afrika, Amerika Latin dan negara-negara sosialis

---

<sup>178</sup> Ibid.

di Eropa. India tidak termasuk negara yang diundang. Dengan partisipan yang cukup memadai itu, maka boleh dikatakan usaha-usaha politik dalam GANEFO cukup berhasil. Apalagi dalam hal ini Indonesia dibantu sepenuhnya oleh RRC.<sup>179</sup>

B. Sikap Indonesia Terhadap Perang RRC-India

Gagalnya perundingan Nehru dan Chou En lai pada bulan April 1960 membuat hubungan kedua negara menjadi semakin kritis. Panchsheel nampaknya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Aktivitas tentara kedua negara di perbatasan semakin meningkat. Pada awal bulan September 1962, tentara RRC menyeberangi jembatan Thagla di sebelah barat NEFA dan mendirikan pos di sana. Konflik senjata kecil-kecilan di sepanjang perbatasan semakin sering terjadi. Perang besar semakin sulit dihindari. Pada tanggal 20 Oktober 1962, tentara RRC melakukan serangan besar-besaran di Ladakh dan NEFA.<sup>180</sup> Lemahnya pertahanan tentara India menyebabkan tentara RRC dengan mudah masuk ke wilayah India khususnya di NEFA. Menghadapi kenyataan itu, India meminta bantuan kepada Inggris, Amerika dan Uni Soviet. Inggris dan Amerika memberi bantuan senjata kepada

---

<sup>179</sup> Michael Leifer, op. cit., hlm. 104; lihat juga Ewa T. Pauker, "Ganefo I: Sports and Politics in Jakarta", Asian Survey, Vol. 5, No. 4, April 1965, hlm. 171-185

<sup>180</sup> W.J. Barnds, op. cit., hlm. 174-175

India. Sedangkan Soviet hanya mengirimkan penasihat militernya ke India. <sup>181</sup>

Pada tanggal 24 Oktober 1962, RRC mengusulkan gencatan senjata dan menarik mundur tentara kedua belah pihak sejauh 20 Km dari garis yang dikuasai sekarang. India menolak usulan RRC tersebut karena sangat merugikan posisinya. Tentara dan peralatan perang terus mengalir ke front di Ladakh dan NEFA. Pada Tanggal 16 Nopember 1962, tentara RRC kembali mengadakan serangan besar dan masuk jauh ke dalam wilayah India. Kota Bomdila diduduki dan tentara RRC bergerak terus sampai mendekati lembah sungai Brahmaputra. Namun secara tiba-tiba pada tanggal 21 Nopember 1962, RRC mengumumkan penarikan tentaranya sejauh 20 Km di belakang garis batas yang mereka kuasai pada tanggal 7 Nopember 1959. India kemudian menerima jarak 20 Km sebagai sebagai garis demarkasi. Penerimaan itu mengakibatkan India tidak bisa lagi mengontrol daerah Aksai Chin di Ladakh. <sup>182</sup>

Agresi RRC terhadap India menimbulkan pengaruh yang besar terhadap negara-negara Asia dan nonblok. Berbagai reaksi timbul menanggapi masalah tersebut. Di antara negara-negara nonblok yang ikut dalam konperensi di Beograd, hanya Siprus yang secara terang-terangan meny-

---

<sup>181</sup> Robert L. Hardgrave, Jr., India: Government and Politics in a Developing Nations (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980), hlm. 249

<sup>182</sup> W.J. Barnds, op. cit., hlm. 175-176

kong India dan mengutuk RRC sebagai agresor. Malaya yang tidak termasuk kelompok negara-negara nonblok juga melakukan hal yang sama dengan Siprus. Sedangkan negara-negara nonblok lainnya (termasuk Indonesia) hanya berdiam diri saja. Bahkan mereka cenderung mengisolasi India yang dianggapnya telah meninggalkan prinsip nonblok karena menerima bantuan senjata dari Amerika dan Inggris serta penasihat militer dari Soviet. Berdasarkan Deklarasi Kepala Negara dan Pemerintahan Negara-Negara Nonblok di Beograd, negara-negara tersebut seharusnya mengutuk agresi RRC dan mencari jalan untuk mengakhiri permusuhan serta secepat mungkin membawa pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan.<sup>183</sup>

Setelah perang selesai, atas prakarsa PM Srilanka (Ny. Bandaranaike), diselenggarakan suatu konperensi yang dihadiri oleh enam negara nonblok. Konperensi itu diselenggarakan di Kolombo pada tanggal 10-12 Desember 1962. Perwakilan dari Mesir, Ghana, Birma, Kamboja, Indonesia dan Srilanka bertemu untuk membahas dan mencari jalan agar konflik RRC-India dapat diselesaikan dengan cara damai. Namun dalam konperensi tersebut sebagian besar peserta enggan mengutuk RRC sebagai agresor. Jenderal Ne Win dari Birma menyatakan bahwa konperensi tidak bermaksud untuk mengutuk salah satu pihak tetapi untuk menemukan

---

<sup>183</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 360-361

penyelesaian konflik secara damai. Sejalan dengan pernyataan Ne Win tersebut, Subandrio meminta agar konperensi jangan mencampuri terlalu jauh konflik RRC-India. Hanya delegasi Mesir yang mendukung India dengan mengusulkan suatu gencatan senjata total dan penarikan tentara RRC sampai ke garis 8 September 1962.<sup>184</sup>

Karena adanya perbedaan sikap dalam menanggapi konflik RRC-India, maka proposal yang dihasilkan merupakan hasil kompromi. Isi proposal itu antara lain menyangkut penarikan tentara kedua belah pihak dari wilayah yang dipersengketakan dan diselenggarakan suatu pemerintahan sipil gabungan di wilayah itu. Proposal tersebut disampaikan sendiri oleh Ny. Bandaranaike kepada Nehru dan Chou En Lai. Pemerintah India menyatakan bersedia menerima proposal tersebut jika pemerintah RRC juga menerimanya tanpa syarat. Pemerintah RRC menyatakan "pada prinsipnya" menerima proposal tersebut. Namun kenyataannya proposal tersebut tidak pernah ditaati oleh RRC sehingga India pun tidak sudi menerimanya.<sup>185</sup> Proposal konperensi tersebut akhirnya tidak berarti apa-apa. Konperensi yang mereka laksanakan boleh dikatakan gagal.

Sementara itu, Indonesia semakin menjauhi India seiring dengan semakin dekatnya hubungannya dengan RRC. Ketika Ny. Bandaranaike berkunjung ke Peking untuk me-

---

<sup>184</sup>Ibid., hlm. 362

<sup>185</sup>Ibid., hlm. 364

nyampaikan proposal konperensi, Subandrio juga berkunjung ke sana tetapi dengan maksud yang berbeda. Subandrio ke Peking untuk menjelaskan kepada pemerintah RRC bahwa posisi Indonesia dalam konperensi tersebut adalah netral. Penjelasan itu diberikan karena Indonesia khawatir pemerintah RRC salah mengerti mengenai partisipasi Indonesia dalam konperensi tersebut.<sup>186</sup>

Posisi netral Indonesia dalam konflik RRC-India sangat menguntungkan RRC. Posisi netral tersebut merupakan pengingkaran terhadap jasa baik India kepada Indonesia semasa revolusi kemerdekaan dan dukungan konsisten India terhadap tuntutan Indonesia atas Irian Barat. Dan dalam konperensi enam negara nonblok yang mengalami kegagalan itu terlihat bahwa sebenarnya Indonesia hanya berpura-pura saja mengulurkan jasa baiknya kepada pihak-pihak yang bertikai.<sup>187</sup> Motivasi utama Indonesia adalah agar partisipasi Indonesia dihargai oleh dunia internasional.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap Indonesia tersebut. Faktor pertama adalah perbedaan pendapat antara Nehru dan Soekarno dalam KTT Nonblok I mengakibatkan hubungan kedua negara semakin retak. Faktor kedua adalah semakin kuatnya pengaruh PKI sehingga pemerintah Indonesia lebih mendukung RRC dalam hal itu. Faktor ketiga adalah kasus Asian Games IV di mana tindakan

---

<sup>186</sup>

<sup>187</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> Michael Leifer, *op. cit.*, hlm. 105

Sondhi dianggap sebagai penghinaan terhadap Presiden Soekarno dan bangsa Indonesia. Dan faktor keempat adalah semakin eratnya hubungan Indonesia dan RRC karena kedua negara ini mempunyai kesamaan terutama dalam politik luar negerinya.<sup>188</sup>

C. Sikap India Terhadap Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Kembalinya Irian Barat ke pangkuan Indonesia ternyata tidak mengakhiri politik konfrontasi Indonesia. Sasaran berikutnya adalah Malaysia. Pada tanggal 27 Mei 1961, Tengku Abdul Rachman mengemukakan suatu gagasan untuk membentuk Federasi Malaysia yang meliputi Malaya, Singapura dan wilayah-wilayah jajahan Inggris di Kalimantan Utara (Serawak, Sabah dan Brunai). Pada bulan Nopember 1961, Indonesia melalui Menlu Subandrio menyatakan tidak mempunyai tuntutan apapun terhadap wilayah-wilayah di Kalimantan Utara dan menegaskan bahwa Indonesia tidak berkeberatan dengan pembentukan Federasi Malaysia.<sup>189</sup>

Pernyataan Subandrio tersebut tidaklah bebas sama sekali dari unsur keberatan. Penolakan atas pembentukan Malaysia akan mengakibatkan hilangnya dukungan banyak negara terhadap Indonesia dalam masalah Irian Barat. Satu-satunya oposisi terang-terangan terhadap pembentukan

---

<sup>188</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, op. cit., hlm. 362  
<sup>189</sup>John D. Legge, op. cit., hlm. 415-416

Malaysia datang dari PKI. Federasi baru tersebut digambarkan sebagai suatu konsentrasi kekuatan kolonial baru di garis perbatasan Indonesia dan merupakan suatu intrik kolonial yang tidak dapat diterima. PKI mempunyai anti-pati yang lumrah terhadap bakal calon Malaysia yang digambarkannya sebagai benteng terhadap komunisme di Asia Tenggara.<sup>190</sup>

Namun peristiwa yang tak terduga muncul. Pada tanggal 8 Desember 1962, di Brunai terjadi pemberontakan menentang pembentukan Federasi Malaysia. Pemberontakan ini dipimpin oleh A.M. Azahari ketua Partai Rakyat Brunai. Dengan didukung oleh massa rakyat, Partai Rakyat mengumumkan ketidaksetujuannya terhadap masuknya Kesultanan Brunai ke dalam Malaysia dan mengajukan suatu alternatif untuk membentuk suatu negara merdeka di Kalimantan Utara yang dahulu pernah menjadi Kesultanan Brunai. Pemberontakan itu berumur pendek. Perlawanan efektif dapat dipadamkan hanya dalam waktu seminggu.<sup>191</sup>

Pemberontakan itu menarik simpati berbagai pihak di Indonesia. Dalam pernyataan awal tentang dukungannya terhadap pemberontakan itu, Soekarno menyatakan :

"Kami lahir dalam pertempuran. Kami tidak lahir dalam sinar bulan purnama seperti bangsa lain. Ada bangsa-bangsa lain yang kemerdekaannya dihadiahkan kepada mereka. Ada bangsa lain yang tanpa upaya apapun dibe-

---

<sup>190</sup>Michael Leifer, *op. cit.*, hlm. 113

<sup>191</sup>J.A.C. Mackie, Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia dispute 1963-1966 (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974), hlm. 120-121

rikan kemerdekaannya oleh imperialis sebagai suatu hadiah. Tidak kita, kami berjuang bagi kemerdekaan kami dengan penuh pengorbanan. Kami memperoleh kemerdekaan kami melalui suatu perjuangan mati-matian yang tak ada bandingannya di dunia ini".<sup>192</sup>

Komentar yang diberikañ oleh PM Malaya yang secara tidak langsung menuduh keterlibatan Indonesia dalam pemberontakan itu menimbulkan agitasi yang semakin tinggi. Soekarno kemudian menegaskan kembali dukungannya bagi perjuangan rakyat Kalimantan Utara yang dikatakannya sebagai mewakili "sikap tegas rakyat Indonesia terhadap kolonialisme, imperialisme". Pada tanggal 20 Januari 1963, Subandrio mengumumkan "konfrontasi" terhadap Malaysia yang dikatakannya sebagai antek imperialis dan telah menimbulkan rasa permusuhan terhadap Indonesia.<sup>193</sup>

Pada pertengahan bulan Februari 1963, Soekarno secara eksplisit menjelaskan oposisinya terhadap pembentukan Malaysia. Dikatakannya :

"Mengapa kami menentangnya ? Karena Malaysia merupakan manifestasi neokolonialisme. Kami tidak ingin neokolonialisme di sekitar kami. Kami menganggap Malaysia sebagai pengepungan Republik Indonesia. Malaysia merupakan produk pikiran dan usaha neokolonialisme. Bersama dengan itu perhatikan kata-kata saya, Malaysia akan menjamin karet untuk imperialis, dan Malaysia akan menjamin minyak untuk imperialis. Untuk alasan ini kita dengan tekad bulat menentang Malaysia tanpa syarat apapun".<sup>194</sup>

Diplomasi paksaan sebagaimana halnya yang pernah diperbuat dalam masalah Irian Barat, juga dipergunakan

<sup>192</sup>Michael Leifer, *op. cit.*, hlm. 111

<sup>193</sup>*Ibid.*, hlm. 115-116

<sup>194</sup>George Modelski (ed.), The New Emerging Forces Documents on the Indonesian Foreign Policy (Canberra : Australian National University, 1963), hlm. 74-75



dalam masalah Malaysia. Meski begitu, Soekarno juga melakukan diplomasi kawasan dengan Filipina. Pertemuan ECAFE pada bulan Maret 1963 merupakan jembatan awal untuk merintis pertemuan ketiga kepala pemerintahan yang berkepentingan atas Kalimantan Utara. Pada akhir bulan Mei 1963, setelah mengadakan pertemuan dengan Macapagal di Manila, Soekarno bertemu dengan Tengku Abdul Rahman di Tokyo. Dari pertemuan itu diperoleh kesepakatan untuk mengadakan pertemuan tiga kepala pemerintahan Indonesia, Filipina dan Malaya. Pertemuan itu dilaksanakan di Manila pada akhir bulan Juli 1963.<sup>195</sup>

Pertemuan itu menghasilkan Manila Summit Statemen dan Deklarasi Manila yang isinya :

1. Menyetujui prinsip penentuan pendapat rakyat Sabah dan serawak di bawah pengawasan Sekjen PBB yang ditangani oleh panitia kerja. Panitia kerja mengikutsertakan peninjau dari Indonesia, Filipina dan Malaya.
2. Penyatuan Sabah ke dalam Malaysia tidak akan dihalangi. Dan Inggris diminta untuk mencari jalan yang adil bersama Filipina mengenai masalah Sabah.
3. Sesuai dengan semangat Bandung, tidak dibenarkan negara-negara asing mencampuri upaya kemerdekaan dari ketiga negara.
4. Ketiga negara sebagai kekuatan yang baru muncul akan bekerjasama untuk membangun dunia baru yang lebih baik berlandaskan pada kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi.<sup>196</sup>

Namun deklarasi itu tidak bertahan lama. Soekarno menuduh Malaya melanggar persetujuan yang telah disepakati bersama. Ada dua masalah yang menyebabkannya.

---

<sup>195</sup>Michael Laifer, *op. cit.*, hlm. 123-128

<sup>196</sup>Frans S. Fernandes, *op. cit.*, hlm. 159-160

Pertama, tuntutan Indonesia untuk mengirim sepuluh peninjau ke Sabah dan Serawak tidak dipenuhi. Inggris hanya memberikan 4 visa untuk peninjau Indonesia. Perlakuan itu ditafsirkan sebagai tindakan untuk mencegah penelitian yang jujur berdasarkan persetujuan. Masalah kedua menyangkut pengumuman berdirinya Malaysia sebelum selesainya penelitian PBB. Pada tanggal 29 Agustus 1963, Tengku Abdul Rachman mengumumkan bahwa Malaysia akan diresmikan berdirinya pada tanggal 16 September 1963, yaitu sebelum misi PBB selesai dengan pekerjaannya.<sup>197</sup>

Meskipun pada akhirnya Sekjen PBB melaporkan bahwa tak ada keraguan mengenai keinginan rakyat Sabah dan Serawak untuk bergabung dengan Malaysia, Soekarno tetap tidak dapat menerimanya. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta. Kedutaan Inggris dan Malaya menjadi sasaran ketidakpuasan massa. Bahkan harta milik Inggris (sebagaimana halnya Belanda dahulu) disita. Di samping itu, kegiatan gerilyawan di Kalimantan Utara semakin ditingkatkan. Dan infiltrasi sukarelawan-sukarelawan Indonesia semakin banyak.<sup>198</sup>

Tindakan kekerasan yang dilancarkan tidak banyak memperoleh hasil karena Inggris, Malaysia, Australia dan Selandia Baru telah bersiaga di daerah itu. Selain itu,

---

<sup>197</sup> John D. Legge, Sukarno, Sebuah Biografi Politik (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 422

<sup>198</sup> Ibid., hlm. 423

Indonesia telah gagal mendapatkan dukungan dari Moskow. Amerika juga memberikan sangsi ekonomi dengan penundaan bantuan-bantuan baru. Jepang dan IMF juga mengikuti langkah Amerika dengan menunda pemberian bantuan baru.<sup>199</sup>

Untuk mencari penyelesaian secara damai, pada tanggal 13 Januari 1964, Washington mengutus Jaksa Agung Robert Kennedy untuk menemui Soekarno di Tokyo. Dalam pertemuan itu Robert Kennedy sangat menekankan peranan terbatas yang dapat dimainkan oleh pemerintahnya dan setiap masalah Asia harus mampu untuk dipecahkan oleh negara-negara Asia sendiri. Selanjutnya Robert Kennedy ke Kuala Lumpur untuk bertemu dengan Tengku Abdul Rachman. Dari sana ia ke Jakarta dan Manila. Pertemuannya di Jakarta menghasilkan kesediaan Indonesia untuk melakukan gencatan senjata.<sup>200</sup>

Pada tanggal 5-10 Februari 1964, Soekarno mengirim Menlu Subandrio ke Bangkok untuk membicarakan perihal penarikan pasukan dari Kalimantan Utara. Indonesia mau menarik pasukannya jika Deklarasi Manila ditaati. Sikap Indonesia yang berpegang teguh pada deklarasi Manila itu menyebabkan pertemuan itu mengalami kegagalan. Kekecewaan Soekarno bertambah besar ketika mengetahui bahwa Filipina telah membuka hubungan dengan Malaysia.<sup>201</sup>

---

<sup>199</sup>Michael Leifer, *op. cit.*, hlm. 133-135  
<sup>200</sup>*Ibid.*, hlm. 137-138  
<sup>201</sup>*Ibid.*, hlm. 138-140

Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan pidato "Dwikora" (Dwi Komando Rakyat) yang isinya : (1) Perhebat ketahanan revolusi Indonesia; (2) Bantulah perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunai untuk memerdekakan diri dan membubarkan Malaysia.<sup>202</sup>

Meskipun begitu, pada tanggal 21 Juni 1964 Soekarno masih bersedia melakukan perundingan dengan Tengku Abdul Rachman. Perundingan itu berlangsung di Tokyo dengan Presiden Macapagal sebagai mediatornya. Presiden Macapagal mengusulkan untuk membentuk komisi perdamaian Asia-Afrika. Sementara itu Tengku Abdul Rachman mengajukan syarat agar gerilyawan Indonesia harus ditarik sebelum masuk meja perundingan. Syarat Tengku Abdul Rachman itu menyebabkan perundingan mengalami kegagalan.<sup>203</sup> Kegagalan demi kegagalan yang dialami menyebabkan konfrontasi semakin meningkat.

Politik konfrontasi ternyata merusak prestise Indonesia di kalangan negara Asia-Afrika. Dalam hal ini, India secara terang-terangan mendukung pembentukan Malaysia dan mengecam politik konfrontasi yang dilancarkan Indonesia terhadap Malaysia. Sikap India itu dapat dipahami karena pada saat terjadi perang RRC-India, Malaya dengan lantang

---

<sup>202</sup>G. Moedjanto, Indonesia Abad Ke-20 II (Yogyakarta : Kanisius, 1988), hlm. 119

<sup>203</sup>John D. Legge, op. cit., hlm. 423

mengutuk agresi RRC dan mendukung India sepenuhnya dalam konflik tersebut. Sedangkan Indonesia pada waktu itu hanya berdiam diri saja bahkan sebenarnya secara diam-diam mendukung RRC. Oleh karena itu RRC mendukung Indonesia dalam konfrontasinya dengan Malaysia.<sup>204</sup>

Dalam KTT Nonblok II di Kairo, politik konfrontasi terhadap Malaysia tidak mendapat dukungan penuh dari negara-negara peserta. Gencarnya tantangan dari delegasi India menyebabkan usaha Indonesia untuk memasukkan masalah Malaysia ke dalam komunique akhir konperensi mengalami kegagalan.<sup>205</sup> Dukungan India terhadap Malaysia tidak berhenti hanya sampai di situ. Dalam konperensi persiapan KAA II di Jakarta pada bulan April 1964, India mengusulkan agar Malaysia diundang dalam KAA II yang akan datang. Indonesia dengan tegas menolak usulan tersebut. Akan tetapi banyak negara menginginkan Malaysia hadir dalam konperensi tersebut.<sup>206</sup> Akibat sikap India tersebut, hubungan kedua negara bertambah buruk.

Sementara itu, pada tanggal 30 Desember 1964, Malaysia disahkan menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PBB untuk masa satu tahun.<sup>207</sup> Hal itu merupakan suatu pukulan bagi Indonesia. Karena itu Indonesia dengan gagah berani pada tanggal 7 Januari 1965 menyatakan keluar dari

---

<sup>204</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 518-519

<sup>205</sup>L.P. Singh, *op. cit.*, hlm. 661-662

<sup>206</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 529-530

<sup>207</sup>Michael Leifer, *op. cit.*, hlm. 148

PBB. Keputusan Indonesia itu sangat didukung oleh RRC. Dalam pernyataan bersama di Peking pada tanggal 28 Januari 1965, Subandrio dan Chen Yi menyatakan bahwa PBB tidak lagi dapat mewakili sikap anti imperialisme dan anti kolonialisme bangsa-bangsa di dunia. Di samping itu dinyatakan juga bahwa organisasi PBB tidak dapat mewakili kekuatan-kekuatan yang baru bangkit dan revolusioner. Oleh karena itu Presiden Soekarno merencanakan untuk menyelenggarakan Conference of the New Emerging Forces (CONEFO) sebagai tandingan PBB. Rencana Presiden Soekarno itu sangat didukung oleh RRC. CONEFO tersebut direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Agustus 1966. Para pesertanya adalah negara-negara yang dianggap atau menyatakan diri sebagai kekuatan NEFOS.<sup>208</sup> Keluar dari PBB menyebabkan Indonesia semakin terkucil dari pergaulan internasional. CONEFO pun akhirnya tidak pernah terselesaikan seiring dengan terjadinya perubahan iklim politik di Indonesia setelah gagalnya G 30 S/PKI. Dan konfrontasi dengan Malaysia dihentikan pada bulan Agustus 1966. Dengan demikian berakhirlah era politik konfrontasi Indonesia.

---

<sup>208</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 534-535

D. Pertentangan Indonesia Dan India Dalam KTT Nonblok II

Baru saja enam bulan berselang setelah KTT Nonblok I di Beograd berakhir, Soekarno kembali menyuarakan perlunya Konperensi Asia Afrika II. Adanya ambisi untuk menjadi pemimpin negara-negara Asia-Afrika dan desakan untuk menyebarkan doktrin NEFOS versus OLDEFOS merupakan alasan kuat bagi Presiden Soekarno untuk menyelenggarakan KAA II. Gagasan Soekarno itu mendapat sambutan hangat dari pemerintah RRC karena lewat KAA II RRC dapat menanamkan pengaruhnya di kawasan Asia Afrika. Sejalan dengan kepentingan itu, dalam perlawatannya ke negara-negara Afrika tahun 1962 Chou En Lai mengajak negara-negara Afrika untuk mendukung KAA II. Ajakan Chou En Lai tersebut mendapat sambutan yang cukup hangat dari negara-negara yang dikunjunginya.<sup>209</sup>

Sekali lagi Nehru menentang diadakannya konperensi semacam itu. Kali ini Nasser sependapat dengan Nehru. Mereka menganggap tidak tepat waktunya dan tidak ada gunanya menyelenggarakan konperensi semacam itu. Menurut pendapat mereka konperensi semacam itu dapat membahayakan detente yang mulai timbul dalam hubungan kedua negara adi kuasa, jika saja kelompok militan melontarkan perasaan anti Barat dalam konperensi itu.<sup>210</sup>

Hanya Tito yang punya keinginan menyelenggarakan KTT

---

<sup>209</sup> Ibid., hlm. 343-344

<sup>210</sup> M. Sabir, Quo Vadis ..., hlm. 75

Nonblok II. Alasannya bukan karena India salah satu negara nonblok diserang oleh RRC pada tahun 1962, dan tidak pula karena memburuknya keadaan dunia seperti halnya ketika diadakannya KTT Nonblok I, tetapi semata-mata didorong oleh kepentingannya sendiri untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan Washington. Sikap Tito yang anti Barat dalam KTT Nonblok I mengakibatkan Amerika Serikat menghentikan segala macam bantuan termasuk bantuan bahan makanan yang sangat dibutuhkan Yugoslavia. Tito memerlukan dukungan negara-negara nonblok untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan Washington.<sup>211</sup>

Untuk mencegah kemungkinan fait accompli Soekarno-Chou En Lai yang sudah bertekad bulat menyelenggarakan KAA II, Nehru dan Nasser akhirnya mengubah pendiriannya. Setelah berkesimpulan bahwa konperensi negara-negara nonblok lebih baik dari KAA, mereka memberi lampu hijau kepada Tito untuk meneruskan usahanya memprakarsai KTT Nonblok II.<sup>212</sup>

Tidak begitu sulit untuk memahami keprihatinan Nehru terhadap KAA II. Dalam konperensi itu RRC akan ambil bagian. India dihadapkan pada posisi sulit dalam menghadapi RRC yang baru saja dengan sewenang-wenang melakukan agresi terhadap wilayahnya. Lagi pula India harus berhadapan dengan Pakistan yang semakin akrab dengan RRC yang

---

<sup>211</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *loc. cit.*  
<sup>212</sup>*Ibid.*, hlm. 344

merangkulnya dengan menyelesaikan masalah garis perbatasan atas dasar pengakuan garis McMahon. Padahal garis McMahon itu ditolak RRC dalam menyelesaikan tapal batasnya dengan India. Dan atas dasar yang sama RRC juga menyelesaikan sengketa tapal batasnya dengan Birma. Dalam hal ini RRC sengaja membuat hubungan India dengan para tetangganya menjadi retak dan menarik negara-negara itu supaya lebih dekat dengan Peking. Negara-negara itu tidak lagi memandang RRC sebagai bahaya potensial bagi keamanan negaranya. Sedangkan Indonesia yang dulunya sahabat India kini juga telah masuk ke orbit RRC.<sup>213</sup>

Perkembangan tersebut mendorong India meningkatkan diplomasinya sedemikian rupa agar KAA II mengalami kegagalan dan KTT Nonblok II dapat terlaksana. Dalam KTT Nonblok II tentunya RRC tidak dapat hadir. India kemudian mengirimkan utusannya ke negara-negara Afrika dalam upaya mengimbangi utusan RRC dan melobi pemimpin negara-negara tersebut terhadap keinginan Nehru. Dalam usaha itu, dukungan Nasser sangat menentukan. India sangat berambisi untuk menggagalkan KAA II yang direncanakan oleh Soekarno dan Chou En Lai. Demi ambisi tersebut India berani menawarkan diri sebagai tuan rumah KTT Nonblok II, jika diperlukan.<sup>214</sup>

Dalam pertarungan diplomasi antar para pendiri ge-

---

<sup>213</sup>Ibid., hlm. 344-345

<sup>214</sup>M.Sabir, *Quo Vadis . . .*, hlm. 76

rakan nonblok, PM Srilanka Ny. Bandaranaike akhirnya dapat diajak ikut serta memprakarsai konperensi itu. Ny. Bandaranaike menyetujuinya dengan syarat agar konperensi persiapan diselenggarakan di Kolombo. Bagi Nehru hal itu sudah lebih dari cukup. KTT Nonblok II akhirnya disponsori oleh Mesir dengan Srilanka sebagai ko-sponsornya. Nasser dan Ny. Bandaranaike kemudian mengirim undangan kepada negara-negara nonblok dari berbagai corak dan bentuk untuk menjamin partisipasi yang lebih luas.<sup>215</sup>

Nasser kemudian mengirim surat kepada Soekarno dan Chou En Lai untuk menjelaskan bahwa bagi Mesir KTT Nonblok II mempunyai prioritas yang lebih besar dari pada KAA II. Suatu catatan dibuat oleh Nasser untuk Soekarno bahwa tidak ada peluang untuk mengadakan KAA II pada tahun 1964 karena KTT negara-negara Afrika akan diadakan di Kairo pada bulan juli 1964 dan pada bulan Agustus 1964 akan diadakan pula konperensi negara-negara Arab II.<sup>216</sup>

Soekarno marah sekali atas penolakan itu. Rasa frustrasi dan kemarahannya tercermin dalam pernyataan Menteri Penerangan Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia tidak bersedia menghadiri KTT Nonblok karena Indonesia menganggap KAA lebih penting.<sup>217</sup> Bagaimanapun juga Soekarno harus menerima kenyataan pahit tersebut. Diterima salah,

---

<sup>215</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 346

<sup>216</sup>*Ibid.*

<sup>217</sup>G.H. Jansen, *op. cit.*, hlm. 375

ditolak pun salah. KTT Nonblok II mau tidak mau tentu akan memojokkan KAA II. Jika tidak hadir dikuatirkan akan mengakibatkan berkurangnya peserta yang hadir dalam KAA II nanti. Dan jika hadir dikuatirkan KAA II akan gulung tikar. Setelah dipertimbangkan matang-matang, diputuskan Indonesia menghadiri KTT Nonblok II tetapi tidak menghentikan usaha mengadakan KAA II. Dengan hati berat Indonesia mengirimkan wakilnya ke Kolombo untuk menghadiri konperensi persiapan.<sup>218</sup>

Konperensi persiapan diadakan pada bulan Maret 1964. Konperensi itu dihadiri oleh kurang lebih 65 negara yang memenuhi undangan Nasser dan Ny. Bandaranaike. Masalah yang dibicarakan meliputi tempat dan tanggal pelaksanaan konperensi, agenda konperensi, dan daftar peserta konperensi. Kota Kairo ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan KTT Nonblok II. Peserta konperensi diupayakan sebanyak mungkin. Maka lebih dari 80 negara diundang dalam KTT Nonblok II. Sedangkan agendanya hanya menyangkut masalah-masalah dunia secara umum. Proposal yang cukup bernilai untuk dibicarakan datang dari delegasi Yugoslavia yang menginginkan adanya usaha ke arah peraturan yang lebih mendetil tentang arti hidup berdampingan secara damai dan kearah pemasukan prinsip-prinsipnya ke dalam Piagam PBB. Proposal Indonesia untuk membicarakan

---

<sup>218</sup> M. Sabir, Quo Vadis ..., hlm. 76

tentang kemungkinan untuk mengadakan konperensi bagi kekuatan yang baru muncul (NEFOS) telah ditolak. Namun Indonesia masih terhibur dengan dimasukkannya ke dalam agenda diskusi tentang peranan dari kekuatan nasionalis yang baru muncul dalam masalah-masalah internasional.<sup>219</sup>

KTT Nonblok II yang diadakan di Kairo pada tanggal 5-10 Oktober 1964 dihadiri oleh 47 peserta penuh dan 10 peninjau. KTT Nonblok II dibuka dalam suasana yang sangat berbeda dengan KTT Nonblok I tiga tahun sebelumnya. Pertama, ketidakhadiran Nehru merupakan suatu kehilangan besar. Nehru meninggal lima bulan sebelumnya yaitu tanggal 4 Mei 1964. Dan penggantinya Lal Bahdur Shastri baru untuk pertama kalinya menghadiri pertemuan sebesar itu. Dengan kematian Nehru, Krishna Menon juga meninggalkan kancah politik di India. Akibatnya India tampil dengan delegasi yang benar-benar baru. Kedua, situasi politik internasional telah berubah. KTT Nonblok I diadakan ketika memuncaknya Krisis Berlin dan terjadinya pembatalan secara unilateral perjanjian percobaan senjata nuklir yang diikuti dengan percobaan peledakan 50 megaton bom nuklir Soviet. Sedangkan KTT Nonblok II diadakan dalam suasana yang lebih aman ketika detente antara kedua negara adi kuasa sedang berkembang dan perjanjian testban telah ditandatangani di Moskow. Tidak ada masalah inter-

---

<sup>219</sup>G.H. Jansen, loc. cit.

nasional yang terlalu dikuatirkan.<sup>220</sup>

Situasi itu memberi peluang kepada Presiden Soekarno untuk mendominasi konperensi dengan memaparkantesisnya mengenai kekuatan yang baru muncul (NEFOS) dan perjuangannya melawan semua bentuk kolonialisme, imperialisme dan neokolonialisme. Dalam pidatonya yang berjudul *Masa Konfrontasi*, Soekarno berkali-kali menekankan bahwa kolonialisme belumlah mati. Lebih lanjut dikatakannya bahwa kolonialisme selalu berjuang untuk mempertahankan posisi dan melindungi kepentingannya melalui cara manipulasi, subversi dan intervensi.<sup>221</sup>

Semangat yang diungkapkan dalam pidatonya semua bersifat anti Barat dan anti kolonialisme-imperialisme. Doktrin hidup berdampingan secara damai bagi Soekarno tidak ada artinya jika kekuasaan-kekuasaan yang telah mapan (OLDEFOS) masih tetap bertahan. Soekarno menginginkan negara-negara nonblok untuk mengenyahkan kekuasaan yang telah mapan tersebut karena mereka merupakan sumber dari imperialisme dan kolonialisme. Pidato Presiden Soekarno tersebut menyimpang sepenuhnya dari ideologi nonblok yang dikumandangkan oleh Nehru. Dan pidato tersebut hanya mendapat sambutan hangat dari negara-negara Afrika yang baru merdeka.<sup>222</sup>

---

<sup>220</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 348

<sup>221</sup>Departemen Penerangan RI, *Masa Konfrontasi*, Pidato Presiden Soekarno pada Konperensi Kedua Negara-negara Nonblok, di Kairo, 6 Oktober 1964

<sup>222</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 349-350

Shastri sebagai pengganti Nehru dalam konperensi itu ternyata cukup mampu mempertahankan posisi India, kemurnian ideologi nonblok dan doktrin hidup berdampingan secara damai. Mengikuti jalan pemikiran Nehru, Shastri sangat memperhatikan masalah-masalah pemeliharaan perdamaian dunia dan hubungan bertetangga yang baik antar negara. Oleh karena itu Shastri mengecam pidato Presiden Soekarno dan ia menekankan bahwa hidup berdampingan secara damai merupakan unsur terpenting dari politik luar negeri setiap negara. Kemudian ia juga menekankan bahwa kita harus menyelesaikan setiap perselisihan tidak dengan konfrontasi tetapi dengan cara damai. <sup>223</sup>

Usaha Shastri untuk mengajak peserta konperensi mengutuk percobaan senjata nuklir RRC mengalami kegagalan. Hanya Uskup Makarios dari Siprus yang mendukungnya. Negara-negara lainnya hanya berdiam diri saja termasuk Indonesia. India sangat mengkuatirkan percobaan tersebut karena dapat membahayakan perdamaian dunia. Sedangkan bagi Indonesia, keberhasilan percobaan tersebut membuka peluang baginya untuk mendapat teknologi nuklir dari RRC. <sup>224</sup>

Di lain pihak, Indonesia juga mengalami kegagalan dalam upayanya memperoleh dukungan atas doktrin NEFOS dan politik konfrontasi. Pidato yang mengemukakan gagasan

---

<sup>223</sup> Ibid., hlm. 350

<sup>224</sup> Ibid., hlm. 350-351

NEFOS ternyata gagal menimbulkan kesan yang mendalam dari para peserta konperensi. Selain itu Indonesia ternyata tidak mendapat dukungan yang memuaskan terhadap konfrontasinya terhadap Malaysia. Bahkan dalam rancangan akhir resolusi antara lain dinyatakan bahwa negara anggota seyogyanya tidak menggunakan atau mengancam dengan paksa terhadap integritas wilayah negara lain dan bahwa batas wilayah yang telah ditetapkan seyogyanya tidak dilanggar. Sebagai tanda ketidaksenangan terhadap rancangan resolusi tersebut, Soekarno tidak menghadiri upacara penutupan konperensi untuk menandatangani rancangan akhir resolusi tersebut.<sup>225</sup>

Ketidakhadiran Nehru ternyata tidak mengurangi pertentangan Indonesia dan India. Situasi itu menyebabkan Indonesia semakin akrab dengan RRC. Pertentangan demi pertentangan membuat hubungan Indonesia dan India semakin memburuk.

#### E. Kegagalan Konperensi Asia-Afrika II

Adanya ganjalan dalam hubungan tiga besar Asia (RRC, Indonesia dan India) dan pecahnya persatuan Afrika merupakan penghalang terbesar pelaksanaan KAA II. Gagasan Indonesia untuk menyelenggarakan KAA II mendapat dukungan

---

<sup>225</sup> Michael Leifer, op. cit., hlm. 147-148

penuh dari RRC dan juga Pakistan. Sedangkan India sejak semula telah menentanginya.<sup>226</sup> Menurut Nehru, Bandung telah mencapai titik maksimal dan telah berhasil menampilkan solidaritas Asia-Afrika. Diadakannya Bandung II (KAA II) akan menghancurkan citra solidaritas itu.<sup>227</sup> Konstelasi politik Asia-Afrika sudah tidak memungkinkan lagi untuk menyelenggarakan KAA II. India dan RRC terlibat dalam perang perbatasan. Indonesia melakukan konfrontasi terhadap Malaysia. Hubungan Indonesia dan India juga pada titik terendah. Dan negara-negara Afrika terpecah belah dalam kelompok-kelompok yang bermusuhan seperti kelompok Casablanca, Monrovia dan Brazzaville.<sup>228</sup>

Berbagai cara telah dilakukan India untuk menggagalkan KAA II. Akan tetapi usaha Indonesia untuk melaksanakan KAA II juga tidak pernah berhenti. Pada tanggal 10-15 April 1964, di Jakarta diadakan konperensi untuk mempersiapkan KAA II. Konperensi itu dihadiri oleh 22 negara. Bayangan perpecahan telah kentara dalam konperensi itu. Tidak mengherankan jika Birma sebagai salah satu sponsor KAA I absen dalam konperensi persiapan itu. Sedangkan kehadiran India di sana lebih cenderung untuk mengacaukan dan menggagalkan konperensi persiapan itu.<sup>229</sup>

---

<sup>226</sup>Lihat pembahasan pada Bab IV, hlm. 74-80 dan Bab V, hlm. 107-111.

<sup>227</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 335

<sup>228</sup>*Ibid.*, hlm. 522

<sup>229</sup>*Ibid.*, hlm. 524-525

Dalam konperensi persiapan itu, delegasi India yang dipimpin oleh Sardar Swaran Singh mengajukan proposal yang isinya bertentangan dengan keinginan Indonesia, RRC maupun Pakistan. India mengusulkan waktu penyelenggaraan konperensi bertepatan dengan peringatan 10 tahun Konperensi Bandung yaitu tanggal 18 April 1965. Usulan India tersebut langsung mendapat tantangan dari Pakistan yang dipimpin oleh Z.A. Bhutto. Dalam hal ini Pakistan mendapat dukungan dari Indonesia dan RRC. Menurut pendapat mereka sangat riskan untuk menyelenggarakan konperensi sebesar itu dengan persiapan yang singkat. Pertimbangan itu cukup masuk akal karena pada bulan Oktober 1964 negara-negara nonblok mengadakan KTT-nya yang kedua. Di samping itu mereka juga khawatir KAA II akan menjadi anti-klimaks dari KTT Nonblok II. Akhirnya diputuskan KAA II diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 1965.<sup>230</sup>

Mengenai tempat konperensi, India mengusulkan penyelenggaraannya di salah satu negara Afrika. Usulan India tersebut mendapat dukungan dari sebagian besar peserta terutama negara-negara Afrika. Bagi Indonesia, usulan tersebut merupakan pukulan yang menyakitkan karena Indonesia berambisi menjadi tuan rumah kembali. Tujuan utama India mengusulkan tempat penyelenggaraan di salah satu

---

<sup>230</sup>Franklin B. Weinstein, "The Second Asian-African Conference: Preliminary Bouts", Asian Survey, Vol. 5, No. 7, Juli, 1965, hlm. 363

negara Afrika adalah agar Indonesia, RRC dan Pakistan tidak mudah untuk menyetir jalannya konperensi. Kemudian pemilihan kota penyelenggara diserahkan kepada Organisasi Persatuan Afrika (OAU). Kota Aljir di Aljazair terpilih sebagai tempat penyelenggaraan KAA II.<sup>231</sup>

Dalam proposal itu, India juga mengusulkan untuk mengundang Uni Soviet dan Malaysia dalam KAA II. Usulan itu membuat berang pihak RRC dan Indonesia. Alasan yang diberikan India dengan mengundang Uni Soviet adalah karena secara geografis Soviet mempunyai wilayah di benua Asia. Di samping itu Uni Soviet telah ikut dalam berbagai pertemuan negara-negara Asia-Afrika dan Soviet simpati terhadap masalah yang dihadapi negara-negara Asia-Afrika. Tantangan paling keras terhadap usulan itu datang dari RRC. Mudah dimengerti RRC menolaknya karena hubungannya dengan Soviet sedang memburuk. Sedangkan motivasi India mengundang Soviet adalah untuk mengimbangi RRC dalam KAA II. Tetapi akhirnya konperensi memutuskan untuk tidak mengundang Uni Soviet ke KAA II.<sup>232</sup>

Usulan untuk mengundang Malaysia ke KAA II tentu saja mendapat tantangan dari Indonesia. Bagi Indonesia KAA II merupakan sarana untuk memperoleh dukungan atas politik konfrontasinya terhadap Malaysia. India mengusul-

---

<sup>231</sup>Ibid., hlm. 363-364

<sup>232</sup>Ibid., hlm. 365-366; Ide Anak Agung Gde Agung, op. cit., hlm. 529-530

kan mengundang Malaysia karena Malaysia merupakan negara Asia. Tetapi menurut pandangan Indonesia, Malaysia adalah alat dari kolonialisme baru. Penolakan Indonesia terhadap usulan India itu mendapat dukungan dari RRC dan Pakistan. Sedangkan dukungan atas usulan India datang dari Srilanka, Mesir dan negara-negara moderat lainnya. Akhirnya konperensi mencari jalan tengah yang merekomendasikan Malaysia akan diundang jika antara Indonesia, Malaysia dan Filipina bisa secepatnya menyelesaikan masalah mereka. Tetapi kemudian Indonesia secara sepihak mengumumkan bahwa Malaysia tidak akan diundang ke KAA II.<sup>233</sup>

Pertentangan yang terjadi dalam konperensi persiapan telah menunjukkan bahwa solidaritas Asia-Afrika kini hanya merupakan mitos belaka.<sup>234</sup> Itulah sebabnya gagasan KAA II menghadapi bermacam-macam kontroversi internasional. Dan ternyata di Aljazair sendiri telah lama membara suatu konflik intern-domestik yang meletus ketika KAA II akan dibuka. Pada tanggal 19 Juni 1965, terjadi kudeta berdarah di Aljir. Kolonel Boumedienne menggulingkan Presiden Ben Bella. Situasi di Aljir menjadi tidak menentu sehingga banyak negara peserta KAA II menunda keberangkatannya. Situasi ini membuat delegasi India mengusulkan

---

<sup>233</sup>F.B. Weinstein, *op. cit.*, hlm. 367-368; Ide Anak Agung Gde Agung, *op. cit.*, hlm. 530-531

<sup>234</sup>G.H. Jansen, *op. cit.*, hlm. 406

agar KAA II ditunda pelaksanaannya. Tetapi delegasi Indonesia menginginkan agar KAA II tetap dilaksanakan. Karena situasi di Aljir tetap tak menentu maka KAA II terpaksa ditunda sampai bulan Nopember 1965. Keputusan ini ditetapkan oleh KTT "kecil atau terbatas" antara Nasser, Soekarno dan Cho En Lai di Kairo pada tanggal 28 Juni 1965.<sup>235</sup>

Ditundanya KAA II membuat kemarahan Indonesia kepada India semakin besar. Apa lagi pada bulan September 1965 pecah perang antara India dan Pakistan di Kashmir. Indonesia dengan tegas mendukung Pakistan. Menlu Subandrio bahkan menyatakan: "adalah suatu kewajiban bagi negara-negara yang tergolong ke dalam NEFOS untuk membantu Pakistan menghadapi agresi India". Demonstrasi besar yang mengutuk agresi India terhadap Pakistan meletus di Jakarta. Kedutaan Besar India di Jakarta menjadi sasaran kemarahan para demonstran. Yel-yel yang menyatakan India sebagai musuh dan budak imperialis meluncur di mulut para demonstran. Kemudian sikap anti India itu mulai berkurang ketika G 30 S/PKI mengalami kegagalan. Kekuasaan Soekarno menjadi semakin lemah. Indonesia akhirnya disibukkan oleh kemelut dalam negeri yang akhirnya meruntuhkan sistem Demokrasi Terpimpin dan memunculkan Orde Baru. Hubungan

---

<sup>235</sup>Roeslan Abdulgani, Indonesia menatap Masa Depan (Jakarta: Pustaka Merdeka, 1987), hlm. 387; Ide Anak Agung Gde Agung, op. cit., hlm. 536-541.

dengan RRC dibekukan pada bulan Oktober 1967. Sedangkan KAA II tidak pernah terlaksana. Hubungan dengan India yang semula memburuk sedikit demi sedikit dipulihkan kembali.<sup>236</sup>

Kesimpulan dari hubungan Indonesia dan India pada tahun 1950-1965 akan dibahas pada bab VI berikut ini.



---

<sup>236</sup>L.P. Singh, *op. cit.*, hlm. 664-665.

BAB VI  
KESIMPULAN

Setelah penulis uraikan panjang lebar mengenai hubungan Indonesia dan India pada tahun 1950-1965 ditinjau dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Politik Luar Negeri Indonesia.

Pancasila merupakan dasar politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer (1950-1959) dan pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965). Pancasila sebagai dasar politik luar negeri dapat dilihat dalam Pembukaan UUDS 1950 alinea keempat dan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menggunakan asas bebas aktif. Pada tahun 1950-1965, sering terjadi inkonsistensi bahkan penyelewengan terhadap dasar dan asas politik luar negeri Indonesia. Penyelewengan itu terutama terjadi pada masa demokrasi terpimpin.

b. Politik Luar Negeri India.

Panchsheel merupakan dasar politik luar negeri India. Dan yang menjadi prinsip utama politik luar negeri India adalah nonblok. Dalam pelaksanaannya, India tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasar politik luar negerinya yang terkandung dalam Panchsheel.

c. Prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Indonesia dan India mempunyai banyak kesamaan. Politik luar negeri kedua negara sama-sama memperjuangkan perdamaian dunia, kemerdekaan semua bangsa, anti kolonialisme dan imperialisme, anti rasialisme dan nonblok terhadap negara-negara besar. Adanya kesamaan ini membuat kedua negara mudah untuk menjalin hubungan baik.

2. Pada tahun 1950-1958, hubungan Indonesia dan India berlangsung sangat baik. Hubungan baik tersebut ditandai dengan:

- a. Saling berkunjung para pejabat pemerintahan kedua negara. Pada tanggal 23-30 Januari 1950, Presiden Soekarno mengadakan kunjungan ke India. Kunjungan tersebut dibalas oleh PM Nehru pada tanggal 7-17 Juni 1950. Hal serupa juga dilakukan oleh Wapres Mohammad Hatta dan Wapres Radhakrisnan pada tahun 1955.
- b. Ditandatanganinya perjanjian persahabatan pada tanggal 3 Maret 1951. Dalam perjanjian tersebut, kedua negara berikrar untuk menciptakan suatu perdamaian yang abadi dan persahabatan yang kekal, meningkatkan hubungan diplomatik dan kerja sama diberbagai bidang.
- c. Dijalinnya kerja sama perdagangan pada tahun 1953. Kedua negara berusaha untuk meningkatkan hubungan

perdagangan terutama dalam bidang ekspor-impor beserta dengan segala prosedur pelaksanaannya.

- d. Dijalinnnya kerja sama kebudayaan dan pendidikan pada tahun 1955. Kedua negara berhasrat untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian dan kebudayaan dengan mengadakan pertukaran mahaguru dan mahasiswa, kunjungan misi-misi kesenian dan olah raga, dan beasiswa bagi para mahasiswa.
- e. Dijalinnnya kerja sama Angkatan Udara (AU) kedua negara pada tahun 1956. Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyempurnakan AU kedua negara yang masih dalam taraf pengembangan.
- f. Diselenggarakannya Konperensi Asia-Afrika (KAA) pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung. Terselenggaranya KAA tersebut merupakan sukses besar kerja sama kedua negara (bersama Pakistan, Birma dan Sri Lanka) diforum konperensi internasional. Keberhasilan KAA telah mengangkat martabat bangsa-bangsa Asia-Afrika di mata dunia internasional. Walaupun India banyak mengalami kekecewaan dalam KAA, hubungannya dengan Indonesia tetap berjalan baik.
- g. India secara konsisten mendukung Indonesia dalam masalah Irian Barat.

3. Pada tahun 1959-1961, hubungan Indonesia dan India mengalami keretakan. Faktor penyebabnya adalah :

a. Perbedaan sikap terhadap RRC. Pada saat hubungan India dan RRC mengalami ketegangan, Indonesia justru sedang berupaya menjalin hubungan yang lebih akrab dengan RRC. Agar hubungan dengan RRC tidak terganggu, maka Indonesia memilih berdiam diri dalam masalah Tibet dan konflik India-RRC. Sikap Indonesia itu membuat India mempertanyakan kadar persahabatan Indonesia.

b. Perbedaan pendapat yang mendasar antara Soekarno dan Nehru. Perbedaan pendapat itu meledak dalam KTT Nonblok I di Beograd. Nehru dan Soekarno tidak lagi mempunyai wawasan yang sama dalam melihat dan mengatasi masalah-masalah dunia. Menurut Nehru, dunia sekarang ini dicekam oleh konflik antara Blok Barat dan Blok Timur. Agar perdamaian dunia tetap terjaga, Nehru menyerukan agar setiap negara hidup berdampingan secara damai. Sedangkan menurut Soekarno, dunia terbagi dalam NEFOS dan OLDEFOS di mana tidak mungkin untuk hidup berdampingan secara damai antara keduanya. Pertentangan kedua pemimpin ini membuat hubungan kedua negara menjadi semakin retak.

4. Pada tahun 1962-1965, hubungan Indonesia dan India memburuk. Memburuknya hubungan kedua negara ini disebabkan



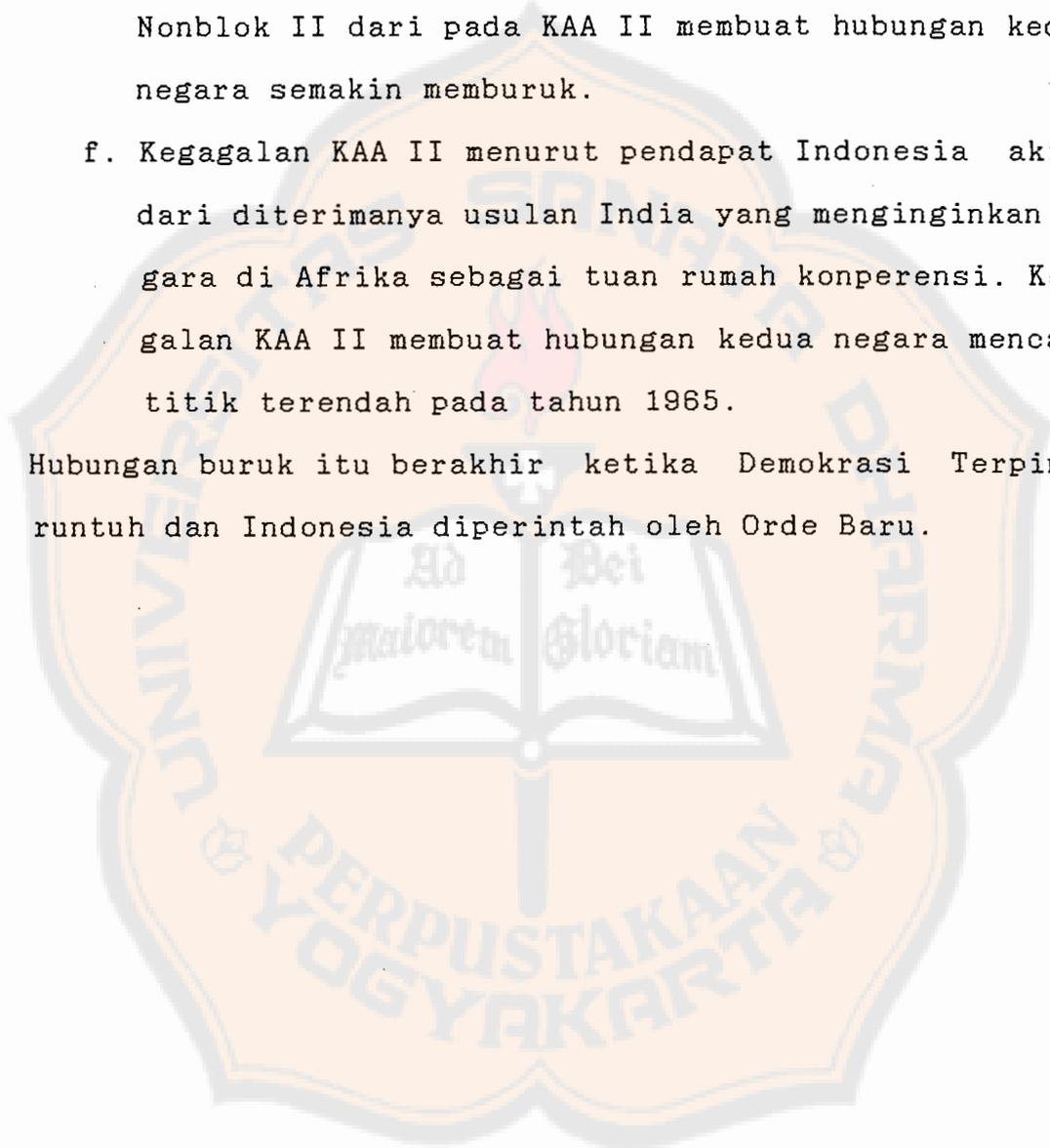
babkan oleh :

- a. Kebijakan politik luar negeri kedua negara tidak lagi sejalan sehingga perbenturan kepentingan selalu terjadi. Politik luar negeri Indonesia menjadi militan dan konfrontatif. Sedangkan India tetap konsisten pada prinsip-prinsip dasar politik luar negerinya.
- b. Tindakan Sondhi yang berusaha menghapuskan status Asian Games IV telah membuat kemarahan bangsa Indonesia kepada bangsa India. Tindakan tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia berasumsi bahwa tindakan tersebut diinspirasikan oleh pemerintah India. Dalam hal ini tindakan pemerintah Indonesia mencampuradukkan olah raga dan politik adalah perbuatan yang salah.
- c. Sikap netral Indonesia dalam perang India-RRC membuat pemerintah India sangat marah kepada Indonesia. Sebagai negara yang berpengaruh di Asia sikap netral itu sangat menguntungkan posisi RRC. Dengan sikap itu Indonesia seolah-olah melupakan jasa baik India di masa revolusi kemerdekaan dan dukungan konsisten India dalam masalah Irian Barat.
- d. Sikap India yang mendukung Malaysia dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia membuat Indonesia semakin memusuhi India. Sikap India ini merupakan balasan

dari sikap netral Indonesia ketika pecah perang India-RRC.

- e. Tindakan India yang lebih memprioritaskan KTT Nonblok II dari pada KAA II membuat hubungan kedua negara semakin memburuk.
- f. Kegagalan KAA II menurut pendapat Indonesia akibat dari diterimanya usulan India yang menginginkan negara di Afrika sebagai tuan rumah konperensi. Kegagalan KAA II membuat hubungan kedua negara mencapai titik terendah pada tahun 1965.

Hubungan buruk itu berakhir ketika Demokrasi Terpimpin runtuh dan Indonesia diperintah oleh Orde Baru.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Abdulgani, Roeslan  
1987 Indonesia Menatap Masa Depan.  
Jakarta: Pustaka Merdeka.
- 
- 1956 Mendayung Dalam Taufan.  
Djakarta: Penerbit Endang.
- 
- 1975 Sejarah, Cita-cita Dan Pengaruhnya. Konperensi Asia-Afrika Bandung.  
Jakarta: Yayasan Idayu.
- 
- 1980 The Bandung Connection.  
Jakarta: Gunung Agung.
- Agung, Ide Anak Agung Gde  
1973 Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965.  
The Hague: Mouton & Co.
- Asmawi, Bakran (ed.), dkk.  
1985 Pesan Pembaharuan Dari Bandung.  
Jakarta: LKBN ANTARA.
- Banerjee, Anil Chandra  
1950 The Constitution Of The Indian Republic.  
Calcutta: A. Mukherjee & Co. Ltd.
- Barnds, William J.  
1972 India, Pakistan And The Great Powers.  
New York: Praeger.
- Biro Pusat Statistik  
1963 Statistical Pocketbook Of Indonesia 1963.  
Djakarta: BPS.
- Edwardes, Michael  
1973 Nehru: A Political Biography.  
Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books.
- Feith, Herbert  
1968 The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia.  
Ithaca, New York: Cornell University Press.

Fernandes, Frans S.

- 1988 Hubungan Internasional Dan Peranan Bangsa Indonesia Suatu Pendekatan Sejarah.  
Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Hardgrave, Rebert L, Jr.

- 1980 India: Government And Politics In A Developing Nations. New York: Harcourt Bracejovanovich.

Hatta, Mohammad

- 1953 Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia.  
Djakarta: Tintamas.

- 
- 1976 Mendayung Antara Dua Karang.  
Jakarta: Bulan Bintang.

Heuken, A.

- 1984 Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila.  
Jakarta: Cipta Loka Caraka.

Jain, Girilal

- 1963 Panchsheela.  
Djakarta: Swada.

Jansen, G.H.

- 1966 Nonalignment And The Afro-Asian States.  
New York: Praeger.

Kahin, George McTurnan

- 1956 The Asian-African Conference. Bandung, Indonesia, April 1955.  
Ihaca, New York: Cornell University Press.

Kartodirdjo, Sartono (ed.)

- 1982 Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif. Jakarta: Gramedia.

Kartono, Kartini

- 1980 Pengantar Metodologi Research Sosial.  
Bandung: Alumni.

Kundra, J.C.

- 1955 Indian Foreign Policy 1947-1955. A Study Of Relations With Western Bloc.  
Groningen: J.B. Wolters.

Kusumaatmadja, Mochtar

- 1983 Politik Luar Negeri Indonesia Dan Pelaksanaannya Dewasa Ini. (Editor: Eddy Damian dan Budiono Kusumohamidjojo). Bandung: Alumni.

- Kusumohamidjojo, Budiono  
1987 Hubungan Internasional Kerangka Studi Analitis.  
Bandung: Binacipta.
- Legge, John D.  
1985 Sukarno. Sebuah Biografi Politik.  
Jakarta: Sinar Harapan.
- Leifer, Michael  
1989 Politik Luar Negeri Indonesia.  
Jakarta: Gramedia.
- Mackie, J.A.C.  
1974 Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute  
1963-1966.  
Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Mani, P.R.S.  
1989 Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah.  
Jakarta: Grafiti Pers.
- Maxweel, Neville  
1972 India's China War.  
Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books.
- Modelski, George (ed.)  
1963 The New Emerging Forces Documents On The  
Indonesia Foreign Policy.  
Canberra: Australian National University.
- Moedjanto, G.  
1988 Indonesia Abad Ke-20 II.  
Yogyakarta: Kanisius.
- Nazir, Moh.  
1985 Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notosoetardjo  
1956 Dokumen-2 Konperensi Media Bundar.  
Djakarta: Penerbit Endang.
- Palmer, Norman D.  
1961 The Indian Political System.  
Massachusetts: The Riverside Press.
- Sabir, M.  
1987 Politik Bebas Aktif.  
Jakarta: CV Haji Masagung.

- 1990 Quo Vadis Nonblok?.  
Jakarta: CV Haji Masagung.
- Sekretariat Negara RI  
1981 Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949.  
Jakarta: PT Tira Pustaka.
- Simatupang, T.B.  
1988 Laporan Dari Banaran: Kisah Seorang Prajurit  
Selama Perang Kemerdekaan.  
Jakarta: Sinar Harapan.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (ed.)  
1987 Metodologi Penelitian Survei.  
Jakarta: LP3ES.
- Sinha, V.K.  
1966 "India And South East Asia" in A.B. Shah (ed.).  
India's Defense And Foreign Policies.  
Bombay: Manaktalas.
- Yusuf, Suffri  
1989 Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri.  
Jakarta: Sinar Harapan.
- B. ARTIKEL :
- Djiwandono, J. Soedjati  
1985 "Empat Puluh Tahun Politik Luar Negeri Indonesia:  
Perubahan Dan Kesenambungan". Analisa. No. 8, Agus-  
tus: 643-666.
- Pauker, Ewa T.  
1965 "Ganefo I: Sports And Politics In Jakarta".  
Asian Survey. Vol. 5, April: 171-185.
- Singh, L.P.  
1967 "Dynamics Of Indian-Indonesian Relations".  
Asian Survey. Vol. 7, Sepetember: 656-666.
- Weinstein, Franklin B.  
1965 "The Second Asian-African Conference: Preliminary  
Bouts". Asian Survey. Vol. 5, Juli: 359-373.

C. BERITA :

Kementrian Penerangan Republik Indonesia  
1955 Berita Konperensi Asia-Afrika. No. 1.

---

1955 Berita Konperensi Asia-Afrika. No. 2.

Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia  
1951 Indonesian Affairs. Vol. 1, No. 3.

D. DOKUMEN :

Departemen Penerangan Republik Indonesia  
1964 Masa Konfrontasi. Pidato Presiden Soekarno  
Pada Konperensi Kedua Negara-negara Nonblok  
di Kairo, 6 Oktober.

Ministry of Information Republic of Indonesia  
1958 Friendly Relations Indonesia-India. Special Issue,  
Djakarta, 1 December.

Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia,  
1958 The Question Of West Irian In The United Nations  
1954-1957. Special Issue, Djakarta.

Kementrian Penerangan Republik Indonesia  
1958 Menyongsong Tamu Negara Dr. Rajendra Prasad,  
Presiden Republik India. Djakarta.

---

1955 Konperensi Asia-Afrika Di Bandung.  
Penerbitan Khusus, 1 Juli.

LAMPIRAN 1

TREATY OF FRIENDSHIP BETWEEN INDIA AND  
THE REPUBLIC OF INDONESIA

The President of India and the President of the Republic of Indonesia being desirous of consolidating the bonds of peace and friendship, which have ever existed between the two states and of developing peaceful and friendly relations between them, have resolved to conclude this Treaty and have, for that purpose appointed as their Plenipotentiaries the following persons, viz.

*The President of India*

HIS EXCELLENCY SHRI PARAMASIVA SUBBARAYAN  
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

*The President of the Republic of Indonesia*

HIS EXCELLENCY MOHAMMAD ROEM  
Minister for Foreign Affairs

Who, having communicated to each other their respective full powers and found them good and in due form, have agreed and signed the following articles:

Article I

There shall be perpetual peace and unalterable friendship between India and the Republic of Indonesia.

Article II

Each of the contracting parties shall be able to appoint diplomatic representatives, Consuls General, Consuls, Vice-Consuls and Consular Agents, who shall reside in towns, ports and other places in each other's territory where the corresponding representatives of other countries reside or in such other places as may be agreed to.

Consuls General, Consuls, Vice-Consuls and Consular Agents shall be provided with exequaturs or other valid authorization of their appointment. Such exequatur or authorization is liable to be withdrawn by the country which issued it if considered necessary. The reasons for the withdrawal shall be indicated wherever possible.

The persons mentioned above shall enjoy on a reciprocal basis all the rights, privileges, exemptions and immunities that are accorded to persons of corresponding status of other states.

Article III

The two Governments agree that their representatives shall meet from time to time and as often as occasion requires to exchange views on matters of common interest and to consider ways and means for mutual co-operation in such matters.

Article IV

The nationals of either of the contracting parties shall have in the territory of the other party, subject to the laws and rules in force in that territory, the right of the establishing themselves and to residence, of going from and coming to and of moving freely within that territory.

Article V

The contracting parties will, as soon as possible, enter into negotiations for the conclusion of a comprehensive treaty or treaties of commerce and establishment.

Article VI

Any dispute arising out of the interpretation or application of this treaty or one or more of its articles shall be settled in the first instance, by negotiations, and, if no settlement is reached within a period of six months from the commencement of negotiations, by arbitration in such manner as may hereafter be determined by a general or special agreement between the contracting parties.

Article VII

The present treaty shall be ratified and shall come into effect on the date of the exchange of ratifications which shall take place as soon as possible in New Delhi.

IN WITNESS WHERE OF, the Plenipotentiaries have signed the present treaty in the English and Indonesian languages, the English text being, in case of dispute, the authentic text, and have affixed there to their seals.

Done in duplicate in Djakarta the third day of March in the year one thousand nine hundred and fifty-one.

For the President of India  
signed by:

PARAMASIVA SUBBARAYAN,  
Ambassador Extraordinary  
and Plenipotentiary

For the President of the  
Republic of Indonesia  
signed by:

MOHAMMAD ROEM,  
Minister for Foreign  
Affairs

LAMPIRAN 2

TRADE AGREEMENT  
BETWEEN  
THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE REPUBLIC OF INDIA

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India being desirous of extending direct trade relations between their respective countries have agreed as follows:

Article I

The contracting parties will take all appropriate measures to promote trade between the two countries in all possible ways, in particular with regard to the items mentioned in the schedules "A" and "B" attached to this Agreement.

Nothing in this Agreement shall be deemed to preclude trade in goods or commodities not mentioned in the said Schedules.

Article II

The contracting parties agree further that the exchange of goods shall be subject to and within the scope of the general import-export regulations in force from time to time in each country.

Article III

The contracting parties agree that the grant of facilities and accordingly the issue of licences for the import and export of goods or commodities by each country to the other shall be no less favourable than those applied to any other country.

Article IV

In order to promote international trade both parties will take all appropriate measures to facilitate trade on a multilateral basis.

Article V

In order to facilitate the implementation of this Agreement the contracting parties shall consult each other in respect of any matters arising from or in connection with the supply of goods or commodities between the two countries.

Article VI

Ships on Indonesian and Indian registry shall be accorded in the port of the other party the usual facilities in respect of bunkering and other services and the customary treatment in respect of duties, charges and taxes, subject to foreign exchange regulations in force from time to time in each country. No ships of either party shall have the right to participate in the coastal trade of the other party.

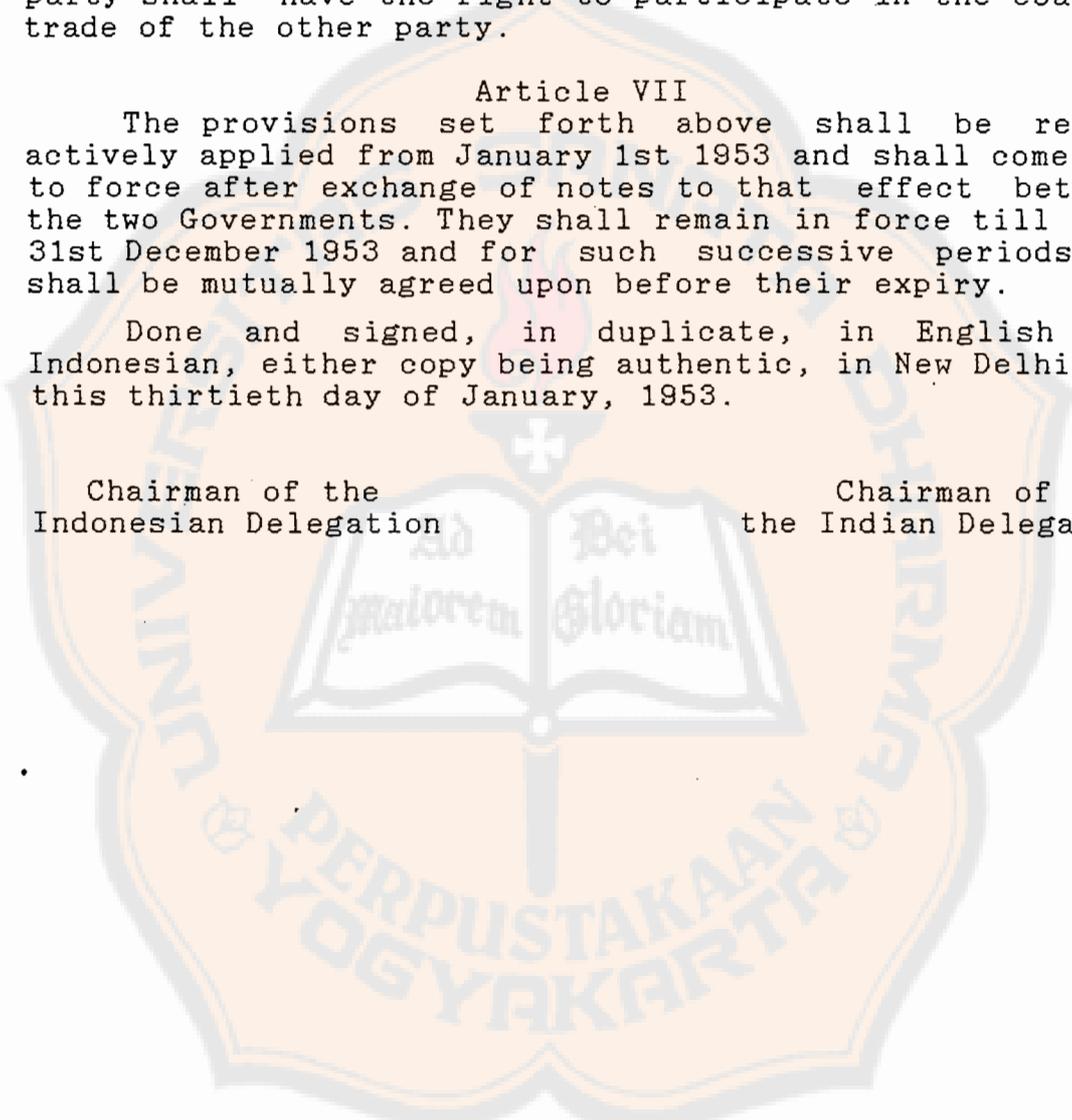
Article VII

The provisions set forth above shall be retroactively applied from January 1st 1953 and shall come into force after exchange of notes to that effect between the two Governments. They shall remain in force till the 31st December 1953 and for such successive periods as shall be mutually agreed upon before their expiry.

Done and signed, in duplicate, in English and Indonesian, either copy being authentic, in New Delhi, on this thirtieth day of January, 1953.

Chairman of the  
Indonesian Delegation

Chairman of  
the Indian Delegation



SCHEDULE 'A'  
EXPORTS FROM INDIA

1. Jute goods.
2. Tobacco manufactured.
3. Tobacco unmanufactured.
4. Woollen piecegoods.
5. Cotton piecegoods.
6. Handloom goods.
7. Cotton yarn.
8. Vegetables oils:
  - (a) Linseed oil.
  - (b) Castor oil.
9. Coal.
10. Cement.
11. Building hardware including screws, bolts, nuts, lock, etc.
12. Soaps.
13. Paints and varnishes.
14. Pharmaceutical products.
15. Chemicals and chemical preparations.
16. Tea chests.
17. Lac including shellac.
18. Sports goods.
19. Rubber tyres and tubes.
20. Pocerlainware including insulators and pottery.
21. Paper paste-board and stationary.
22. Machinery including agricultural implements and tools.
23. Household-wares including sewing machines, hurricane lanterns, utensils and glassware.
24. Electric fans.
25. Electric motors.
26. Industrial machinery including diesel engines, sugar-cane, crushers and textile machinery such as carding machinery.
27. Motor vehicle batteries.
28. Dry cells.
29. Machine tools.
30. Handicrafts and cottage industry products.

SCHEDULE 'B'  
EXPORTS FROM INDONESIA

1. Copra.
2. Coconut oil.
3. Palm oil.
4. Essential oil.
5. Spices and betelnuts.
6. Timber.
7. Tin.
8. Rubber.
9. Hides and skin, raw.
10. Quinine salt.
11. Canes and rattans.
12. Gum, resins and dammar.
13. Barks of tanning cutch and gambier.
14. Sisal fibre.
15. Tobacco wrappers.
16. Palm kernels (fresh and dry fruits).



LAMPIRAN 3

A G R E E M E N T  
CONCERNING CULTURAL RELATIONS  
BETWEEN  
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA  
THE GOVERNMENT OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF INDIA

Conscious of the many centuries of cultural relations between the peoples of Indonesia and India.

Desiring to strengthen their existing friendship and promote further understanding and closer cooperation in the field of culture, to which general expression was given in their Treaty of Friendship signed on the 3rd March, 1951 and following the recommendation to enter into bilateral agreement in the field of culture and education issued in the joint communique from the Afro-Asian Conference at Bandung, 25th April, 1955.

Have decided to conclude a Cultural Agreement and to this end have appointed as their plenipotentiaries:

His Excellency Mr. L.N. Palar,  
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the  
Republic of Indonesia

The Honourable Maulana Abdul Kalam Azad,  
Minister of Education of the Republic of India

who having examined each other's credentials and found them good and in due form have agreed as follows:

Article 1

The two Governments declare their desire to encourage and facilitate cooperation in all fields of science, literature and art.

Article 2

The two Governments declare their desire to encourage and facilitate reciprocal visits of University teachers and members of scientific and cultural institutions, for the purpose of their giving lectures or special courses.

Article 3

It is the desire of each Government to institute scholarships to enable its students to pursue their studies in Universities of the other country, to study

its language and civilisations.

Article 4

Each Government will receive, as far as its own resources and requirements will permit, employers or other nationals recommended by the other Government for training in its scientific, technical and industrial institutions.

Article 5

Each Government will welcome the establishment in its territory of cultural institutes of the other, subject to compliance with the law governing the establishment of such institutes in that country and the general policy of that Government. The term "cultural institute" includes educational centres, libraries, scientific institutions of an educational nature, and institutions for the promotion of art, such as art galleries, art societies, and film libraries.

Article 6

The two Governments will encourage, so far as financially practicable, cultural and intellectual cooperation between the two countries by arranging concerts, lectures, art and scientific exhibitions, by organising student visits, by encouraging the collaboration of scientific, artistic and the literary societies and other organisations or associations devoted to the promotion of learning, by establishing chairs in Universities or other institutions of higher learning for the teaching of subjects pertaining to the country of the other, by the distribution of books and periodicals, by the exchange of archaeological specimens, objects d'art and government produced films, and through broadcasts on the radio.

Article 7

The two Governments will encourage competition in the field of sport between their two countries, and collaboration between their scout organisations.

Article 8

Each Government will, so far as it lies within its power, ensure that text books prescribed for educational institutions do not contain any errors or misrepresentations about the other country.

Article 9

The two Governments have agreed that Indonesian nationals who hold the leaving certificate of the Indonesian senior Secondary School and who have been admitted to recognized Universities in Indonesia shall be entitled, on producing their certificates, to admission

to Indian Universities, subject to the laws and regulations in force, while Indian nationals from recognised Indian Universities, who hold similar certificates shall enjoy the same privileges on the same terms, in Universities in Indonesia.

Article 10

For the purpose of carrying out this agreement, the two Governments may, if necessary, agree to set up a special commission composed, in India of the Minister of Education and the Head of the Indonesian Diplomatic Mission, and in Indonesia, of the Minister of Education and the Head of the Indian Diplomatic Mission, with such advisers as may be nominated by either member of the Commission with the object of:

- (a) supervising the working of the Agreement in the country concerned;
- (b) advising the Governments concerned on details of implementing the Agreement;
- (c) making recommendations for the selection of the personnel of the exchange of professors, students, etc.;
- (d) generally advising the Government concerned of possible improvements in the implementation of the Agreement.

At intervals of not less than once in three years the two Governments will hold joint consultation to co-ordinate the working of the Agreement in the two countries and to invite suggestions and advice from cooperating agencies concerning steps that may be deemed necessary for a more effective implementation of this Agreement.

Article 11

The present Agreement shall be ratified with the least possible delay.

The Agreement will come into force fifteen days, after the exchange of the instruments of ratification which will take place in New Delhi.

Article 12

The Agreement will remain in force for a period of ten years. It can be terminated by either party giving a minimum of six months' notice before the expiry of this period.

Otherwise it shall remain in force until either party terminates it by giving six months' notice.

In faith there of, the said plenipotentiaries have signed the present Agreement in duplicate in the English, Indonesian and Hindi languages, the English text being authentic.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

142

Signed at New Delhi, this twenty-ninth day of December 1955.

For the Government  
of Indonesia

(L.N. PALAR)  
Ambassador Extraordinary  
and Plenipotentiary.

For the Government  
of India

(A.K. AZAD)  
Minister for Education

